





Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Bakrieland secara bertahap melengkapi diri dengan berbagai perangkat pendukung GCG sebagai satu kesatuan sistem dalam penerapan di seluruh bisnis unit.

Bakrieland gradually completes itself with various GCG supporting devices as a unitary system that supports GCG implementation in all business units.

Komitmen Bakrieland

Tata Kelola Perusahaan / *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham pada khususnya, dan pemangku kepentingan pada umumnya. Tujuannya adalah agar Perusahaan dapat menghasilkan nilai ekonomi dalam jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan.

Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik mengandung 5 (lima) asas yaitu: Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, serta Kewajaran dan Kesetaraan. Implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Pemahaman ini mendasari komitmen Bakrieland untuk senantiasa menegakkan penerapan GCG dalam setiap jajaran organisasi dan kegiatan operasionalnya.

Bakrieland's Commitment

Good Corporate Governance (GCG) is a principle that regulates and controls the company in order to reach a balance between power and authority in providing its responsibility to stakeholders in general, especially to the shareholders. Its purpose is to enable the company to generate sustainable, long-term economic value for shareholders and stakeholders.

Basic principles of Good Corporate Governance contain 5 (five) principles, that is Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, as well as Fairness. Implementation of the principles of Good Corporate Governance contributes to improvements in the company's performance. As such, Bakrieland is committed to constantly applying the principles of GCG in all organizational tiers and operations.

Kerangka Penerapan GCG

Prasyarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh manfaat jangka panjang dari penerapan GCG adalah adanya suatu sistem yang didukung integritas dan komitmen tinggi dari seluruh pihak yang terlibat. Oleh karenanya, setiap perusahaan harus memiliki pedoman perilaku sebagai acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Untuk meningkatkan manfaat dari penerapan GCG, Bakrieland secara bertahap melengkapi diri dengan berbagai perangkat pendukung GCG. Selain visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan yang telah ditetapkan pada awal berdirinya, Bakrieland memiliki Pedoman Perilaku, Sistem Pelaporan Pelanggaran, Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, Peraturan Perusahaan, Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, serta berbagai Standar Prosedur Operasional (SOP). Semua ini merupakan kesatuan sistem yang menunjang tercapainya keberhasilan penerapan GCG di Bakrieland.

Pelaksanaan GCG di Bakrieland menggunakan pendekatan *top-down*, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *best practice*, dan budaya perusahaan. Seluruh unsur di dalam Perusahaan dilibatkan mulai dari tahap persiapan, internalisasi, implementasi hingga evaluasi. Hal itu tergambar pada Bagan Proses Pencapaian Tujuan GCG di Bakrieland sampai dengan tahun 2013 berikut ini.

GCG Implementation Framework

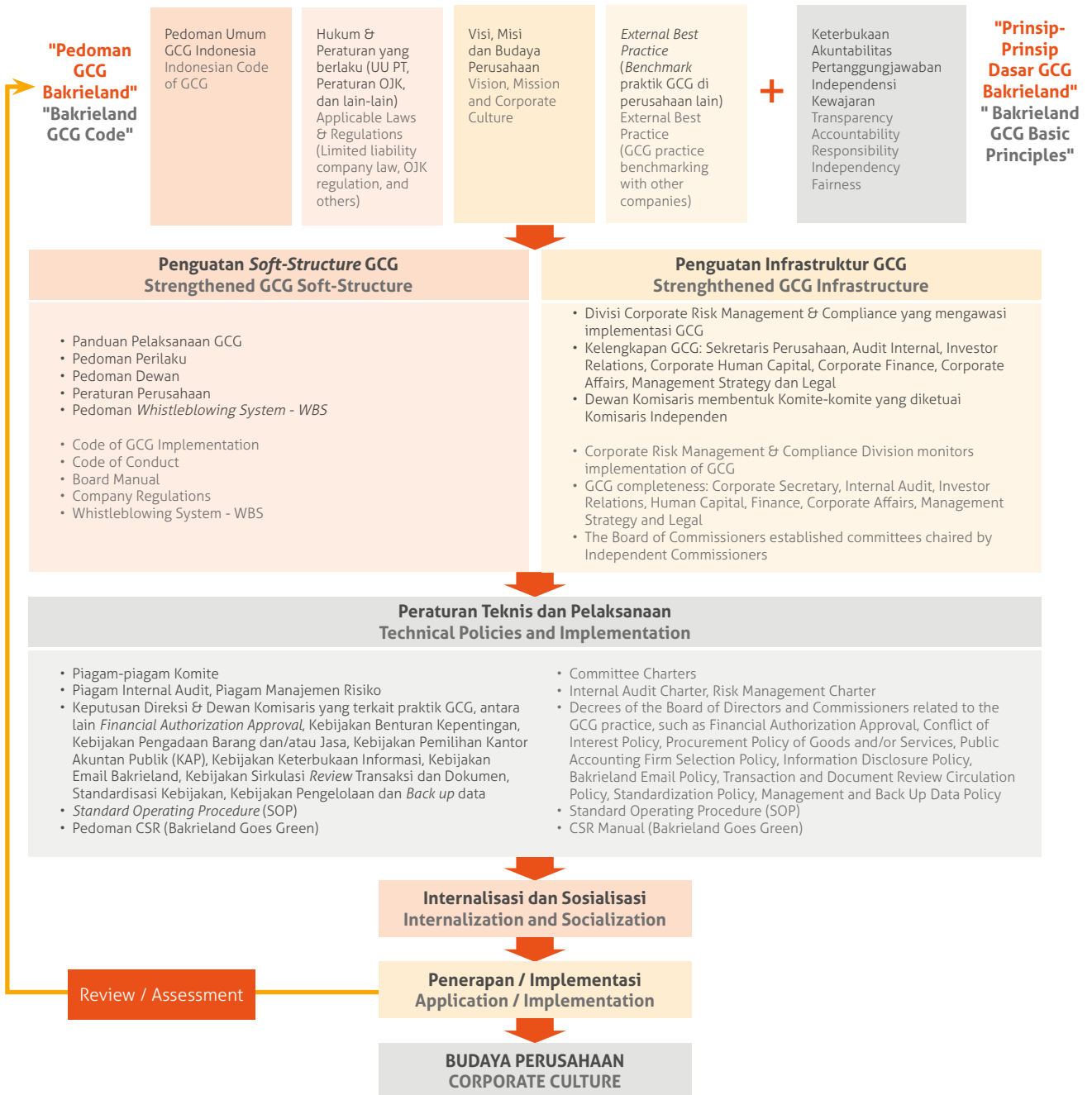
Having a reliable system in place supported by the unquestionable integrity and commitment of all parties involved is an essential precondition that must be fulfilled by companies that wish to gain long-term benefits from GCG implementation. In view of this, every company ought to establish its own code of conduct to guide organizational organs and all employees in applying professional values and business ethics as part of the corporate culture.

To enhance the benefit of GCG implementation, Bakrieland has progressively equipped itself with the necessary GCG supporting instruments. Apart from the company vision, mission and core values adopted since its inception, Bakrieland also has its own Code of Conduct, Whistleblowing System, Code of Good Corporate Governance, Company Regulations, Board Manual, and various Standard Operating Procedures. All of these instruments form a coherent system that supports the effective implementation of GCG principles in Bakrieland.

GCG in Bakrieland is implemented through a top-down approach by taking into account prevailing laws and regulations, best practices and corporate culture. All elements within the company are involved in a participatory manner beginning from the preparatory stage to GCG internalization, implementation and evaluation. This is illustrated in the following diagram on the achievement process of GCG objectives in Bakrieland as at 2013.

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Bagan Proses Pencapaian Tujuan GCG di Bakrieland
Diagram on the Achievement Process of GCG Objectives in Bakrieland



Penerapan Asas GCG

Bakrieland merancang suatu sistem pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu:

Implementation of GCG Principles

Bakrieland has established a corporate management system that covers the following elements:

Keterbukaan

Bakrieland menerapkan Asas keterbukaan dalam menjalankan bisnisnya dengan menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan serta dengan mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Informasi yang seluas-luasnya diberikan kepada publik dan pemegang saham, dengan memperhatikan peraturan OJK maupun atas inisiatif sendiri. Laporan-laporan diterbitkan secara berkala dan tepat waktu dalam dua bahasa (Inggris dan Indonesia), yang mencakup Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Semester, dan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit, serta Laporan Tahunan. Informasi juga diberikan melalui paparan publik, media cetak dan elektronik, serta forum investor.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Prinsip akuntabilitas diterapkan oleh Bakrieland antara lain melalui langkah-langkah pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris mengenai rencana anggaran tahunan dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan Perusahaan, penyampaian laporan keuangan pada RUPS Tahunan, pembentukan Audit Internal dan penunjukan auditor eksternal, serta pemberlakuan etika bisnis dan pedoman perilaku Perusahaan.

Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban mengacu kepada kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Bakrieland senantiasa menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Bakrieland terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sosial yang difokuskan pada pengembangan masyarakat yang diaktualisasikan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terpadu yang mencakup aspek Pendidikan, Sosial dan Lingkungan,

Independensi

Di Bakrieland, pengelolaan Perusahaan dilakukan secara independen, masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, Dewan Komisaris dan Direksi Bakrieland memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil, namun dimungkinkan

Transparency

Bakrieland makes it a point to ensure transparency in running its business by delivering material and relevant information, which is both easily accessible and understood by stakeholders. Bakrieland provides the public and shareholders with information to the fullest extent possible, both in compliance with FSA's regulations and on its own initiative. Bilingual reports (English and Indonesian) are published on a periodic basis and in a timely fashion, consisting of quarterly financial statements, first half financial statements, and audited financial statements, as well as annual reports. Information is also released through press statements, print and electronic media, and investor forums.

Accountability

Accountability is clarity in the functions, implementation and responsibility of work performance in the organizational organs so that management of the company are most effective. The principle of accountability as applied in Bakrieland is assured through the Board of Directors' report to the Board of Commissioners on the annual budget plan and joint evaluation of the company's financial performance; submission of financial statements to the Annual GMS; the establishment of an internal audit body and the appointment of an external auditor; as well as adherence to ethical business standards and corporate code of conduct.

Responsibility

The principle of responsibility refers to the adherence of the principles of the company's management against the principle of a healthy corporation as well as existing regulations. Bakrieland unfailingly ensures compliance with existing laws and regulations, and fulfills its obligations to the public and the environment. Bakrieland is directly engaged in a wide range of social activities focused on community development which was actualized through an integrated Corporate Social Responsibility (CSR) program that covers Educational, Social and Environmental dimensions.

Independency

In Bakrieland, corporate management is implemented in an independent manner where no organizational organ can dominate another and neither can there be intervention from others which is not appropriate within the applicable laws and regulations. For example, Bakrieland's Board of Commissioners and Board of Directors hold independent views for each decision reached, leaving room however for advice from

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

untuk mendapatkan saran dari konsultan independen, hukum, sumber daya manusia dan komite-komite untuk menunjang kelancaran tugasnya. Selain itu, saat ini Dewan Komisaris Bakrieland beranggotakan 2 (dua) orang Komisaris Independen untuk menjamin independensi Dewan Komisaris dalam pengawasan Perusahaan.

Kewajaran

Bakrieland menerapkan prinsip keadilan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan juga selalu menerapkan perlakuan yang setara baik kepada publik, otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, maupun para pemangku kepentingan. Sementara itu hubungan dengan karyawan dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar.

Untuk memastikan bahwa penerapan asas-asas GCG dalam setiap aspek bisnis Bakrieland, diperlukan peran aktif serta dukungan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Peran aktif dan dukungan ditunjukkan melalui :

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal perusahaan.
- Penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
- Rencana strategis perusahaan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Transparansi informasi, termasuk diantaranya kondisi keuangan Perusahaan.

Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Sebagai bentuk komitmen bersama terhadap penerapan GCG, sejak tahun 2007 Bakrieland telah memiliki Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Panduan ini sekaligus menjadi landasan bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi terkait proses GCG dalam menyusun berbagai kebijakan yang menjiwai praktik bisnis Perusahaan tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bakrieland mencakup berbagai aspek, antara lain kebijakan Tata Kelola Perusahaan, pedoman Tata Kelola bagi organ Perusahaan, prinsip-prinsip dan tujuan, struktur pengelolaan Perusahaan, serta kebijakan transparansi.

independent legal and human resource consultants, as well as relevant committees to support the smooth implementation of duties. Furthermore, Bakrieland's Board of Commissioners currently consists of 2 (two) Independent Commissioners to guarantee the independency of the Board of Commissioners in overseeing the company.

Fairness

Bakrieland implements the principles of fairness in fulfilling stakeholders' rights arising under the agreement and applicable laws and regulations. The company also consistently ensures equal treatment of the public, capital market authorities, communities, and stakeholders. A good relation with employees is maintained by being heedful of their rights and obligations in a reasonable and equal manner.

To ensure that GCG principles are implemented in all of Bakrieland's business aspects, it requires the active role and full support of the Board of Commissioners and Board of Directors. This is assured through the following measures:

- Execution of duties and responsibilities by the Board of Commissioners and Directors.
- Comprehensiveness and implementation of duties conferred to committees and working units fulfilling the internal corporate control function.
- Implementation of the compliance functions and risk management process.
- Corporate strategic plan based on the Corporate Work Plan and Budget.
- Transparency of information, including the company's financial condition.

Code of Good Corporate Governance Implementation

As a manifestation of the company-wide joint commitment to apply GCG principles, Bakrieland has drawn up its Code of GCG Implementation since as early as October 2007. It functions as the foundation for Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors for shaping policies that guide company business practices by strictly complying with applicable laws and regulations and upholding ethical values. Bakrieland's Corporate Governance Implementation Guidelines cover various aspects, including Corporate Governance policies, governance guidelines for company organs, principles and goals, company management structure and transparency policies.

Road Map GCG

Roadmap GCG dirumuskan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan jangka panjang Perusahaan dan sebagai sarana untuk memantau perkembangan praktik GCG saat ini dan masa datang. Bakrieland merumuskan *Road Map* GCG dengan periode rencana implementasi dimulai sejak tahun 2008.

GCG Road Map

The GCG Road Map was drawn up as a guideline for implementing the company's long-term strategy and as an instrument for monitoring progress for ongoing and future GCG practices. Bakrieland has drawn up the GCG Road Map for the implementation period which commenced in 2008.



Roadmap GCG Bakrieland dirumuskan selaras dengan "Big Bang Bakrieland 2020" agar tema dan program yang dijalankan mendukung percepatan pencapaian visi Bakrieland. *Roadmap* GCG dibagi menjadi 3 (tiga) periode waktu, yaitu:

1. 2008 – 2013 dengan tema Penguatan Struktur dan Proses GCG.
2. 2014 – 2016 dengan tema Penguatan Implementasi GCG.
3. 2017 – 2020 dengan tema Dikenal sebagai Perusahaan dengan GCG 'Sangat Terpercaya' bagi *Stakeholders*.

Bakrieland's GCG Road Map is consistent with "Big Bang Bakrieland 2020" to ensure that themes and programs being implemented support the attainment of Bakrieland's vision and mission statement. The GCG Road Map is divided into 3 (three) timeframes:

1. 2008 – 2013 on the theme of Strengthening GCG Structure and Process.
2. 2014 – 2016 on the theme of Strengthening GCG Implementation.
3. 2017 – 2020 on the theme of the company with the 'Most Trusted' GCG for Stakeholders.

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Setiap periode dilaksanakan sesuai dengan rencana program yang telah disusun. Setiap tahun akan dilakukan penilaian untuk mengetahui pencapaian implementasi GCG di Bakrieland dan penyempurnaan apa saja yang perlu dilakukan.

Evaluasi dan Rekomendasi atas Implementasi GCG tahun 2013

Guna memperoleh penilaian yang obyektif, Bakrieland dinilai oleh pihak independen untuk melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan GCG dalam perspektif pengetahuan, di dalam perusahaan. Evaluasi dilakukan untuk menilai bagaimana perusahaan memperoleh pengetahuan dan memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan berlandaskan prinsip-prinsip GCG, berpartisipasi dalam menciptakan bisnis yang beretika, dan menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip GCG. Penilaian dilakukan terhadap 11 (sebelas) aspek, yaitu Komitmen, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Keadilan, Kompetensi, Kepemimpinan, Strategi, Etika, Manajemen Pengetahuan. Untuk tahun 2013, temuan-temuan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Pengetahuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan
Bakrieland telah melakukan pemutakhiran dokumen terkait kebijakan, sistem, *manual*, dan program pelaksanaan serta pemantauan terhadap penerapan GCG dan etika bisnis melalui pemanfaatan pengetahuan.
2. Perumusan Strategi dan Kebijakan
Bakrieland merumuskan dan menetapkan strategi dan kebijakan yang selaras dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, meliputi pengembangan kompetensi Perusahaan dan individu, serta peningkatan kualitas penerapan GCG.
3. Pemastian dan Evaluasi
Bakrieland menetapkan indikator kinerja dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi dan kebijakan yang selaras Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dimana indikator kinerja dan program evaluasi yang dilakukan mengenai pengembangan kompetensi perusahaan dan individu, serta peningkatan kualitas penerapan GCG.

The implementation of each time period will conform to the program plan. An assessment will be performed on an annual basis to keep track of progress in GCG implementation at Bakrieland, and making the necessary improvements.

Evaluation and Recommendation on the Implementation of GCG in 2013

To obtain an objective evaluation, Bakrieland was assessed by an independent party on the effectiveness of GCG implementation in perspective knowledge, in the company. The evaluation was done to assess how the company gets knowledge and uses the knowledge and experiences to improve the quality of the company's management based on the GCG principals, participated in creating business ethics, created additional value continuously based on GCG principals. The assessment was done on 11 (eleven) aspects, they are Commitment, Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, Competency, Leadership, Strategy, Ethics, Knowledge Management. For 2013, the results were:

1. Knowledge Utilization to improve the quality of the corporate governance
Bakrieland has updated the documents related to policies, systems, manuals and the implementation program while also monitoring the GCG implementation and business ethics through the knowledge utilization.
2. Strategy and Policy Formulation
Bakrieland formulates and sets the strategy and policy that is consistent with the Corporate Work Plan and Budget in both the short and long term, which covers the improvement of the company and individual's competency, and also the improvement of GCG implementation's quality.
3. Ascertainment and Evaluation
Bakrieland sets the performance indicator and evaluates the strategy and policy's implementation that is consistent with the Corporate Work Plan and Budget in both the short and long term, where the work indicator and evaluation program were done for the company and individual's competency improvement, and also improving the quality of GCG implementation.

4. Pemanfaatan Pengetahuan untuk mendorong etika bisnis. Bakrieland mengembangkan strategi, program, kegiatan, dan pelaporan hasil program yang terkait dengan perilaku dan praktik bisnis yang beretika dan memenuhi tanggung jawab Perusahaan kepada *stakeholder* melalui pemanfaatan pengetahuan. Dengan melakukan program tersebut, Perusahaan dapat mengurangi dampak negatif yang dapat diterima oleh *stakeholders* dan meningkatkan kualitas integritas organ dan anggota Perusahaan.

Peraturan Perusahaan

Hak dan kewajiban karyawan Bakrieland tercantum pada Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan bertujuan membina hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam usaha meningkatkan efisiensi, produktivitas dan prestasi kerja yang optimal. Peraturan Perusahaan Bakrieland untuk periode tahun 2013- 2015 telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.496/PHIJSK-PKKAD/PP/VI/2013 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bakrieland Development Tbk.

Pedoman Dewan

Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi Bakrieland berpedoman kepada petunjuk tata laksana kerja yang dituangkan dalam Pedoman Dewan. Pedoman Dewan menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten.

Pedoman Dewan disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan pemegang saham, serta praktik-praktik terbaik GCG. Pelaksanaan Pedoman Dewan merupakan salah satu bentuk komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG, sekaligus sebagai penjabaran lebih lanjut dari Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang telah dimiliki Bakrieland.

Pedoman Dewan Bakrieland pertama kali disahkan pada tanggal 31 Juli 2009 melalui Kesepakatan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penerapan Pedoman Dewan. Karena sifatnya yang dinamis dan berkembang, pedoman ini telah disempurnakan pada akhir tahun 2011.

4. Knowledge Utilization to push business ethics. Bakrieland improved strategy, programs, activities, and reports the program's results that relates to the behavior and ethical business practices and fulfills the company's responsibility to the stakeholders through knowledge utilization. By doing this program, the company can reduce the negative effects received by the stakeholders and improve the quality of each organ's integrity and of the company's members.

Company Regulations

Bakrieland employees' rights and obligations stated in the Company Regulations. It is aimed at fostering harmonious, synchronized and well-balanced relations in order to optimally boost work efficiency, productivity and performance. Bakrieland's Company Regulations for the period of 2013 – 2015 were ratified through the Directorate General Decree on Industrial Relations and Worker Social Security Development No.KEP.496/PHIJSK-PKKAD/PP/VI/2013 concerning Ratification of PT Bakrieland Development, Tbk Company Regulations.

Board Manual

In the discharging of duties in order to attain the company vision and mission, Bakrieland's Board of Commissioners and Board of Directors refer to work guidelines set forth in the Board Manual. The Board Manual spells out all activities in a structured, systematic and comprehensible manner to ensure consistent implementation.

The Board Manual builds on the principles of corporate law, provisions in Articles of Associations, prevailing laws and regulations, shareholder directions and GCG best practices. Implementation of the Board Manual demonstrates the commitment pledged by the BOC and BOD to apply GCG principles, and provides further elucidation on the Code of GCG Implementation which Bakrieland abides by.

Bakrieland's Board Manual was originally approved on 31st July 2009 through the Joint Agreement of the Board of Directors and Board of Commissioners on Board Manual Implementation. Due to its dynamic nature, the manual was fine-tuned at the end of 2011.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Pedoman Dewan disusun dengan tujuan :

1. Menjadi rujukan/ pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ.
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ.
3. Semakin memperjelas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi maupun hubungan kerja diantara keduanya.
4. Semakin memudahkan bagi organ Dewan Komisaris dan Direksi untuk memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
5. Menerapkan asas-asas GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Etika Perusahaan

Etika Perusahaan yang berlaku di Bakrieland dituangkan dalam Pedoman Perilaku Bakrieland. Pelaksanaan Etika Perusahaan yang berkesinambungan diharapkan dapat membentuk budaya Perusahaan yang mengandung nilai-nilai Perusahaan.

Pedoman Perilaku

Pengesahan dan Sosialisasi

Pengesahan dan Sosialisasi Pedoman Perilaku Bakrieland telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 047/SK-Dir/IV/07. Seluruh manajemen dan karyawan wajib memahami Pedoman Perilaku ini sebagai dasar penerapan perilaku yang mengatur hubungan antara karyawan dengan Perusahaan, sesama karyawan, konsumen, pemasok, pemegang saham, pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat. Sosialisasi Pedoman Perilaku dilakukan antara lain dengan mewajibkan seluruh manajemen dan karyawan untuk menandatangani Surat Pernyataan Ketaatan terhadap Pedoman Perilaku tersebut setiap tahun sekali. Surat Pernyataan tersebut merupakan bukti komitmen karyawan dan akan disimpan di *personnel file* yang bersangkutan. Penandatanganan tersebut juga sebagai bukti komitmen Perusahaan bahwa Pedoman Perilaku berlaku untuk karyawan di seluruh level organisasi di induk Perusahaan dan unit usaha, sampai dengan karyawan yang bersangkutan berhenti bekerja dari Perusahaan.

Pedoman Perilaku diharapkan mampu menjadi pedoman dan pengarah perilaku karyawan dalam pencapaian visi misi Perusahaan, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dan budaya Perusahaan. Di dalam Pedoman Perilaku juga diatur mengenai sanksi tindakan penyimpangan dan mekanismenya.

The Board Manual serves the following objectives:

1. To provide reference/guidance on the main duties and functions of each organ.
2. To improve the quality and effectiveness of inter-organ work relations.
3. To further define the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the work relations between them.
4. To make it easier for the Board of Commissioners and Board of Directors to understand their respective duties and responsibilities.
5. To consistently apply the principles of GCG that cover transparency, accountability, responsibility, independency and fairness.

Company Ethics

Company Ethics that Bakrieland abides by are incorporated in the Code of Conduct. Consistency in adhering to company ethics will help build a corporate culture which is a manifestation of the company's core values.

Code of Conduct

Enactment and Socialization

Bakrieland's Code of Conduct was enacted through Board of Directors Directive No. 047/SK-Dir/IV/07. All management and employees are required to understand this Code of Conduct as the basis of behavior that guides all manners of conduct and relations between employees and the company, among employees, with consumers, suppliers, shareholders, stakeholders, government, and the public at large. Among the activities of Code of Conduct socialization is a requirement that all management and employees must sign the Statement of Compliance to the Code of Conduct once a year. This Statement is the employee's commitment and will be kept in their personnel file. The signing is a demonstration of the company's commitment that the Code of Conduct applies to all levels of employees both in the parent company or business unit, until such time the employee ceases working for the company.

The Code of Conduct is expected to be the guide and direction of all employees' attitudes in achieving the company's vision and mission, which contains the corporate values and culture. The Code of Conduct also regulates about sanctions and the mechanism of the violation act.

Penanganan Penyimpangan atas Pedoman Perilaku

Penyampaian terhadap penyimpangan atas Pedoman Perilaku dapat dilakukan melalui mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP). Penanganan terhadap tindak penyimpangan Pedoman Perilaku dilakukan melalui penyelidikan yang mendalam dan didasari fakta-fakta, sedangkan keputusannya dibuat dan diberikan berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat kesengajaan dan motif tindakan.

Melalui pertimbangan yang cermat dan obyektif, Komite Sumber Daya Manusia memutuskan jenis sanksi yang disesuaikan dengan bobot penyimpangan dan hirarki organisasi (pangkat atau jabatan karyawan). Sanksi kepada karyawan dapat berbentuk teguran lisan, surat peringatan (I, II, III), tidak diberikan kenaikan gaji, pangkat atau bonus, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Khusus untuk pemutusan hubungan kerja, setelah mendapatkan persetujuan Direksi, dilanjutkan dengan pengajuan permohonan ijin kepada Departemen Tenaga Kerja sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) merupakan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan di Bakrieland. SPP memfasilitasi semua pihak baik pimpinan, karyawan, maupun pihak luar yang terkait dengan Perusahaan untuk melakukan pelaporan pelanggaran. Yang disebut Pelanggaran yang meliputi penyimpangan atas etika bisnis, etika kerja, kebijakan Perusahaan, peraturan perundangan yang berlaku, anggaran dasar Perusahaan, perjanjian kontrak Perusahaan dengan pihak luar, rahasia Perusahaan, atau perbuatan lainnya yang dapat merugikan Perusahaan maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan Perusahaan. Pelaporan ditujukan kepada pimpinan Perusahaan atau kelembagaan lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Bakrieland telah mulai menerapkan SPP sejak tahun 2009.

Tujuan SPP

1. Menciptakan suasana yang kondusif yang mendorong terjadinya pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial bagi Perusahaan, termasuk yang dapat merusak citra Perusahaan.
2. Memberikan kemudahan kepada manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran

Managing Breaches of the Code of Conduct

Reports of any breach of the Code of Conduct can be performed through the Whistleblowing System (WBS) mechanism. Any breach of the Code of Conduct is handled through a factbased and thorough investigation, and resulting decisions are made and imposed by taking into account the attendant consequences of such a breach, the degree of deliberateness and motive of misconduct.

Through meticulous and objective deliberations, the Human Resource Committee will decide on the form of sanction which is commensurate with the gravity of misconduct and organizational hierarchy (job rank or position of the employee in question). Sanctions imposed on an employee may take the form of a verbal warning; warning letter (I, II, III); no salary increase, promotion or bonus; and/or employment termination. Specifically for work severance, prior approval must be obtained from the Board of Directors before soliciting the permission of the Ministry of Manpower in accordance with the Manpower Law of the Republic of Indonesia.

Whistleblowing System

The Whistleblowing System (WBS) is an effort to enhance the quality of corporate governance in Bakrieland. WBS provides all parties – executives, employees and external parties related to the Company – with the appropriate avenue to lodge a report on any misconduct. Offenses cover any form of breach of business ethics, work ethics, Company policies, existing laws and regulations, Company Articles of Association, contract agreements between the Company and external parties, Company confidential information, or other actions committed by a Company employee or executive that may be detrimental to the Company or stakeholders. The report must be addressed to a Company executive or other institution authorized to act upon the reported offense. WBS has been implemented in Bakrieland since 2009.

WBS Objectives

1. To cultivate an environment conducive to the reporting of any conduct or action that may cause financial or non-financial losses to the company, including actions that may tarnish the company's reputation.
2. To facilitate management in effectively handling reports on offenses and providing protection to whistleblowers

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

dan memberikan perlindungan keamanan pelapor dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor serta pihak yang membantu menginformasikan hal tersebut.

3. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal.
4. Mengurangi kerugian Perusahaan melalui deteksi dini.
5. Meningkatkan reputasi Perusahaan.

Sosialisasi SPP

Komitmen Direksi Bakrieland untuk mendukung pelaksanaan SPP ditunjukkan dalam SK Direksi Bakrieland No.118/SK/Dir-BLD/VIII/09 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Khusus Pelaporan Pelanggaran (TKPP). TKPP beranggotakan Kepala Direktorat CHC, Audit Internal, Corporate Legal, dan Sekretaris Perusahaan. TKPP bertindak sebagai Administrator SPP dan bertugas menangani berbagai keluhan/laporan mengenai penyimpangan dan kecurangan terkait Etika Bisnis, Pedoman Perilaku, Peraturan Perusahaan, Kepatuhan Hukum, Anggaran Dasar, Perjanjian/Kontrak, Kerahasiaan Perusahaan, Kebijakan Tentang Transaksi Benturan Kepentingan, dan kejadian penting lainnya yang relevan.

Sosialisasi SPP di tingkat internal disampaikan melalui *newsletter* dan presentasi yang diberikan oleh TKPP kepada para karyawan, sementara di tingkat eksternal melalui pengumuman. Selain itu, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta seluruh karyawan Perusahaan telah menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap pelaksanaan SPP.

Mekanisme SPP

Pelapor menyampaikan laporan dalam bentuk surat dengan disertai dokumen pendukung yang diperlukan. Laporan ini ditujukan kepada TKPP dan disampaikan melalui salah satu diantara cara berikut:

1. Surat ke TKPP di Wisma Bakrie 1, Lantai 6
2. Email: whistleblowing@bakrieland.com
3. PO BOX BAKRIELAND JKTM 12700

Jika dokumen telah lengkap, TKPP melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Pada saat yang bersamaan, TKPP juga melakukan investigasi terhadap pihak-pihak terlapor. Laporan yang tidak terbukti akan

by keeping whistleblowers' identity confidential and also those of the parties involved in the disclosure.

3. To develop the appropriate policies and infrastructure to protect whistleblowers against reprisals from internal or external parties.
4. To minimize company losses through early detection.
5. To bolster the company's reputation.

Socialization of WBS

It has been the firm commitment of Bakrieland Board of Directors to support WBS implementation as demonstrated in the issuance of Bakrieland BOD Directive No.118/SK/Dir-BLD/VIII/09 on the establishment and appointment of a Special Team for Whistleblower Reporting. The special team members consist of the Division Head of Corporate Human Capital, Corporate Internal Audit, Corporate Legal, and Corporate Secretary. The special team on whistleblower functions as the WBS administrator and is responsible for dealing with complaints/reports on offenses and misconduct against Business Ethics, Code of Conduct, Company Regulations, Regulatory Compliance, Articles of Association, Agreement/Contract, Company Confidential Information, Policies on Conflict of Interest Transactions and other relevant significant events.

Socialization of WBS is present through internal newsletters and presentations delivered by the special team on whistleblower acts to all employees, while WBS is also externally communicated through announcements. In addition, BOD and BOC members, and all employees are obligated to sign a letter of statement in support of WBS implementation.

Whistleblowing Mechanism

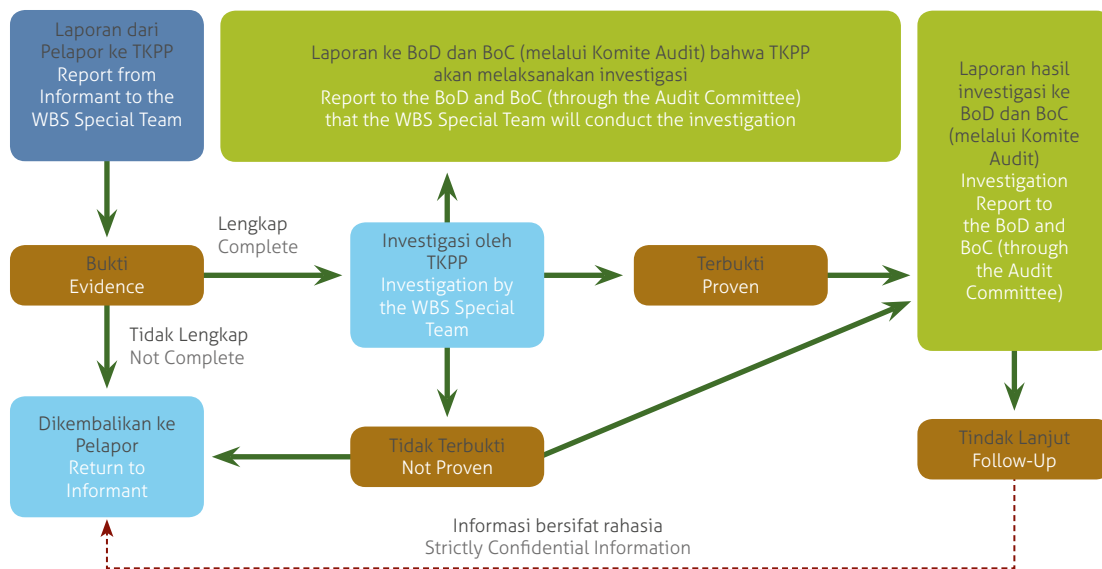
The informant submits a report in the form of a letter with supporting documents to the WBS Special Team, which can be done through one of the approaches below:

1. Letter to WBS Special Team at Wisma Bakrie 1, 6th Floor
2. Email: whistleblowing@bakrieland.com
3. PO BOX BAKRIELAND JKTM 12700

The WBS Special Team will report to the Boards of Directors and Commissioners through the Audit Committee when all necessary documents are complete. The Team also concurrently mounts an investigation surrounding the alleged

dikembalikan kepada pelapor. Namun apabila terbukti, TKPP akan melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Komite Audit untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Laporan yang berkaitan dengan TKPP disampaikan dalam bentuk surat dan ditujukan kepada Direktur Utama, sedangkan laporan-laporan yang berkaitan dengan Direktur Utama ditujukan kepada Komisaris Utama.

offence/offender(s). Reports of allegations that remain unproven shall be returned to the informant. When a report is verified, however, the team shall inform its findings to the Audit Committee for follow-up by the Board of Commissioners and Directors. Any report relating to the WBS Special Team on the whistleblower shall be presented in letter format addressed to the President Director, while reports relating to the President Director shall be addressed to the President Commissioner.



Perlindungan Terhadap Pelapor

Bakrieland menyediakan fasilitas saluran pelaporan P.O. Box (surat, email) yang independen, bebas, dan rahasia bagi pelapor, agar terlaksana proses pelaporan yang aman. Selain itu, SPP juga menjaga kerahasiaan identitas pelapor dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pelapor dan anggota keluarga atas tindakan balasan dari telapor atau organisasi. Informasi pelaksanaan tindak lanjut laporan akan disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang identitasnya lengkap.

Sementara itu pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/ atau fitnah tidak diberikan perlindungan. Pelapor yang memberikan laporan palsu dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, misalnya KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal perusahaan.

Insentif bagi Pelapor

Pelaksanaan SPP menuntut perubahan dari “budaya diam” menjadi “budaya kejujuran dan keterbukaan.” Oleh karena

Whistleblower Protection

To support the implementation of a safe reporting system, Bakrieland provides independent, free and confidential reporting channels (telephone, letters, and emails) for informants. In addition, the WBS also assures the confidentiality of the informant’s identity and protects the informant and his/her family members from an act of reprisal against the alleged offender or organization. Information on follow-up measures will be confidentially conveyed to an informant with full knowledge of his or her identity. Whistleblowers who have lodged false and/or defamatory reports will not be eligible for protection, but instead are liable to be sanctioned in accordance with existing laws and regulations, such as Articles 310 and 311 of the Criminal Code or company internal regulations.

Incentive for Whistleblowers

To accelerate the shift from a ‘silent culture’ to that of an ‘honest and open culture’. Bakrieland shall offer incentives

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

itu, Bakrieland memberikan insentif berupa penghargaan bagi pelapor dalam bentuk material atau piagam, dengan perhitungan sebesar dua per seribu (dua permil) dari kerugian Perusahaan yang berhasil dikembalikan.

Implementasi SPP di Tahun 2013

Selama tahun 2013 TKPP tidak menerima laporan atas penyimpangan apapun di Bakrieland.

Rencana SPP di Tahun 2014

Pada tahun 2013, TKPP bersama Direksi dan Komite Kebijakan Corporate Governance melakukan pembahasan implementasi Sistem Pelaporan Pelanggaran di Bakrieland. Atas hasil pembahasan tersebut, tahun 2014 direncanakan untuk dilakukan review atas Sistem Pelaporan Pelanggaran sehingga implementasinya dapat berjalan lebih efektif.

Sistem Manajemen Mutu

Pada tahun 2013 dilakukan 2 (dua) kali audit *surveillance* terhadap implementasi Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2008) di Bakrieland. Proses audit dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi SGS Indonesia pada tanggal 25 Februari dan 23 September 2013. Dari hasil audit tersebut, Bakrieland berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2008 tanpa adanya temuan yang bersifat minor maupun major.

Lima kriteria utama standar ISO 9001:2008 adalah sistem manajemen mutu, tanggung jawab manajemen, manajemen sumber daya, realisasi produk & layanan, dan pengukuran, analisa & perbaikan. Keberhasilan Bakrieland mempertahankan sertifikasi tersebut menunjukkan komitmen Bakrieland dalam memastikan perusahaan menjadi organisasi yang berorientasi memberikan kepuasan pada pelanggan dengan pelayanan yang bermutu.

to an informant in material form or a certificate of merit, which shall amount to two thousandths (2/1000's) of averted company losses.

WBS Implementation in 2013

Throughout 2013, the WBS Special Team did not receive any report on any form of misconduct in Bakrieland.

Plans for 2014

In 2013, the WBS Special Team together with the Board of Directors and Corporate Governance Policy Committee has engaged in discussions on the implementation of the Offense Reporting System in Bakrieland. From the discussion it was agreed that in 2014 a review will be conducted and the necessary changes made to the Whistleblowing System in order to ensure that it is implemented more effectively.

Quality Management System

In 2013, 2 (two) *surveillance* audits were performed on the implementation of the Quality Management System (ISO 9001:2008) in Bakrieland. The audit process was carried out by the Indonesia SGS Certification Board on 25th February and 23rd September 2013. Based on audit results, Bakrieland succeeded in maintaining its ISO 9001:2008 certification without any minor or major findings.

The five main criteria for meeting the ISO 9001:2008 standard refers to the quality management system, management responsibility, resource management, product and service realization, and measurement, analysis and improvement. Bakrieland's ability to maintain its ISO certification demonstrates its commitment to ensure that the company is oriented towards customer satisfaction by offering first-rate services.

Implementasi Sistem Manajemen Mutu | Quality Management System Implementation

Aktivitas Activity	Keterangan Remarks
<p>Audit Eksternal Surveillance Audit oleh SGS Indonesia telah dilaksanakan dan Bakrieland berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2008.</p> <p>External Audit Surveillance Audit by SGS Indonesia has been conducted and Bakrieland successfully maintained the ISO 9001:2008 certification</p>	<p>Surveillance Audit adalah proses audit mutu yang dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi SGS Indonesia untuk melihat efektivitas dari implementasi Sistem Manajemen Mutu di Bakrieland.</p>
<p>Audit Mutu Internal (AMI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMI Periode ke 1 tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 17 Januari 2013 - AMI Periode ke 2 tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 26 Juli 2013 <p>Internal Quality Audit (AMI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMI period 1 in 2013 was conducted on 25-26 February 2013 - AMI period 2 in 2013 was conducted from 22nd to 26th July, 2013 	<p>Audit Mutu Internal dilaksanakan untuk melihat efektivitas dari implementasi Sistem Manajemen Mutu dan juga merupakan persiapan menghadapi Surveillance Audit. Proses audit dilakukan dengan cara silang antar divisi dimana auditor berasal dari beberapa divisi. Hal tersebut selain untuk menjaga independensi dari AMI, juga untuk menambah sudut pandang dari proses audit itu sendiri.</p> <p>Internal quality audit is conducted to assess the effectiveness in the implementation of the Quality Management System as well as preparation for Surveillance Audit. The process of audit is conducted through cross-divisions in which the auditor consists of members from several divisions in order to ensure AMI independency as well as to increase the viewpoint of the audit process itself.</p>
<p>Tinjauan Manajemen Rapat Tinjauan Manajemen telah dilaksanakan pada bulan 13 Februari dan 12 September 2013.</p> <p>Management Review Management Review meetings were held on 13th February and 12th September, 2013.</p>	<p>Tinjauan Manajemen merupakan sarana komunikasi internal antara Direktur dengan manajemen senior untuk membahas permasalahan strategis terkait implementasi ISO 9001:2008.</p> <p>Management Review is an internal communication facility between top Director and senior management to discuss strategic problems related with the ISO 9001:2008 implementation.</p>
<p>Pelatihan Auditor Telah dilakukan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi auditor internal ISO 9001:2008 pada tanggal 10 dan 11 Juli 2013 yang diikuti oleh 15 (lima belas) orang karyawan Bakrieland.</p> <p>Auditor Training Training was done to acquire certification of auditor internal ISO 9001:2008 on 10th - 11th July, 2013 which was followed by 15 (fifteen) Bakrieland employees.</p>	<p>Salah satu persyaratan dari AMI adalah pihak auditor harus merupakan karyawan yang telah mendapatkan pelatihan dan bersertifikat Internal Quality Auditor.</p> <p>One of the requirements from AMI is that the auditor has to be an employee that has joined the training and has an Internal Quality Auditor certificate</p>

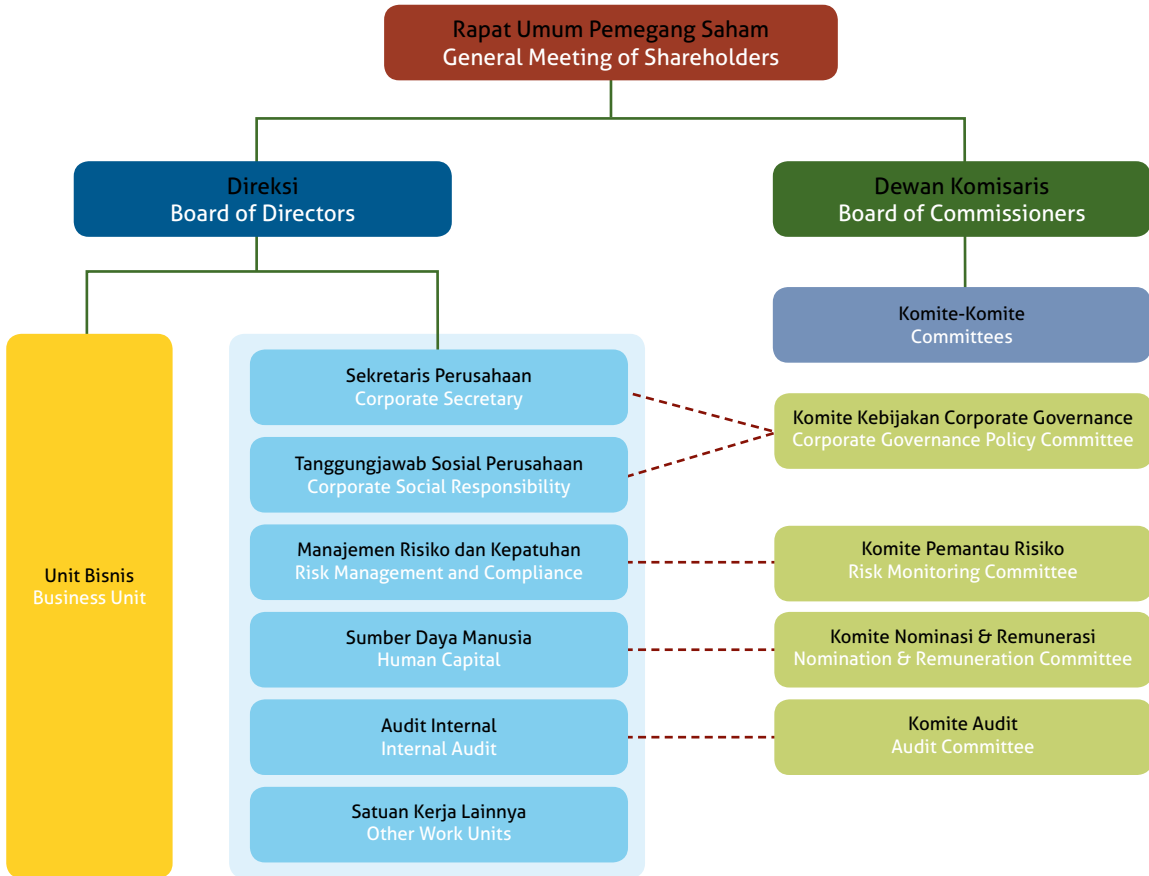
Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur tata kelola Bakrieland terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite yang membantu Dewan Komisaris, serta satuan kerja yang membantu Direksi.

Corporate Governance Structure

Bakrieland's governance structure encompasses the General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, and committees assisting the Board of Commissioners and working units aiding the Board of Directors.

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perusahaan yang memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Selama tahun 2013, Bakrieland menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 28 Juni 2013. Pada penyelenggaraan RUPST tahun 2013, Bakrieland telah mempublikasikan Surat Pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPST pada tanggal 29 Mei 2013 di Harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily. Surat Panggilan dan agenda RUPST dipublikasikan pada tanggal 13 Juni 2013 di harian yang sama. Pemegang saham yang akan menghadiri RUPST dapat meminta agenda rapat, surat kuasa dan Laporan Tahunan kepada Sekretaris Perusahaan Bakrieland sebelum RUPST berlangsung. Pengumuman Hasil Keputusan RUPST

General Meeting of Shareholders (GMS)

The GMS is the company organ vested with the highest level of authority. The GMS is authorized to appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Directors, evaluate the performance of the Board of Commissioners and Directors, approve amendments to the Articles of Association, approve annual reports and determine the type and amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors.

In 2013, Bakrieland held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on 28th June, 2013. During this AGMS, Bakrieland notified in writing on the holding of the AGMS on 29th May, 2013 which was published in the Bisnis Indonesia newspaper and Investor Daily. The invitation letter and AGMS agenda was published on 13th June, 2013 in the same newspapers. Shareholders participating in the AGMS may request the meeting agenda, power of attorney and annual report from Bakrieland's Corporate Secretary prior to the AGMS. Resolutions reached during AGMS 2013 were

2013 dipublikasikan pada tanggal 2 Juli 2013 di harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily.

announced on 2nd July, 2013 in the Bisnis Indonesia and Investor Daily newspapers.

Ikhtisar hasil keputusan RUPS Tahunan Bakrieland 2013 adalah sebagai berikut :

Highlights on Bakrieland's Annual GMS resolutions are as follows:

RUPS GMS	Agenda	Hasil Keputusan Result of the Decision	Realisasi Realization
RUPST 28 Juni 2013 AGMS 28th June, 2013	<p>Agenda Pertama dan Kedua</p> <p>1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.</p> <p>2. Persetujuan dan pengesahan atas Neraca dan perhitungan Laba/ Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.</p> <p>First and Second Agenda</p> <p>1. Approval of BOD Accountability Report on the company's operations for fiscal year ending 31 December 2012.</p> <p>2. Approval and validation of Company Balance Sheet and Profit- Loss Statement for the fiscal year ending 31st December, 2012.</p>	<p>Agenda Pertama dan Kedua</p> <p>Memberikan persetujuan atas Laporan pertanggung jawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal yang sama berikut pemberian pembebasan tanggung jawab serta pelunasan kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.</p> <p>First and Second Agenda</p> <p>Approve operationsBOD Accountability Report on company's for accounting year ended on 31st December, 2012 and the Board of Commissioners Monitoring Report and also validation of the Balance Sheet of the company's Profits and Loss for the accounting year ended on the same date as well as granting a disclaimer and repayment to the Directors for the acts of management and to the Board of Commissioners for the acts of monitoring which were completed in the fiscal year ending 31st December, 2012.</p>	<p>Agenda Pertama dan Kedua</p> <p>Sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrieland Development Tbk Nomor : 5 tanggal 28 Juni 2013 dari Kantor Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., rapat telah menyetujui keputusan agenda pertama dan kedua yaitu laporan pertanggung jawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal yang sama berikut pemberian pembebasan tanggung jawab serta pelunasan kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.</p> <p>First and Second Agenda</p> <p>As the Deed of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bakrieland Development Tbk Number: 528th June, 2013 from notary office Liestiani Wang, S.H., M.Kn., the meeting has approved the first and second agenda decision that is the Accountability Report of the BOD on the operations of the Company for the fiscal year ending 31st December, 2012 and the Monitoring Report of the company's Board of Commissioners and also the validation on the Balance Sheet of the company's Profits and Loss forfiscal year ending on the same date as well as granting disclaimer and repayment to BOD for the acts of management and to the Board of Commissioners for the acts of monitoring which were completed in the fiscal year ending on 31st December, 2012.</p>

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

RUPS GMS	Agenda	Hasil Keputusan Result of the Decision	Realisasi Realization
	<p>Agenda Ketiga Peretujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2013.</p> <p>Third Agenda Approval for appointment of an Independent Public Accountant Firm (Kantor Akuntan Publik Independen) to audit the company books for accounting year 2013</p>	<p>Agenda Ketiga Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap buku Perseroan untuk tahun buku 2013 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2013, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan-persyaratannya.</p> <p>Third Agenda Approval on granting authority to the company's Board of Commissioner for appointment of an Independent Public Accountant Firm that will audit the company records for the fiscal year 2013 and other periods in the fiscal year 2013, and also set honorarium of the Public Accountant and its requirements.</p>	<p>Agenda Ketiga Dewan Komisaris menyetujui penunjukan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahyo & Rekan (KNTR) untuk dapat mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dengan fee yang diajukan berdasarkan rekomendasi Komite Audit PT Bakrieland Development Tbk, sesuai surat Perseroan tertanggal 25 September 2013 perihal Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013.</p> <p>Third Agenda The Board of Commissioners has approved the appointment of KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahyo & Partner (KNTR) to audit the financial consolidation. The company for the year ended on 31st December, 2012 with the proposed fee submitted based on the recommendation of Audit Committee of PT Bakrieland Development Tbk, as the company letter dated 25th September, 2013 about the recommendation of appointment of the Public Accountant Firm to Audit the year that ended on 31st December, 2013.</p>
	<p>Agenda Keempat Persetujuan perubahan susunan Pengurus.</p>	<p>Agenda Keempat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Pengunduran diri Bapak Feb Sumandar dan Bapak Azrul Azwar Bin Ab Latif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. 2. Menyetujui Pengangkatan Bapak Agus Jayadi Alwie dan Bapak Charles Marc Dressler sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk periode 2013-2015. 3. Menyetujui Pengunduran diri Bapak Amir Abdul Rachman sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. <p>Sehingga selanjutnya susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Bambang Irawan Hendradi Komisaris : Supartono Komisaris : Armansyah Yamin Komisaris Independen : Lukman Purnomosidi Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja</p> <p>Direksi Presiden Direktur & Chief Executive Officer: Ambono Janurianto Direktur & Chief Development Officer: Agus Jayadi Alwie Direktur & Chief Services Officer: Charles Marc Dressler</p>	<p>Agenda Keempat Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bakrieland Development Tbk Nomor : 6 tanggal 28 Juni 2013 dari Kantor Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., susunan pengurus Perseroan sebagai berikut :</p> <p>Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Bambang Irawan Hendradi Komisaris : Supartono Komisaris : Armansyah Yamin Komisaris Independen : Lukman Purnomosidi Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja</p> <p>Direksi Presiden Direktur & Chief Executive Officer: Ambono Janurianto Direktur & Chief Development Officer: Agus Jayadi Alwie Direktur & Chief Services Officer: Charles Marc Dressler</p>

RUPS GMS	Agenda	Hasil Keputusan Result of the Decision	Realisasi Realization
	<p>Fourth Agenda Approval on the change of the Management Composition</p>	<p>Fourth Agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approve the resignation of Mr. Feb Sumandar and Mr. Azrul Azwar Bin Ab Latif starting from the closing of this meeting. 2. Approve the appointment of Mr. Agus Jayadi Alwie and Mr. Charles Marc Dressler as members of the company's BOD starting from the closing of this meeting for the period 2013-2015. 3. Approve the resignation of Mr. Amir Abdul Rachman as member of the company's Board of Commissioners starting from the closing of this meeting. <p>The compositions of the company board are as follows:</p> <p>Board of Commissioners President Commissioner : Bambang Irawan Hendradi Commissioner : Supartono Commissioner : Armansyah Yamin Independent Commissioner : Lukman Purnomosidi Independent Commissioner: Kanaka Puradiredja</p> <p>Directors Presiden Director & Chief Executive Officer: Ambono Janurianto Director & Chief Development Officer: Agus Jayadi Alwie Director & Chief Services Officer: Charles Marc Dressler</p>	<p>As the Deed of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bakrieland Development Tbk Number: 6 dated 28th June, 2013 from Notary Office Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn, the compositions of the company board are as follow:</p> <p>Board of Commissioners President Commissioner : Bambang Irawan Hendradi Commissioner : Supartono Commissioner : Armansyah Yamin Independent Commissioner: Lukman Purnomosidi Independent Commissioner: Kanaka Puradiredja</p> <p>Directors Presiden Director & Chief Executive Officer: Ambono Janurianto Director & Chief Development Officer: Agus Jayadi Alwie Director & Chief Services Officer: Charles Marc Dressler</p>
	<p>Agenda Kelima Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>Fifth Agenda Approval on granting authority to the Board of Commissioners to set remuneration/honorarium of the Directors and the Board of Commissioners</p>	<p>Agenda Kelima Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi/Honorarium Direksi dan menyetujui penetapan Remunerasi/Honorarium Dewan Komisaris. Penetapan Remunerasi/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dengan mempertimbangkan saran/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan.</p> <p>Fifth Agenda Approve the granting of authority to the Company BOC for setting BOD Remuneration / Honorarium and approve the set of Remuneration/Honorarium of BOC. Set of Remuneration/Honorarium of BOD and BOC by considering suggestions/recommendation from the company's Nomination and Remuneration Committee.</p>	<p>Agenda Kelima Sudah dibahas dan disetujui di tahun 2013 dengan mempertimbangkan saran dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan.</p> <p>Fifth Agenda Discussed and approved in 2013 with consideration on suggestions and recommendations from the company's Nomination and Remuneration Committee.</p>

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perusahaan. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas pengawasan dan memberikan masukan kepada anggota Direksi dengan itikad yang baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab.

Persyaratan, Keanggotaan dan Masa Jabatan

Anggota Dewan Komisaris Bakrieland secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara persyaratan material bersifat khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

Dewan Komisaris Bakrieland terdiri dari 5 (lima) anggota, yaitu: 1 (satu) Presiden Komisaris, 2 (dua) Komisaris dan 2 (dua) Komisaris Independen. Anggota Dewan Komisaris diseleksi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan diangkat melalui mekanisme RUPS, dengan periode jabatan masing-masing 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS. Jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

1. Bambang Irawan Hendradi (Presiden Komisaris)
2. Supartono (Komisaris)
3. Armansyah Yamin (Komisaris)
4. Lukman Purnomosidi (Komisaris Independen)
5. Kanaka Puradiredja (Komisaris Independen)

Board of Commissioners

The Board of Commissioners (BOC) is responsible for overseeing the company. Every member of the BOC has the obligation to carry out the oversight function and offer input to BOD members in good faith, as well as in a cautious and responsible manner.

Criteria, Membership and Tenure

Members of Bakrieland's Board of Commissioners in general have met all formal and material requirements. Formal criteria are general in nature and in accordance with prevailing laws and regulations, while material requirements are more specific tailored to the needs and characteristics of the company's business.

Bakrieland's Board of Commissioners comprises 5 (five) members: 1 (one) President Commissioner, 2 (two) Commissioners and 2 (two) Independent Commissioners. BOC membership is selected by the Nomination and Remuneration Committee, and appointed through the GMS mechanism, each serving a three-year term of office and eligible for re-appointment based on a GMS decision. The tenure of a BOC member shall be terminated under the following circumstances: resignation, no longer meets company criteria, deceased or dismissed based on a GMS decision.

The Board of Commissioners structure as of 31st December, 2013 is as follows:

1. Bambang Irawan Hendradi (President Commissioner)
2. Supartono (Commissioner)
3. Armansyah Yamin (Commissioner)
4. Lukman Purnomosidi (Independent Commissioner)
5. Kanaka Puradiredja (Independent Commissioner)

Periode Jabatan Dewan Komisaris

No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Terms of Office
1	Bambang Irawan Hendradi	Presiden Komisaris President Commissioner	Juni 2012 - Mei 2015
2	Supartono	Komisaris Commissioner	Juni 2012 - Mei 2015
3	Armansyah Yamin	Komisaris Commissioner	Juni 2012 - Mei 2015
4	Lukman Purnomosidi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Juni 2012 - Mei 2015
5	Kanaka Puradiredja	Komisaris Independen Independent Commissioner	Juni 2012 - Mei 2015

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban

Dewan Komisaris Bakrieland mempunyai tanggung jawab mengawasi manajemen operasional yang dilaksanakan oleh Direksi dan memberikan saran serta nasihat kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Perusahaan, peraturan serta undang-undang yang berlaku.

Dewan Komisaris berperan penting dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG sesuai fungsi pengawasan yang dilakukan. Melalui laporan Direksi dan komite-komite, Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan strategis Perusahaan, termasuk mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal.

Terkait dengan RUPS, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain memberikan pendapat dan saran mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan, melaporkan segera jika terjadi gejala penurunan kinerja Perusahaan, menganalisa dan menandatangani Laporan Tahunan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.

Sepanjang tahun 2013, Dewan Komisaris tidak menemukan pelanggaran hukum dan peraturan di sektor keuangan dan properti yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan.

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sekurang-kurangnya harus mengadakan 4 (empat) kali rapat dalam setahun. Rapat dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usahanya, atau melalui media telekonferensi, video konferensi atau media elektronik lain. Rapat dianggap sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggotanya hadir dan diwakili dalam rapat. Selama tahun 2013, Dewan Komisaris menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat.

Duties, Responsibilities and Obligations

Bakrieland Board of Commissioners bears the responsibility of overseeing operational management performed by BOD, and offering advice and recommendations to BOD according to provisions set out in the Articles of Association, company GMS resolutions, as well as existing laws and regulations.

The BOC plays a pivotal role in implementing the principles of GCG consistent with its oversight function. Through the BOD and Committee reports, the BOC monitors and evaluates the implementation of all company strategic policies, including the effectiveness of its risk management and internal control systems.

Concerning a GMS, the duties and responsibilities of the BOC among others are to offer its views and advice on the company's Annual Work Plan and Budget, immediately report on any indication of declining company performance, analyze and sign the Annual Report, and be accountable for the discharging of its duties to a GMS.

Throughout 2013, the BOC did not come across any breach of the law and regulations in the financial and property sector committed by company management.

Board of Commissioners Meetings

The BOC should meet at least 4 (four) times in a year. Meetings may be convened at the company's place of domicile or where it conducts its operations or through teleconference, video conference or other electronic media. Meetings are declared valid and binding when more than 1/2 (half) of its members are in attendance or represented by a proxy. In 2013 the BOC held 5 (five) meetings.

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Agenda Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris | Board of Commissioner's Meeting Agenda and Attendance

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance					
			IHS	LP	KP	SP	AY	AAR*
1	17 April 2013	- Pembahasan rencana agenda RUPS Tahunan - Pembahasan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2012 - Review on AGMS agenda plan - Review on Audited Financial Report as of 31st December 2012						
2	24 Juni 2013	- Rencana susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bakrieland - Persiapan RUPS Tahunan 2013 - Plan on Board of Commissioners and Board of Directors composition - Arrangement of AGMS 2013						
3	19 September 2013	Usulan perubahan susunan Komite Audit Proposal on changing composition of the Audit Committee		√		√	√	
4	28 November 2013	Pembahasan kondisi keuangan Bakrieland Discussions on the financial condition of Bakrieland						
5	18 Desember 2013	Pembahasan Rencana Bisnis 2015-2018 & Budget 2014 Discussions on 2015 – 2018 Business Plan and 2014 Budget Plan	√	√	√	√	√	

Keterangan | Note:

IHS: Bambang Irawan Hendradi, KP: Kanaka Puradiredja, LP: Lukman Purnomosidi, AY: Armansyah Yamin, SP: Supartono, AAR: Amir Abdul Rachman
* Mengundurkan diri sebagai Komisaris pada tanggal 28 Juni 2013 |

Komite

Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite sebagai pendukung dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta untuk merumuskan kebijakan Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan. Penetapan pembentukan komite-komite dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan setiap komite diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Bakrieland dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Kebijakan Corporate Governance.

Komite Audit

Anggota Komite Audit dipilih dari anggota Dewan Komisaris. Komite Audit bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan. Keanggotaan komite audit berdasarkan SE Direksi BEJ No. Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001 mengatur bahwa:

- Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
- Seorang Komisaris Independen menjadi ketua

Committee

The Board of Commissioners has formed committees to support the implementation of its duties and responsibilities, and to formulate BOC policies within the scope of work of the respective committee. Committees are established through a Board of Commissioners Directive and each committee is headed by a BOC member. Bakrieland Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Corporate Governance Policy Committee.

Audit Committee

Members of the Audit Committee are individuals partly composed of members of the BOC. The Audit Committee is responsible in overseeing the financial and disclosure reporting process. The Audit Committee membership is determined based on the circular letter of BEJ Board of Directors No. Kep-339/ BEJ/07-2001 dated 21st July, 2001 that stipulates the following:

- Audit Committee shall consist of no less than 3 (three) persons
- An independent commissioner shall be elected as chairperson

- Anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen
- Sekurang-kurangnya satu orang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan/ atau keuangan.

Komite Audit Bakrieland dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 01/SK/Kom-BLD/XII/08 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Audit. Sesuai SK tersebut, masa jabatan Komite Audit adalah sejak 23 Desember 2008 sampai dengan 23 Desember 2011. Kemudian Dewan Komisaris Bakrieland menerbitkan Surat Keputusan No. 001/SK/Kom-BLD/II/12 tentang Perpanjangan Masa Bakti Komite Audit mulai 23 Desember 2011 sampai dengan selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diselenggarakannya RUPS Tahunan 2012. Sesudah RUPS Tahunan Bakrieland yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 2012, Dewan Komisaris menerbitkan Surat Keputusan No. 07/SK/Kom-BLD/ VII/12 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Audit masa bakti kepengurusan tanggal 7 Juli 2012 – 7 Juli 2013. Setelah RUPS Tahunan Bakrieland yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2013, Dewan Komisaris menerbitkan Surat Keputusan No. 01/SK/Kom-BLD/X/13 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Komite Audit masa bakti kepengurusan tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS tahun 2015.

Tugas utama Komite Audit adalah mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas auditor eksternal.

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dengan melakukan tugas-tugas berikut:

1. Melakukan penelaahan atas laporan keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan sebelum dipublikasikan.
2. Melakukan penelaahan atas kecukupan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor internal maupun eksternal.
3. Bersama dengan Komite Pemantau Risiko, memantau efektivitas pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko Perusahaan.
4. Memantau kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk di Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.

- Other members serve as independent external parties
- At least one person is competent in the field of accounting and/or finance.

Bakrieland Audit Committee is established based on Board of Commissioners Directive No. 01/ SK/Kom-BLD/XII/08 concerning the Establishment and Appointment of the Audit Committee. In keeping with the Directive, the term of office for the Audit Committee shall commence on 23rd December 2008 and expire on 23rd December, 2011. The Bakrieland BOC later issued Directive No. 001/SK/Kom-BLD/II/12 on the Extension of Audit Committee Term of Office from 23rd December, 2011 to no later than 30 (thirty) days following the Annual GMS in 2012. Following Bakrieland's Annual GMS held on 7th June, 2012, the BOC released Directive No. 07/SK/ Kom- BLD/VII/12 on the Establishment and Appointment of the Audit Committee Term of Office dated 7th July, 2012 – 7th July, 2013. After the Bakrieland AGMS was held on 28th June, 2013, the BOC released Directive No. 01/SK/Kom-BLD/X/13 on Termination, Appointment and Ratification of the Audit Committee's Term of Office dated 1st October, 2013 to no later than 30 (thirty) days after the AGM 2015.

The main task of the Audit Committee is to promote good corporate governance, establish an adequate internal control mechanism, enhance the quality of transparency and financial reporting, independency and objectivity of the external auditor.

The Audit Committee reports to the Board of Commissioners and assists BOC in carrying out the following duties:

1. Review company financial statements before they are published.
2. Review the adequacy of the assessment process conducted by the internal and external auditor.
3. Together with the Risk Monitoring Committee, keep track of the effectiveness of the company's Risk Management System.
4. Monitor company compliance with existing laws and regulations, including in the Capital Market and other regulatory frameworks related to company activities.

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi Internal Audit.

The Audit Committee is authorized to access company records or information on employees, funds, assets and other corporate resources pertaining to the implementation of its duties. In fulfilling its duties, the Audit Committee must work together with parties responsible for the Internal Audit function.

Komite Audit Bakrieland beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota independen. Jumlah ini telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Dewan. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam berbagai peraturan yang berlaku. Sepanjang tahun 2013, Komite Audit telah melakukan 12 (dua belas) kali rapat.

Bakrieland Audit Committee consists of 3 (three) members: 1 (one) Chairman concurrently serving as an Independent Commissioner and 2 (two) independent members. This membership size meets the requirements set forth in the Board Manual. All Audit Committee members also individually fulfill membership criteria in terms of independency, expertise, experience and integrity as stipulated in various existing policies. Throughout 2013, the Audit Committee conducted 12 (twelve) meetings.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

1. Kanaka Puradiredja (Ketua/ Komisaris Independen)
2. Mohammad Hassan (Anggota)
3. Indra Safitri (Anggota)

The Audit Committee structure as of 31st December, 2013 is as follows:

1. Kanaka Puradiredja (Chairman/ Independent Commissioner)
2. Mohammad Hassan (Member)
3. Indra Safitri (Member)

Agenda Rapat dan Kehadiran Komite Audit | Audit Committee's Meeting Agenda and Attendance

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance			
			KP	MH	SN*	IS**
1	9-Jan-13	Pembahasan penyusunan agenda rapat Komite Audit Tahun 2013. Review on setting the Audit Committee's 2013 Meeting agenda	✓	✓	✓	
2	30-Jan-13	Pembahasan Implementasi PDCA Cycle Bakrieland Review on the implementation of Bakrieland PDCA Cycle	✓	✓	✓	
3	31-Jan-13	Penyusunan Laporan Komite Audit Tahun 2012 untuk Dewan Komisaris dan Laporan Tahunan 2012 Preparation on producing the Audit Committee' Report and 2012 Annual report	✓	✓	✓	
4	20-Feb-13	Pembahasan Progress Audit Laporan Keuangan Tahun 2012 Review on progress of the 2012 financial audit report	✓	✓	-	
5	26-Feb-13	Pembahasan Internal Audit Plan Tahun 2013 dan Realisasi Tahun 2012 Review on the 2013 Internal Audit Plan and 2012 Realization Report	✓	✓	✓	
6	6-Mar-13	Pembahasan Progres Audit Laporan Keuangan Tahun 2012 Review on progress of the 2012 financial audit report	✓	✓	✓	
7	28-May-13	Progres Audit Laporan Keuangan Tahun 2012 Progress of the 2012 financial audit Report	✓	✓	-	

Agenda Rapat dan Kehadiran Komite Audit | Audit Committee's Meeting Agenda and Attendance

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance			
			KP	MH	SN*	IS**
8	24-Jul-13	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Keuangan Q1 Tahun 2013 PT Bakrieland Development Tbk. Pembahasan Implementasi Audit Internal Semester 1 Tahun 2013. Pembahasan <i>Legal Issue</i>. 	√	√	√	
		<ul style="list-style-type: none"> Review on Q1 2013 Financial Report Review on the internal audit implementation of the first semester of 2013 Review Legal Issue 				
9	22-Aug-13	Pembahasan hasil Audit Internal Tahun 2013 Review 2013 Internal Audit result	√	√	√	
10	25-Sep-13	Pembahasan Laporan Keuangan Q2 Tahun 2013 & Evaluasi KAP Review Q1 2013 Financial Report and evaluation on KAP	√	√		√
11	14-Nov-13	Pembahasan Laporan Keuangan Q3 Tahun 2013 Review Q1 2013 Financial Report	√	√		√
12	26-Nov-13	Time Table Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2013 Time Table Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2013 Time Table of Audit of Financial Report as of 31st December, 2013	√	-		√
Total Kehadiran Total Attendance			12	11	7	3
Persentase Kehadiran Rapat Percentage of Meeting attendance			100%	92%	59%	25%

Keterangan | Note:

KP: Kanaka Puradiredja, **MH:** Mohammad Hassan, **SN:** Soenarso, **IS:** Indra Safitri
* Mengundurkan diri sebagai Komite Audit efektif pada tanggal 1 Oktober 2013
** Menjabat sebagai Komite Audit efektif sejak tanggal 1 Oktober 2013

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bakrieland dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris No.158/SK/Kom-BLD/ IHS/X/07 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Pemantau Risiko.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang masalah-masalah pengelolaan risiko.
2. Mengevaluasi sistem pengelolaan risiko dan pengawasan internal.
3. Menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris terkait masalah-masalah sebagai langkah melakukan antisipasi risiko.

Risk Monitoring Committee

Bakrieland Risk Monitoring Committee is established based on Board of Commissioners Directive No.158/SK/ Kom-BLD/ IHS/X/07 on the Establishment and Appointment of the Risk Monitoring Committee.

Duties and responsibilities held by the Risk Monitoring Committee are as follows:

1. To offer input to the BOC on issues related to risk management.
2. Evaluate the risk management and risk monitoring systems.
3. Deliver information to the BOC on relevant issues in order to anticipate potential risks.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

1. Lukman Purnomosidi (Ketua/ Komisaris Independen)
2. Supartono (Anggota/Komisaris)

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sesuai kebutuhan Perusahaan dengan dihadiri oleh seluruh anggotanya. Sepanjang tahun 2013, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat.

The Risk Monitoring Committee structure as of 31st December, 2013 is as follows:

1. Lukman Purnomosidi (Chairman/ Independent Commissioner)
2. Supartono (Member/Commissioner)

The Risk Monitoring Committee holds its meetings according to company needs with attendance by all of its members. In 2013, the Risk Monitoring Committee held 4 (four) meetings.

Agenda Rapat dan Kehadiran Komite Pemantau Risiko | Risk Management Committee's Meeting and Attendance

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance	
			LP	SP
1	6 Maret	Update Aktivitas Manajemen Risiko Update Risk Management Activities	√	√
2	24 Juli	Pembahasan <i>risk assessment</i> proses penyusunan Laporan Keuangan Auditan tahun 2012 Review risk assessment on production of Audited Financial Report 2012	√	√
3	25 September	Penguatan <i>Task Monitoring System</i> (TMS) dan <i>Transaction-Based Risk Management</i> di Unit Usaha Strengthening Task Monitoring System (TMS) and Transaction-Based Risk Management at Business Units	√	√
4	14 November	Pembahasan Laporan Divisi Corporate Risk Management and Compliance Discussion on Corporate Risk Management and Compliance Division Report	√	√
Total Kehadiran Total Attendance			4	4
Persentase Kehadiran Rapat Percentage of Meeting's attendance			100%	100%

Keterangan | Note:

LP: Lukman Purnomosidi, SP: Supartono

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris No.001/SK/Kom- BLD/X/07 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, dimana pada tahun 2009 dilakukan perubahan susunan keanggotaan melalui SK Dewan Komisaris No.02A/SK-KOM/BLD/VII/2009 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen Bakrieland melalui kebijakan nominasi dan remunerasi.

Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee was established based on Board of Commissioners Directive No.001/SK/Kom-BLD/X/07 concerning the Establishment and Appointment of the Nomination and Remuneration Committee, and in 2009 changes were made to its membership composition through Board of Commissioners Directive No.02A/SK-KOM/BLD/VII/2009 on Changes to the Membership Structure of the Nomination and Remuneration Committee. The Nomination and Remuneration Committee seeks to enhance the quality of Bakrieland management through effective nomination and remuneration policies.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para eksekutif, sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.
2. Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Terlibat dalam proses perekrutan (wawancara) dan memberikan rekomendasi atas calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para Eksekutif sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi agar tercipta penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat (*the right man on the right place*).
4. Memberikan rekomendasi tentang kebijakan besaran gaji, tunjangan dan fasilitas yang kompetitif dan mengacu pada perkembangan pasar, untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
5. Mengawasi proses pelaksanaan nominasi dan remunerasi agar tidak menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
6. Mengadakan pertemuan rutin para anggota Komite minimal 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun, masing-masing pertemuan dihadiri oleh minimal 2 (dua) anggota Komite, dan membuat berita acara pertemuan.

Per 31 Desember 2013, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 3 (tiga) orang, sebagai berikut:

1. Lukman Purnomosidi (Ketua/ Komisaris Independen)
2. Bambang Irawan Hendradi (Anggota/ Presiden Komisaris)
3. Supartono (Anggota/Komisaris)

Rapat Komite selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Perusahaan dan dihadiri oleh seluruh anggota. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi telah dilaksanakan 4 (empat) kali di tahun 2013.

Duties and responsibilities held by the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

1. Set the selection criteria and nomination procedure for members of the BOC, BOD and executives until one level below the BOD.
2. Develop the assessment mechanism and offer recommendations on the appropriate number of BOC and BOD members.
3. Involved in the recruitment process (interview) and offer recommendations on prospective members of the BOC, BOD and executive until one level below the BOD in order to ensure the right man in the right place.
4. Offer recommendations on policies related to the appropriate amount of competitive salary, allowance and facilities by taking into account market development, for members of the BOC and the BOD.
5. Monitor the nomination and remuneration process to avoid any departure from the predetermined procedure.
6. Convene regular meetings among Committee members at least every 6 (six) months or biannually whereby each meeting must be attended by no less than 2 (two) Committee members, and prepare the meeting agenda.

As of 31st December, 2013, the Nomination and Remuneration Committee consisted of 3 (three) persons:

1. Lukman Purnomosidi (Chairman/ Independent Commissioner)
2. Bambang Irawan Hendradi (Member/ President Commissioner)
3. Supartono (Member/Commissioner)

Committee meetings are held according to company needs and attended by all of its members. The Nomination and Remuneration Committee convened 4 (four) meetings in 2013.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Agenda Rapat dan Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi | Nomination and Remuneration Committee's Meeting and Attendance

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance		
			LP	IHS	SP
1	30 April 2013	Pembahasan profil kandidat Eksekutif Perseroan dan proses seleksinya. Discussion on the Corporate's Executive candidate's profiles and its selection process.	√	√	√
2	26 June 2013	Pembahasan rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2013 yang terkait dengan struktur organisasi Perseroan dan suksesi Manajemen. Discussion on the planning of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2013 in relation to organization structure and succession plan of Management.	-	√	√
3	19 August 2013	Pembahasan Ajuan 'Bakrieland Executive Remuneration Structure 2013'. Discussion on 2013 Bakrieland Executive Remuneration Structure Proposal.	√	√	√
4	22 October 2013	Lanjutan Pembahasan Ajuan 'Bakrieland Executive Remuneration Structure 2013'. Continuous Discussion on 2013 Bakrieland Executive Remuneration Structure Proposal.	√	√	√
Total Kehadiran / Total Attendance			3	4	4
Persentase Kehadiran Rapat / Percentage of Meeting Attendance			75%	100%	100%

Keterangan / Note:

LP: Lukman Purnomosidi, **IHS:** Bambang Irawan Hendradi, **SP:** Supartono

Komite Kebijakan Corporate Governance

Komite Kebijakan Corporate Governance dibentuk pada tanggal 13 Oktober 2009 berdasarkan SK Dewan Komisaris No.07A/SK-KOM/BLD/X/2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Kebijakan Corporate Governance dan mulai efektif menjalankan tugas pada awal tahun 2010. Komite ini dibentuk untuk dapat meningkatkan dan menyempurnakan praktik GCG terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Tugas dan kewajiban Komite Kebijakan Corporate Governance adalah memberikan pendapat dan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab untuk:

1. Menelaah dan mengkaji ulang Anggaran Dasar.
2. Memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG.
3. Memastikan penerapan prinsip-prinsip etika.
4. Melakukan evaluasi atas struktur dan keanggotaan setiap komite di bawah Dewan Komisaris, khususnya jika terjadi perubahan dalam kebutuhan Perusahaan.
5. Memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Mengkaji kebijakan serta menilai konsistensi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Corporate Governance Policy Committee

The Corporate Governance Policy Committee was established on 13th October, 2009 based on Board of Commissioners Directive No.07A/ SK-KOM/BLD/X/2009 concerning the Establishment and Appointment of the Corporate Governance Policy Committee and whose term of office began effective in early 2010. The committee was established to enhance and improve GCG practices related to the oversight duties and functions of the BOC.

Duties and responsibilities held by the Corporate Governance Policy Committee are to offer views and support to the BOC in fulfilling the following responsibilities:

1. Review and re-assess the Articles of Association.
2. Ensure the implementation of GCG principles.
3. Ensure the adoption of ethical values.
4. Evaluate the structure and membership of each committee under the Board of Commissioners, particularly in the event of changes in company needs.
5. Monitor compliance with existing laws and regulations.
6. Review policies and assess the consistency in fulfilling corporate social responsibilities.

Selama tahun 2013, Komite Kebijakan Corporate Governance menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat.

Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari anggota Dewan Komisaris, apabila dibutuhkan dapat menunjuk pelaku profesi di luar Perusahaan. Susunan Komite Kebijakan Governance per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

1. Kanaka Puradiredja (Ketua/ Komisaris Independen)
2. Bambang Irawan Hendradi (Anggota/ Presiden Komisaris)
3. Supartono (Anggota/Komisaris)

In 2013, the Corporate Governance Policy Committee held 5 (five) meetings.

Corporate Governance Policy Committee membership consists of BOC members, and if required an external professional may be appointed. The structure of the Corporate Governance Policy Committee as of 31st December, 2013 is as follows:

1. Kanaka Puradiredja (Chairman/ Independent Commissioner)
2. Bambang Irawan Hendradi (Member/President Commissioner)
3. Supartono (Member/Commissioner)

Agenda Rapat dan Kehadiran Komite Kebijakan Corporate Governance | Corporate Governance Policy Committee Meeting Agenda and Attendance

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance		
			KP	IHS	SP
1	20 February	Pembahasan realisasi CSR tahun 2012 dan program 2013 Discussion on CSR realization for 2012 and programs for 2013	√	√	√
2	6 March	Pembahasan hasil <i>assessment</i> GCG tahun 2012 Discussion on result of GCG assessment for 2012 - <i>Update</i> dan tindak lanjut hasil <i>assessment</i> GCG tahun 2012 - Update and follow up on results of GCG assessment for 2012	√	√	√
3	24 July	- Pembahasan rencana keikutsertaan dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2012 - Discussion on planning of participation in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2012	√	√	√
4	25 September	Penyempurnaan dan penyesuaian sistem dan prosedur Improvements and changes to systems and procedures	√	√	√
5	14 November	Penguatan implementasi GCG di Unit Usaha dan progress pelaksanaan GCG di Bakrieland selama tahun 2013 Strengthening of GCG implementation in Business Units and progress of GCG implementation in Bakrieland during 2013	√	√	√
Total Kehadiran / Total Attendance			5	5	5
Persentase Kehadiran Rapat / Percentage of Meeting Attendance			100%	100%	100%

Keterangan | Note:

KP: Kanaka Puradiredja, **IHS:** Bambang Irawan Hendradi, **SP:** Supartono

Independensi Komite

Bakrieland menyadari bahwa independensi sangat penting bagi komite dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta berpengaruh terhadap hasil kerja komite itu sendiri. Untuk menjamin berlangsungnya independensi dalam komite, maka setiap komite yang ada di Bakrieland diketuai oleh seorang Komisaris Independen.

Independency of Committee

Bakrieland understands that independency is a crucial element for committees to be able to effectively carry out their duties and responsibilities, and influence the work outcomes of the respective committees. To ensure that committees maintain their independency, each committee in Bakrieland is chaired by an Independent Commissioner.

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Direksi

Persyaratan, Keanggotaan dan Masa Jabatan

Seluruh anggota Direksi Bakrieland telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

Direksi Bakrieland terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) Presiden Direktur dan 2 (dua) Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia. Direksi diseleksi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan diangkat oleh RUPS, dengan periode jabatan masing-masing anggota selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, diberhentikan oleh Dewan Komisaris atau berdasarkan keputusan RUPS.

Susunan Direksi Bakrieland per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

1. Ambono Janurianto (President Director & CEO)
2. Charles Marc Dressler (Director & Chief Services Officer)
3. Agus Jayadi Alwie (Director & Chief Development Officer)

Periode Jabatan Direksi | Board of Directors' Terms of Office

No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Terms of Office
1	Ambono Janurianto	Presiden Direktur & CEO President Director & CEO	June 2012 - May 2015
2	Charles Marc Dressler	Direktur & Chief Services Officer Director & Chief Services Officer	July 2013 - May 2015
3	Agus Jayadi Alwie	Direktur & Chief Development Officer Director & Chief Development Officer	July 2013 - May 2015

Tanggung Jawab dan Bidang Tugas

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh baik secara pribadi maupun bersama atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai.

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan melalui pengelolaan risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh jenjang organisasi.

Board of Directors

Criteria, Membership and Tenure

All Bakrieland Board of Directors (BOD) members has met both formal and material requirements applicable to the company. Formal requirements are general in nature in accordance with existing laws and regulations, while material requirements are more specific and tailored to the needs and characteristics of the company's business.

The Bakrieland BOD comprises of 3 (three) members: 1 (one) President Director and 2 (two) Directors. All members are domiciled in Indonesia. Board of Directors members are selected by the Nomination and Remuneration Committee and appointed by GMS, and each member shall serve for 3 (three) years and may be re-appointed based on GMS decision. Membership in the BOD shall be terminated under the following circumstances: resignation, no longer meets the requirements, deceased and dismissed by the BOC or based on GMS decision.

The composition of the Bakrieland BOD as of 31st December, 2013 is as follows:

1. Ambono Janurianto (President Director & CEO)
2. Charles Marc Dressler (Director & Chief Services Officer)
3. Agus Jayadi Alwie (Director & Chief Development Officer)

Duties and Responsibilities

The Board of Directors is in charge of managing company affairs in good faith and with full responsibility. Each member shall be held accountable, either personally or collectively, for company losses if a member in question has been proven to be wrongful or negligent.

The BOD is responsible for managing the company by ensuring proper risk management and good corporate governance at all organizational ranks. Other responsibilities include

Tanggung jawab Direksi juga mencakup penerapan struktur pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal, dan pengambilan tindakan berdasarkan temuan-temuan Corporate Internal Audit sesuai dengan arahan Dewan Komisaris. Direksi wajib menyusun strategi bisnis, termasuk rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan praktik akuntansi dan pembukuan sesuai ketentuan perusahaan publik. Selain itu, Direksi juga wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembedaan tugas Direksi, maka pembagian tugas Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi, sebagai berikut :

1. Ambono Janurianto (President Director & CEO) bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional.
2. Charles Marc Dressler (Director & Chief Services Officer) bertanggung jawab atas bidang corporate services.
3. Agus Jayadi Alwie (Director & Chief Development Officer) bertanggung jawab atas bidang corporate strategy & development.

Direksi dapat menggunakan saran profesional atas biaya Perusahaan apabila benar-benar dibutuhkan dan dengan memperhatikan batas-batas efisiensi dan efektivitas, serta tidak terdapat benturan kepentingan. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perusahaan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Rapat Direksi

Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu apabila diperlukan, dengan lokasi di tempat kedudukan atau tempat kegiatan Perusahaan, maupun melalui media telekonferensi, video konferensi atau media konferensi lain. Rapat Direksi dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Sepanjang tahun 2013, Direksi menyelenggarakan 19 (sembilan belas) kali rapat.

implementation of an internal control structure and internal audit function, and undertaking the required measures based on outcomes from the Corporate Internal Audit as instructed by the BOC. The BOD must develop the business strategy, including the work plan and budget as well as the implementation of accounting and book-keeping practices in compliance with requirements for public companies. In addition, the BOD is also accountable to shareholders through GMS.

If the scope of work for the BOD has not been delineated by GMS, it shall be determined by the bod which covers the following:

1. Ambono Janurianto (President Director & CEO) responsible for all operational activities.
2. Charles Marc Dressler (Director & Chief Services Officer) responsible for corporate services.
3. Agus Jayadi Alwie (Director & Chief Development Officer) responsible for corporate strategy & development.

The Board of Directors may solicit professional advice on company finances if of absolute necessity and should take into account the action's efficiency and effectiveness, and there should not be any conflict of interest. Without prejudice to its responsibilities, the BOD may give written authority to one or more proxies for and on behalf of the company to do certain legal acts as described in the letter of authority.

Board of Directors' Meetings

A Board of Directors meeting can be convened whenever deemed necessary and may take place either at the company's place of domicile or where the company conducts its operation, through teleconference, video conference or other conferencing media. A BOD meeting is declared valid and eligible to issue binding decisions when more than 1/2 (half) of the number of BOD members are in attendance during the meeting or are represented by a proxy. In 2013, the BOD held 19 (nineteen) meetings.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Agenda Rapat Direksi dan Kehadiran Direksi | Board of Directors' Meeting Agenda and Attendance

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance				
			AJ	FS*	AL*	AJA**	M D**
1	8 February 2013	<ul style="list-style-type: none"> Update program One Bakrieland Target pencapaian Annual Report Bakrieland (ARA) 2012 Tindak lanjut hasil penilaian GCG 2011 Update ERP F/A Module Implementation Insurance and performance management system Update on One Bakrieland Program Achievement Target of Annual Report Bakrieland (ARA) 2012 Follow up on GCG 2011 Assessment results Update on ERP F/A Module Implementation Insurance and performance management system 	√	√	√		
2	27 February 2013	<ul style="list-style-type: none"> Update pembayaran Obligasi I seri B sebesar Rp280 miliar Update rencana restrukturisasi Equity-Linked Bonds Update isu penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2012 Update closing divestasi PT Bakrie Toll Road Corporate Calender of Events (COE) Update on payment of Bonds I B Series amounted Rp 280 Billion Update on planning of Equity-Linked Bonds restructuring Update on issue of preparation of Financial Statement as of 31st December, 2012 Update on closing divestation of PT Bakrie Toll Road Corporate Calender of Events (COE) 	√	√	√		
3	4 March 2013	<ul style="list-style-type: none"> Usulan perubahan susunan Dewan Komisaris di Unit Usaha Bakrieland. Rencana penerapan sistem remunerasi tunggal di Bakrieland dan Unit Usaha Suggestion on changes in the composition of Bakrieland Business Unit's Board of Commissioners Planning on single remuneration system in Bakrieland and Business Unit 	√	√	√		
4	16 April 2013	<ul style="list-style-type: none"> Rencana pelaksanaan dan pembahasan agenda RUPS Tahunan Bakrieland Update Laporan Keuangan Auditan 31 Desember 2012 Update restrukturisasi Equity-Linked Bonds Plan for the implementation and discussion on agenda of Bakrieland AGMS Update on Audited Financial Statements as of 31st December, 2012 Update on restructuring Equity-Linked Bonds 	√	-	√		
5	25 April 2013	<ul style="list-style-type: none"> Usulan struktur organisasi Bakrieland Usulan kandidat CFO Bakrieland Jabatan Wakil Presiden Direktur dan Wakil Komisaris Utama Suggestion on Bakrieland organizational structure Suggestion on Bakrieland CFO candidate Position of Vice President and Deputy Commissioner 	√	-	√		
6	13 May 2013	<ul style="list-style-type: none"> Update isu penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2012 Update isu penyusunan Laporan Tahunan (annual report) tahun 2012 Financial Statements as of 31st December, 2012 Update on issue of preparation of Annual Report in 2012 	√	-	√		
7	21 June 2013	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan agenda RUPST Bakrieland Usulan struktur organisasi Bakrieland Discussion on the Bakrieland AGMS agenda Suggestion on Bakrieland organizational structure 	√	-	√		
8	12 July 2013	<ul style="list-style-type: none"> Corporate Calender of Events (COE) Bakrieland Rencana Strategic Actions Bakrieland Update isu penyusunan Laporan Keuangan 1Q13 Bakrieland Corporate Calendar of Events (COE) Bakrieland Strategic Actions Plan Update on the issue of preparation of Financial Statements 1Q13 	√			√	√

Agenda Rapat Direksi dan Kehadiran Direksi | Board of Directors' Meeting Agenda and Attendance

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance				
			AJ	FS*	AL*	AJA**	MD**
9	16 August 2013	<ul style="list-style-type: none"> Perkenalan eksekutif baru Bakrieland Financial highlights 1Q 2013 dan 2Q 2013 Update restrukturisasi Equity-Linked Bonds Introduction of Bakrieland new executive Financial highlights for Q 2013 and 2Q 2013 Update on restructuring Equity-Linked Bonds 	√			√	√
10	3 September 2013	<ul style="list-style-type: none"> Update Equity-Linked Bonds Project Lighthouse Future Bakrieland Update on Equity-Linked Bonds Project Lighthouse Future Bakrieland 	√			√	√
11	25 September 2013	<ul style="list-style-type: none"> Issue Laporan Keuangan 2Q2013 Pencabutan suspensi saham ELTY terkait PKPU Issue on Financial Statement for 2Q2013 Revocation of ELTY stock suspension related to PKPU 	√			√	√
12	18 October 2013	<ul style="list-style-type: none"> Update terkait Equity-Linked Bonds Update perkara gugatan ex Pemegang Waran Rencana penyelenggaraan Public Expose Update on Equity-Linked Bonds Update on the lawsuit of ex Warrant Holders Plan for the Public Expose implementation 	√			-	√
13	11 November 2013	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Rencana Bisnis 2015 - 2018 & Budget 2014 - Unit Usaha Discussion on Business Plan for 2015 – 2018 and budget for 2014 – Bussiness Unit 	√			√	√
14	19 November 2013	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Rencana Bisnis 2015 - 2018 & Budget 2014 – Holding Discussion on Business Plan for 2015 – 2018 and budget for 2014 – Holding 	√			√	-
15	29 November 2013	<ul style="list-style-type: none"> Rencana strategis Unit Usaha di tahun 2014 Diskusi Manajemen Business Units Strategic Plan for 2014 Management Discussion 	√			√	√
16	4 December 2013	<ul style="list-style-type: none"> Update isu penting dan Action Plan Bakrieland Group Rencana Bisnis & Budget Landed Residential Update on important issues and action plans of Bakrieland Group Landed Residential Business Plan & Budget 	√			√	√
17	5 December 2013	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Bisnis & Budget City Property City Property Business Plan & Budget 	√			√	√
18	6 December 2013	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Bisnis & Budget Hotels & Resorts Hotels & Resorts Business Plan & Budget 	√			√	√
19	17 December 2013	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Operasional dan Finansial tahun 2013 Rencana bisnis dan Konsolidasi budget periode 2014 - 2018 Operational and financial performance of 2013 Bussiness plan and budget consolidation for 2014 - 2018 	√			√	√

Keterangan | Note:

AJ : Ambono Janurianto, **FS** : Feb Sumandar, **AL** : Azrul Azwar Ab Latif, **AJA** : Agus J. Alwie, **MD** : Marc Dressler
 * Mengundurkan diri sebagai Direktur pada tanggal 28 Juni 2013 | Resigned as Director on 28th June, 2013
 ** Menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 28 Juni 2013 | Serves as Director since 28th June, 2013

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Komite dan Satuan Kerja Direksi

Untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dibentuk 2 (dua) satuan kerja dan 1 (satu) komite, yaitu:

1. Satuan Kerja Audit Internal, untuk memantau dan memastikan aktivitas pengendalian internal berjalan dengan baik.
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko, untuk memastikan bahwa kerangka kerja pengelolaan risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perusahaan.
3. Komite/Panitia Tender, untuk memberikan penilaian objektif atas calon rekanan dalam proses tender pengadaan barang dan/atau jasa.

Rapat Gabungan

Di samping rapat Dewan Komisaris dan rapat Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga mengadakan rapat gabungan sebanyak 8 (delapan) kali sepanjang tahun 2013.

Board of Directors Committees and Working Units

To assist the Board of Directors in carrying out its duties and functions, 2 (two) working units and 1 (one) committee have been established:

1. Internal Audit Working Unit, to monitor and ensure the smooth implementation of internal controls.
2. Risk Management Working Unit, to ensure that the risk management framework provides adequate protection against all company risks.
3. Tender Committee, to deliver an objective assessment of prospective business partners in the tendering process for goods and/or service procurement.

Joint Meetings

In addition to the meetings of either the Board of Commissioners or Board of Directors, joint meetings between BOC and BOD members were also held 8 (eight) times throughout 2013.

Agenda Rapat Gabungan dan Kehadiran | Joint Meeting Agenda and Attendance

No	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Direksi BOD Attendance					Kehadiran Dewan Komisaris BOC Attendance					
			AJ	FS*	AL*	AJA**	MD**	IHS	LP	KP	SP	AY	AAR**
1	28 February 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Update pembayaran Obligasi I seri B sebesar Rp280 miliar • Update rencana restrukturisasi Equity-Linked Bonds • Update isu penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2012 • Update closing divestasi PT Bakrie Toll Road • Corporate Calender of Events (COE) • Update on payment of Bonds I B Series amounted Rp 280 Billion • Update on planning of Equity-Linked Bonds restructuring • Update on issue of preparation of Financial Statement as of 31st December, 2012 • Update on closing divestation of PT Bakrie Toll Road • Corporate Calender of Events (COE) 	√	√	√			√	√	√	√	√	-

Agenda Rapat Gabungan dan Kehadiran | Joint Meeting Agenda and Attendance

No	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Direksi BOD Attendance					Kehadiran Dewan Komisaris BOC Attendance					
			AJ	FS*	AL*	AJA**	MD**	IHS	LP	KP	SP	AY	AAR**
2	19 April 2013	<ul style="list-style-type: none"> Rencana pelaksanaan dan pembahasan agenda RUPST Bakrieland Update Laporan Keuangan Auditan 31 Desember 2012 Update restrukturisasi Equity-Linked Bonds Plan for the implementation and discussion on agenda of Bakrieland AGMS Update on Audited Financial Statements as of 31st December, 2012 Update on restructuring Equity-Linked Bonds 	√	-	√			√	√	√	√	√	√
3	30 April 2013	<ul style="list-style-type: none"> Usulan struktur organisasi Bakrieland Usulan kandidat CFO Bakrieland Jabatan Wakil Presiden Direktur dan Wakil Komisaris Utama Suggestion on Bakrieland organizational structure Suggestion on Bakrieland CFO candidate Position of Vice President and Deputy Commissioner 	√	-	√			√	√	√	√	√	√
4	26 June 2013	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan agenda RUPST 2013 Bakrieland Usulan struktur organisasi Bakrieland Discussion on the Bakrieland AGMS agenda Suggestion on Bakrieland organizational structure 	√	-	-			√	-	-	√	√	√

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Agenda Rapat Gabungan dan Kehadiran | Joint Meeting Agenda and Attendance

No	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Direksi BOD Attendance					Kehadiran Dewan Komisaris BOC Attendance					
			AJ	FS*	AL*	AJA**	MD**	IHS	LP	KP	SP	AY	AAR**
5	20 August 2013	<ul style="list-style-type: none"> Perkenalan eksekutif baru Bakrieland Financial highlights 1Q 2013 dan 2Q 2013 Update restrukturisasi Equity-Linked Bonds Introduction of Bakrieland new executive Financial highlights for Q 2013 and 2Q 2013 Update on restructuring Equity-Linked Bonds 	√			√	√	√	-	√	√	√	
6	19 September 2013	<ul style="list-style-type: none"> Financial Highlight 2Q13 Update terkait Equity-Linked Bonds Financial highlights for 2013 Update on restructuring Equity-Linked Bonds 	√			√	√	√	√	√	√	√	
7	22 October 2013	<ul style="list-style-type: none"> Update terkait Equity-Linked Bonds Update perkara gugatan ex Pemegang Waran Rencana penyelenggaraan Public Expose Update on Equity-Linked Bonds Update on the lawsuit of ex Warrant Holders Plan for the Public Expose implementation 	√			-	√	√	√	√	√	√	
8	18 December 2013	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Operasional dan Finansial tahun 2013 Rencana Bisnis dan Budget konsolidasi periode 2014-2018 Operational and financial performance of 2013 Bussiness plan and budget consolidation for 2014 - 2018 	√			√	√	√	√	√	√	√	

Keterangan | Note:

IHSAJ: Ambono Janurianto, **FS:** Feb Sumandar, **AL:** Azrul Azwar Ab Latif, **AJA:** Agus J. Alwie, **MD:** Marc Dressler, **IHS:** Bambang Irawan Hendradi, **KP:** Kanaka Puradiredja, **LP:** Lukman Purnomosidi, **AY:** Armansyah Yamin, **SP:** Supartono, **AAR:** Amir Abdul Rachman

* Mengundurkan diri sebagai Direktur/Komisaris pada tanggal 28 Juni 2013 | Resigned as Director/ Commissioner on 28th June, 2013

** Menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 28 Juni 2013 | Serves as Director since 28th June, 2013

Mekanisme Dan Evaluasi Kinerja

Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPST berdasarkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Akan halnya Komite di bawah Dewan Komisaris, kinerjanya ditentukan berdasarkan pencapaian tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan Dewan Komisaris, yang akan memberikan penilaian satu tahun sekali sebelum RUPST diadakan.

Penilaian keberhasilan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite dilakukan dengan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) yang disusun bersama-sama dalam suatu rapat Dewan Komisaris yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan diputuskan oleh Dewan Komisaris. Aspek KPI dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, pengembangan sumber daya manusia, dan kepemimpinan. Penetapan KPI harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Accurate, Reliable, Timeline (SMART).

Penetapan KPI adalah berdasarkan fokus atau sasaran kerja yang harus dicapai dalam periode tertentu sesuai rencana dan target kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Oleh karena itu, KPI menjadi bahan evaluasi keberhasilan kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di akhir periode anggaran untuk mencapai tujuan perusahaan. KPI akan dikaji ulang secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Prosedur dan penetapan penyusunan KPI diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite secara keseluruhan dan kinerja perorangan setiap anggota merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif. Hasil evaluasi kinerja perorangan merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota, serta berfungsi sebagai sarana penilaian dan peningkatan efektivitas. Tata cara evaluasi kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan komite di bawah Dewan Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.198/Kom-BLD/SK/ XII/09.

Performance Mechanism and Evaluation

The work performance of the Board of Commissioners and Board of Directors undergoes an evaluation by Shareholders at the AGMS based on the discharging of their duties and responsibilities as laid down in the company Articles of Association and mandate entrusted by Shareholders. Performance evaluation of committees under the BOC on the other hand highlights the fulfillment of their duties and responsibilities as set out by the BOC, who will conduct an annual assessment prior to the AGMS.

Assessment of the accomplishments attained by the BOC, BOD and Committees applies Key Performance Indicators (KPI) identified jointly during a BOC meeting comprising of the BOC, BOD and Nomination and Remuneration Committee, with the final decision made by the BOC. KPI may consist of, but not be limited to, perspectives related to finance, customers, internal processes, human capital development and leadership. The KPI must meet the SMART (Specific, Measurable, Accurate, Reliable, Timeline) criteria.

The KPI must be identified according to the work focus and expected goals for a given period consistent with the predetermined work plan and targets as spelled out in the Annual Work Plan and Budget. The KPI therefore feeds into the performance evaluation of the BOC, BOD and Committees at the end of the budget period for the purpose of realizing company goals. The KPI shall be re-assessed periodically in step with current developments. The procedure involved in identifying KPI is arranged further by the BOD Directive.

Evaluation outcomes on the overall performance of the BOC, BOD and Committees, and the individual performance of each member make up an inseparable part of the compensation and incentive scheme. Results of individual performance appraisals are one of the considerations in the dismissal and/or re-appointment of members, and functions as an assessment tool and for enhancing effectiveness. The performance evaluation procedure for the BOD, BOC and Committees under the BOC is determined by BOC Directive No.198/ Kom-BLD/SK/XII/09.

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Kebijakan Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi menerima imbalan jasa dalam bentuk gaji, tunjangan, dan fasilitas. Sesuai Anggaran Dasar Bakrieland, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS. Besaran remunerasi ditetapkan dengan memperhatikan besaran pendapatan tahun-tahun sebelumnya, beban tugas dan tanggung jawab, serta disesuaikan dengan tingkat remunerasi eksekutif pada industri sejenis. Bakrieland telah memiliki Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/KOM-BLD/SK/XII/2011 yang mengatur mengenai prosedur remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Surat Keputusan ini merupakan penyempurnaan dari Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 197/Kom-BLD/SK/XII/09.

Remuneration Policy

The BOC and BOD receive compensation for services rendered, in the form of salary, allowance and facilities. Based on Bakrieland's Articles of Association, remuneration for the BOC and BOD shall be determined through GMS. The amount of remuneration shall correspond with the amount of income in previous years, workload in terms of duties and responsibilities, and adjusted according to the executive remuneration rate for the same industry. Bakrieland has its Board of Commissioners Directive No. 006/KOM-BLD/SK/XII/2011 to regulate on the remuneration procedure for the BOD and BOC. This Directive is an improvement to BOC Directive No. 197/Kom- BLD/SK/XII/09.

Tabel Remunerasi Karyawan (Perorangan) Tahun 2012 dan 2013 | Employee (Individual) Remuneration for 2012 and 2013

Komponen Remunerasi Remuneration Component	2012		2013	
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Tertinggi Highest	Terendah Lowest
Gaji (Rp)/tahun Salary (Rp)/Year	780,000,000	18,600,000	813,801,440	12,600,000
Tunjangan (Rp)/tahun Allowance (Rp)/Year	378,700,000	10,900,000	404,099,520	3,276,000
Total (Rp)	1,158,700,000	29,500,000	1,217,900,960	15,876,000

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2012 dan 2013
Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors fo 2012 and 2013

Komponen Remunerasi Remuneration Component	2012		2013	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Total (Rp)	6,998,250,000	5,899,984,731	7,116,746,000	6,300,766,792

Pelatihan Direksi

Pada tahun 2013, para Direktur mengikuti sebanyak 2 (dua) kali pelatihan. Berikut adalah rincian pelatihan-pelatihan tersebut.

Board of Directors' Training

In 2013, members of the BOD have participated in the following 2 (two) training courses.

Pelatihan Direksi 2013 | The Board of Directors' Training in 2013

No	Tgl. Pelaksanaan Date of Event	Penyelenggara Organizer	Materi Material	Jabatan Position	Tempat Pelaksanaan Location
1	5-7 Oktober	APEC	APEC CEO Summit 2013	President Director&CEO	Patra Jasa Hotel-Bali
2	21-22 Oktober	Marcus Evans	Asian Infrastructure & Property Development Summit 2013	Director	Venetian Macau

Kebijakan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan merupakan situasi dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk mengatur hal ini, maka pada tanggal 8 Juni 2009 diterbitkan SK Direksi dan Dewan Komisaris Bakrieland No. 079/ DIR-KOM/SK/VI/09 tentang Benturan Kepentingan. Kebijakan Benturan Kepentingan memuat panduan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi agar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kegiatan sampingan, dan kerahasiaan informasi.

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi setiap tahunnya menandatangani Surat Pernyataan Benturan Kepentingan. Surat tersebut berisi pernyataan, termasuk namun tidak terbatas pada :

1. Tidak menerima atau memberikan suatu hal dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi.
2. Tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan oleh pemegang saham independen Perusahaan.
3. Mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga, dan pihak lainnya.

Jika di kemudian hari mengalami situasi dimana terdapat benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris dan Direksi akan menarik diri untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Pada awal tahun 2014, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bakrieland telah menandatangani Surat Pernyataan Benturan Kepentingan untuk masa jabatan tahun 2013.

Kebijakan Pemilihan Kantor Akuntan Publik

Bakrieland telah memiliki Kebijakan Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Penugasan Audit Tahunan sejak tahun 2011 yang selanjutnya menjadi pedoman pokok dalam melakukan pemilihan KAP yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan independensi atas proses tersebut. Kebijakan ini mengatur

Conflict of Interest Policy

Conflict of interest refers to a situation where there is conflict between the company's economic interest and the personal economic interest of shareholders, and members of the BOC and BOD. In dealing with this issue, the Bakrieland BOD and BOC Directive No. 079/DIR-KOM/SK/VI/09 on Conflict of Interest was issued on 8th June, 2009. The Conflict of Interest Policy contains guiding principles for members of the BOC and BOD in prioritizing company economic interest when carrying out their duties and responsibilities, and to refrain from abusing their position for personal interest or gain, or of that of their family members and other parties. Furthermore, this policy also specifies about the offering and acceptance of gifts and donations, as well as regarding to sideline work and confidential information.

Every member of the BOC and BOD on a yearly basis shall sign a Conflict of Interest Statement Letter. This letter contains a statement on, including but not limited to the following:

1. Shall not accept from or offer to another party anything in any form that may influence independence.
2. Shall not participate in any decision making process in conflict of interest with independent company shareholders.
3. Give precedence to the company's economic interest above personal economic gain and that of family members and other parties.

In the event of a conflict of interest, the BOD or BOC member must withdraw from any involvement in the decision making process.

In early 2014, all members of Bakrieland BBOC and BOD have signed the Conflict of Interest Statement Letter for their respective term of office in 2013.

Public Accounting Firm Selection Policy

Bakrieland has formulated its own Public Accounting Firm (PAF) Selection Policy for carrying out its annual audit since 2011 which serves as basic guidance for electing a Public Accounting Firm to perform the annual financial audit in order to guarantee transparency, accountability and independency of the process. This policy stipulates on those who should be

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

siapa saja pihak yang terkait dalam proses pemilihan, aspek penilaian beserta persyaratan dan kriterianya.

involved in the selection process, assessment considerations, criteria and requirements.

Kebijakan ini disusun sesuai dengan Peraturan OJK dan Menteri Keuangan RI yang mengatur mengenai independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal, laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK wajib diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK, serta jasa Akuntan Publik.

This policy is drawn up in compliance with regulations issued by FSA and the Indonesian Ministry of Finance concerning the independency of accountants that offer audit services to the capital market, the company's obligation to submit financial statements to FSA audited by an accountant registered with FSA, as well as on Public Accountant services.

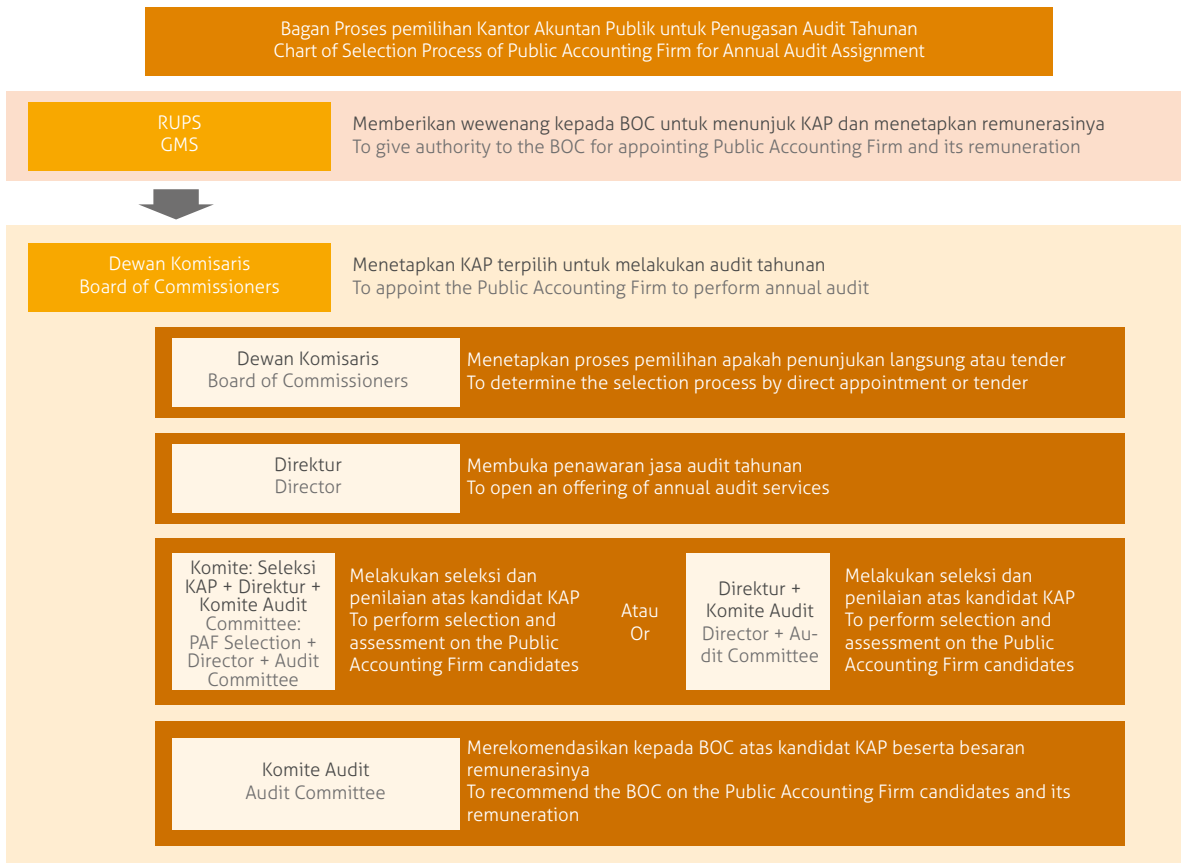
Pada tahun 2012 dilakukan penyempurnaan atas kebijakan ini untuk lebih meningkatkan objektivitas proses pemilihan KAP.

In 2012, improvements were made to the policy in order to enhance objectivity in the PAF selection process.

Laporan Tahunan 2013

220

PT Bakrieland Development Tbk



Auditor Eksternal

Dalam memastikan integritas penyajian laporan keuangan kepada pemegang saham, Bakrieland menggunakan jasa Auditor Eksternal. Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012, Bakrieland mendapatkan opini wajar dengan pengecualian untuk keyakinan atas penyertaan saham entitas anak tertentu senilai Rp13,97 milyar dan paragraf penjelasan.

Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013, Auditor Eksternal yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (sesuai kewenangan yang diberikan oleh RUPS) untuk mengaudit Laporan keuangan konsolidasian Bakrieland yaitu Crowe Horwarth (KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo, dan Rekan) dengan auditor Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA. Total biaya yang dikeluarkan untuk audit Bakrieland dan anak perusahaan sebesar Rp2.746.103.000. Opini yang dikeluarkan oleh Auditor Eksternal untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013 dapat dilihat pada bagian Laporan Keuangan dalam laporan ini. Selain tugas audit Laporan Keuangan, Akuntan Publik ini tidak melakukan tugas-tugas audit lain dalam Perusahaan.

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Bakrieland memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk menciptakan suatu sistem pengadaan yang handal dimana barang dan/atau jasa diadakan sesuai dengan kebutuhan operasional, proses yang berlaku, dilaksanakan tepat waktu, terkendali dan dengan biaya yang wajar. Kebijakan ini berlaku efektif sejak tahun 2011.

Tujuan penyusunan kebijakan ini adalah agar menjadi panduan bagi karyawan Perusahaan dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan pengadaan di Perusahaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai peraturan yang berlaku dan mengacu pada prinsip GCG. Kebijakan ini antara lain mengatur prinsip umum pengadaan, kategori barang dan/atau jasa, metode pengadaan, pengaturan penerbitan kontrak/perjanjian.

Di dalam kebijakan ini setiap calon rekanan diharuskan melampirkan dokumen Pakta Integritas Eksternal, yang antara lain berisi:

- Pernyataan untuk menghindari praktik benturan kepentingan.
- Pernyataan untuk melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi benturan kepentingan.

External Auditor

To ensure integrity in the presentation of financial statements to shareholders, Bakrieland has retained the services of an External Auditor. For the fiscal year ending 31st December, 2012, Bakrieland presented qualified opinion for assurances of investment in shares of stock in certain subsidiary amounting to Rp 13.97 billion and explanatory paragraph.

The External Auditor appointed for the fiscal year ending 31st December, 2013 by the Board of Commissioners (consistent with the authority conferred by GMS) to audit Bakrieland Consolidated Financial Statements was Crowe Horwarth (PAF Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo, and Associates) with auditor Meilyn Soetiono, SE., Ak., CPA.. Total costs incurred for the audit of Bakrieland and its subsidiaries amounted to Rp2,746,103,000. The opinion issued by the External Auditor for fiscal year ending 31st December, 2013 is presented in the section on Financial Statement in this report. The Public Accountant does not perform any other audit function in the company except for the audit of financial statements.

Goods and/or Service Procurement Policy

Bakrieland has introduced its own Goods and/or Service Procurement Policy to establish a reliable procurement mechanism in which goods and/or services are acquired in accordance with operational needs and existing processes in a timely fashion with the appropriate controls in place and reasonable costs. This policy enters into force in 2011.

The policy is established to guide company employees in implementing and managing procurement-related activities for the company in an effective and efficient manner in compliance with existing rules and regulations, and adhering to the principles of GCG. This policy among others lays down the basic procurement guidelines, categorization of goods and/or services, procurement method, and issuance of contracts/ agreements.

In this policy, every prospective business associate must attach the External Integrity Pact that among others contains:

- Statement to avoid conflict of interest.
- Statement to report on any indication of conflict of interest.

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

- Pernyataan larangan pemberian hadiah atau hiburan lainnya kepada karyawan Perusahaan yang berhubungan dengan pengadaan proyek/ pekerjaan.
- Pernyataan untuk mengikuti proses pelelangan yang mengacu kepada prinsip keadilan (*fair competition*).
- Pernyataan untuk memberikan informasi yang akurat dan benar kepada pihak Bakrieland.
- Pernyataan untuk tidak memberikan atau memberitahukan (menyebarkan/ membocorkan) informasi yang bersifat rahasia mengenai Bakrieland.

Kebijakan Email Bakrieland

Bakrieland memiliki Kebijakan Email untuk mengatur mengenai penggunaan seluruh email di lingkungan Bakrieland dengan domain www.bakrieland.com dalam hal pengiriman dan penerimaan email, serta keamanan penggunaan dan pengawasan email. Kebijakan ini berlaku efektif sejak tahun 2011.

Tujuan penerbitan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan penggunaan yang tepat dari sistem email Bakrieland.
2. Membuat karyawan Bakrieland menyadari komponen-komponen yang dapat diterima dan tidak dapat diterima pada sistem email Bakrieland.

Di dalam kebijakan ini, diantaranya diatur mengenai ketentuan penggunaan email untuk kepentingan perusahaan dan pribadi, pembuatan dan penghapusan akun email, informasi rahasia, risiko hukum, serta sistem pengawasan email.

Kebijakan Pengelolaan dan Backup Data

Dalam era informasi saat ini, data sebagai sumber daya informasi adalah merupakan aset perusahaan yang vital. Bakrieland sebagai perusahaan yang memahami peran data tersebut dan juga memahami kebutuhan pengelolaan data memandang bahwa pengelolaan dan perlindungan terhadap data sangat penting dalam mengantisipasi risiko kehilangan data. Untuk lebih memastikan pengelolaan data yang baik dan mengoptimalkan manfaat sistem *backup data* yang telah diimplementasikan di Bakrieland, disusunlah Kebijakan Pengelolaan dan *Backup Data* yang disahkan melalui SK Direksi No. 024/DIR-Perseroan/SKD/XII/2012.

- Statement to refrain from offering gifts or other forms of entertainment to company employees associated with the awarding of project/work.
- Statement to undergo the tendering process in conformity with the principle of fair competition.
- Statement to deliver accurate and truthful information to Bakrieland.
- Statement to refrain from releasing or providing (disseminating/ disclosing) classified information concerning Bakrieland.

Bakrieland Email Policy

Bakrieland has introduced an Email Policy to arrange all matters related to the email procedure within Bakrieland under the domain www.bakrieland.com specifically with regard to email correspondence, as well as email security and monitoring. This policy, entered into effect since 2011.

The purpose of this policy are as follows ::

1. To ensure the appropriate use of Bakrieland's email system.
2. To familiarize Bakrieland employees on acceptable and unacceptable actions within the company-wide email system.

This policy, among others, regulate email usage for corporate and personal interests, creation and deletion of email accounts, classified information, legal risks and email monitoring mechanisms.

Data Management and Backup Policy

In today's information age, data as an information resource is a vital corporate asset. Fully cognizant of the role of corporate data and the importance of proper data management, Bakrieland considers data management and protection as crucial for anticipating the risk of data loss. To further guarantee effective data management and optimize its existing data backup system, Bakrieland has issued the Data Management and Backup Policy approved through Board of Directors Directive No. 024/DIR-Perseroan/SKD/ XII/2012.

Transparansi dan Pengungkapan

Pernyataan Rangkap Jabatan

Setiap anggota Direksi wajib menandatangani Surat Pernyataan Rangkap Jabatan guna memenuhi prinsip independensi dan transparansi dalam GCG. Surat tersebut berisi pernyataan bahwa untuk masa satu jabatan pada satu tahun tidak menjabat sebagai Direktur, Komisaris di perusahaan lain di luar Perusahaan dan anak perusahaan/afiliasinya. Seluruh anggota Direksi Bakrieland telah menandatangani surat pernyataan untuk masa jabatan tahun 2013.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi setiap awal tahun membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Saham dan dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan. Surat pernyataan tersebut menyatakan jumlah lembar saham yang dimiliki anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi beserta keluarga (istri dan anak).

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarga per 31 Desember 2013 tidak memiliki saham pada Bakrieland dan perusahaan lain.

Laporan Publikasi Pembayaran Pajak 2013

Bakrieland dan unit usahanya telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili masing-masing. Kewajiban perpajakan yang dilakukan selama tahun 2013 berhubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan dengan perincian sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21/26
2. Pajak Penghasilan Pasal 23/26
3. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)
4. Pajak Penghasilan Pasal 25/29
5. Pajak Pertambahan Nilai
6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
7. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8. Pajak Bumi dan Bangunan

Transparency and Disclosure

Statement of Multiple Occupation

Every member of the Board of Directors has the obligation to sign the Statement Letter on Concurrent Positions in adherence to the GCG principles of independency and transparency. This Statement Letter asserts that the signatory shall not serve as a Director or Commissioner in another business entity other than the company and its subsidiaries/affiliates during the signatory's term of office. All Bakrieland BOD members signed the statement letter for their respective tenures in 2013.

Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership

At the start of each year, the BOC and BOD issue a Statement Letter on Share Ownership published in the company Annual Report. This Statement Letter details the amount of shares owned by members of the BOC and BOD, including their family members (wife and children).

No member of the BOC and BOD, and their family members as of 31st December 2013 owns shares in Bakrieland or other companies.

Tax Payment Report 2012

Bakrieland and its business units are registered as taxpayers with the Tax Office according to their respective place of domicile. Tax obligations fulfilled throughout 2012 are related to company business activities which cover the following:

1. Incomes Tax Article 21/26
2. Income Tax Article 23/26
3. Income Tax Article 4 (2)
4. Income Tax Article 25/29
5. Value-Added Tax
6. Sales Tax for Luxury Goods
7. Local Tax and Fees
8. Land and Building Tax

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Implementasi PSAK Berbasis IFRS

Sejak diterbitkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi (PSAK & ISAK) sebagaimana terakhir ditetapkan dalam SAK per 1 Juni 2012 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia, Bakrieland telah melakukan penerapan terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian dan entitas anak terkait.

Adapun beberapa standar akuntansi keuangan yang telah efektif dan diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Standar yang telah efektif berlaku di tahun 2012, seperti:
 - PSAK No. 10 (Revisi 2010): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
 - PSAK No. 13 (Revisi 2011): Properti Investasi
 - PSAK No. 16 (Revisi 2011) Aset Tetap
 - PSAK No. 18 (Revisi 2010): Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
 - PSAK No. 24 (Revisi 2010): Imbalan Kerja
 - PSAK No. 26 (Revisi 2011): Biaya Pinjaman
 - PSAK No. 30 (Revisi 2011): Sewa
 - PSAK No. 34 (Revisi 2010): Akuntansi Kontrak Konstruksi
 - PSAK No. 46 (Revisi 2010): Pajak Penghasilan
 - PSAK No. 50 (Revisi 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian
 - PSAK No. 53 (Revisi 2010): Pembayaran Berbasis Saham
 - PSAK No. 55 (Revisi 2011): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
 - PSAK No. 56 (Revisi 2011): Laba per Saham
 - PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
 - ISAK No. 13: Lindung Nilai Investasi Neto Dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
 - ISAK No. 15: PSAK 24 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
 - ISAK No. 20: Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham
 - ISAK No. 25: Hak atas Tanah

IFRS-Based PSAK Implementation

Since the issuance of Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) that encompasses Statements and Interpretations (PSAK & ISAK) most recently outlined in FAK as of 1st June, 2012 by the Financial Accounting Standards Board or DSAK of the Indonesian Institute of Accountants, Bakrieland has applied these standards on the consolidated financial statements of the parent company and relevant subsidiaries.

Several financial accounting standards that have been effectively applied are as follows:

1. Standards that became effective in 2012, include:
 - PSAK No. 10 (Revised 2010): Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
 - PSAK No. 13 (Revised 2011): Investment Property
 - PSAK No. 16 (Revised 2011): Property, Plant, and Equipment
 - PSAK No. 18 (Revised 2010): Accounting and Reporting of Retirement Benefit Plan
 - PSAK No. 24 (Revisi 2010): Employee Benefits
 - PSAK No. 26 (Revised 2011): Borrowing Cost
 - PSAK No. 30 (Revised 2011): Lease
 - PSAK No. 34 (Revised 2010) : Accounting for Construction Contracts
 - PSAK No. 46 (Revised 2010) : Income Taxes
 - PSAK No. 50 (Revised 2010) : Financial Instruments: Presentation
 - PSAK No. 53 (Revised 2010) : Share-Based Payment
 - PSAK No. 55 (2011): Financial Instruments: Recognition and Measurement
 - PSAK No. 56 (Revised 2011) : Earnings per Share
 - PSAK No. 60 (Revised 2010) : Financial Instruments: Disclosures
 - ISAK No. 13: Hedges of Net Investment in Foreign Business Activities
 - ISAK No. 15: PSAK 24 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction
 - ISAK No. 20: Income Taxes – Changes in Tax Status of Entities or the Shareholders
 - ISAK No. 25: Land Rights

2. Standar lainnya yang efektif berlaku di tahun 2013, seperti:
- PSAK No. 38 (Revisi 2012): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
 - ISAK No. 21: Perjanjian Konstruksi Real Estat
 - PPSAK No. 7: Pencabutan PSAK No. 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate
 - PPSAK No. 10: Pencabutan PSAK No. 51: Akuntansi Kuasi-Reorganisasi

Atas penerapan ISAK No. 21 dan PPSAK No. 7 telah ditunda sampai tanggal yang akan ditentukan kemudian berdasarkan surat DSAK-IAI No. 0643/DSAK/IAI/IX/2012 tanggal 21 September 2012.

Standar-standar revisi yang signifikan tersebut dibuat berdasarkan International Financial Reporting Standard (IFRS 2009) yang efektif berlaku dan dilaksanakan untuk laporan keuangan pada tahun 2013.

Selain itu pada tahun 2013, OJK telah merevisi Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK No: KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012. Peraturan tersebut direvisi untuk memberikan kepastian hukum bagi emiten dan perusahaan publik dalam hal penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebagai bentuk penyesuaian atas penerapan revisi PSAK. Dengan adanya penyempurnaan atas peraturan ini, mempermudah entitas dalam mengimplementasikan PSAK revisi yang terkait dan mengurangi risiko ketidakpatuhan atas standar revisi yang telah ditetapkan.

Kasus Litigasi dan Perkara Penting

Kasus litigasi dan perkara penting yang dihadapi oleh Bakrieland sepanjang 2013 adalah:

1. Tuntutan hukum kepada PT Bakrieland Development Tbk ("BLD") yaitu Perkara perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register Nomor: 99/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dalam perkara antara Igan Bismayudha Dkk selaku Para Penggugat melawan BLD sebagai Tergugat 1 dan Bpk Hiramshyah Sambudhy Thaib (ex-Presiden Direktur BLD) sebagai Tergugat 2 berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 13 Februari 2013 dari Sihaloho & Salim Law Office ("Kuasa Hukum Para Tergugat");

2. Other standards that became effective in 2013, include:
- PSAK No. 38 (Revised 2012): Combination of Business entities
 - ISAK No. 21: Real Estate Construction Agreement
 - PPSAK No. 7: Revocation of PSAK No. 44: Accounting for Real Estate Development Activities
 - PPSAK No. 10: Revocation PSAK No. 51: Accounting for Quasi – Reorganization

Implementation of ISAK No. 21 and PPSAK No. 7 has been postponed until a date to be determined later by letter No. DSAK-IAI No. 0643/DSAK/IAI/IX/2012 dated 21st September, 2012

Significant revisions to these standards were made based on the International Financial Reporting Standard (IFRS 2009) that became effective and implemented for financial statements in 2013.

In addition, in 2013, FSA has revised Regulation VIII.G.7 concerning the Presentation and Disclosure of Financial Statements from Issuers and Public Companies through BAPEPAM-LK Head Directive No: KEP-347/BL/2012 dated 25th June, 2012. This policy was revised to provide legal certainty for issuers and public companies with regard to the presentation and disclosure of financial statements in adjustment to the application of the revised PSAK. Through this improved regulation, it allows easier implementation of the relevant revised PSAK standards by entities and lowers the risk of non-compliance with the revised standards.

Litigation Case and Important Matters

Litigation Case and important matters faced by Bakrieland throughout year 2013 were:

1. Lawsuits to PT Bakrieland Development Tbk ("BLD") that is the Civil Case registered in District Court South Jakarta in register number: pp Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel in the case between Igan Bismayudha Dkk as the Plaintiffs against BLD as the Defendant 1 and Mr. Hiramshyah Sambudhy Tahib (ex-President Director of BLD) as the Defendant 2 based on the Letter of Lawsuits dated 13th February, 2013 from Sihaloho & Salim Law Office ("the Defendant's Attorney");

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

2. Tuntutan hukum kepada BLD yaitu tuntutan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("PKPU") di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 September 2013 dengan register perkara No.53/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST dalam perkara antara The Bank of New York Mellon – Cabang London selaku Trustee melalui kuasa hukumnya Soemadipraja & Taher ("Pemohon PKPU") melawan BLD ("Termohon PKPU") berdasarkan Surat Permohonan PKPU tanggal 29 Agustus 2013.

Rencana Tahun 2014

Untuk meningkatkan penerapan GCG di Perusahaan, Bakrieland akan terus menyempurnakan kebijakan dan praktik-praktik GCG melalui internalisasi GCG kepada seluruh pemangku kepentingan, mendayagunakan komite-komite yang ada baik di tingkat Direksi maupun Dewan Komisaris, dan menyempurnakan sistem dan implementasi manajemen risiko. Kelengkapan dalam pengungkapan GCG pada laporan tahunan juga menjadi salah satu prioritas Bakrieland demi memelihara keterbukaan kepada para pemangku kepentingan.

Pemeringkatan Tata Kelola Perusahaan

Penghargaan Penilaian Indeks Persepsi Tata Kelola Perusahaan – Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)

Pada tahun 2013 Bakrieland kembali ikut serta dalam indeks pemeringkatan GCG dengan tema "GCG dalam Perspektif Pengetahuan" yang diselenggarakan oleh IICG dan majalah SWA (Corporate Governance Perception Index/CGPI). Metode penilaian meliputi 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Pengumpulan dokumen yang diperlukan kepada panitia
2. Penyebaran kuesioner *self assessment* kepada pihak internal dan eksternal
3. Penyusunan makalah
4. Observasi oleh Panitia CGPI 2013 dengan mengundang seluruh Direksi, perwakilan Dewan Komisaris, dan Manajemen.

2. Lawsuits to BLD that is the demands Request Suspension of Debt Payments (Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang – PKPU) in the Commercial Courts at the District Court Center Jakarta on 2nd September, 2013 with register number 53/PDT.SUS/PKPU/2013?PN. NIAGA JKT.PST in the case between The Bank of New York Mellon – London Branch as the Trustee through the power law Soemadipradja & Taher ("The Applicant of PKPU") against BLD ("The Defendant of PKPU") based on the PKPU Petition dated 29th August, 2013.

Plans for 2014

To enhance GCG implementation in the company, Bakrieland shall consistently strive to improve GCG policies and practices through GCG internalization to all stakeholders, make the most of committees established at the BOD and BOC levels, and fine-tune the risk management system and its implementation. Comprehensiveness in GCG disclosure in annual reports is a Bakrieland priority in order to maintain a culture of openness and transparency toward stakeholders.

Corporate Governance Assessment

Corporate Governance Perception Index (CGPI)-Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)

In 2013, Bakrieland yet again participated in the GCG perception index on the theme "GCG in a Knowledge Perspective" organized by IICG and SWA magazine (Corporate Governance Perception Index/CGPI). The assessment method covers 4 (four) stages:

1. Gathering documents required by the ratings committee
2. Distribution of self-assessment questionnaire to internal and external parties
3. Preparation of the required papers
4. Observation by the CGPI 2012 committee by inviting all Board of Directors, representatives from the Board of Commissioners and Management.

Terdapat 11 (sebelas) aspek penilaian yang dinilai oleh panitia CGPI, yaitu komitmen; transparansi; akuntabilitas; tanggung jawab; independensi; keadilan; kompetensi; kepemimpinan; strategi; etika; dan manajemen pengetahuan. Pada tahun 2013, Bakrieland meraih peringkatnya sebagai perusahaan 'Cukup Terpercaya' dari 42 (empat puluh dua) perusahaan yang menjadi peserta.

Penghargaan dan Sertifikasi

Berbagai penghargaan dan pengakuan lain yang diterima dalam hal tata kelola perusahaan mencerminkan upaya Bakrieland untuk secara terus menerus meningkatkan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.

Beberapa penghargaan dan sertifikasi yang berhasil didapatkan Bakrieland dapat dilihat pada halaman 48, salah satunya adalah Bakrieland berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2008 tanpa adanya temuan yang bersifat major dan minor.

The CGPI committee assesses 11 (eleven) key aspects: commitment; transparency; accountability; responsibility; independence; fairness; competence; leadership; strategies, ethics; and knowledge management. In 2013, Bakrieland succeeded in maintaining its position as a 'Fair Trusted' company from 42 (forty two) participating companies.

Recognition and Certification

A range of awards of appreciation and other forms of recognition earned by Bakrieland concerning corporate governance reflects serious company efforts to continually heighten its adherence to GCG principles.

Several awards and certifications that Bakrieland has received are presented in pages 48, one of them is that Bakrieland managed to maintain ISO 9001:2008 certification in the absence of minor and major findings.

Manajemen Risiko & Kepatuhan Risk Management & Compliance

Bakrieland menerapkan manajemen risiko yang efektif sebagai usaha untuk meminimalisasi risiko serta bagian dari implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

Bakrieland applies effective risk management as an effort to minimize risks, and as an integral part of the implementation of good corporate governance.

Setiap proses bisnis yang dilakukan perusahaan akan mempunyai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen Risiko merupakan sebuah cara yang sistematis untuk mengelola risiko dan menentukan penanganan risiko tersebut dengan tepat. Manajemen risiko juga merupakan sarana untuk mengidentifikasi sumber dari risiko dan ketidakpastian serta memperkirakan dampak yang ditimbulkannya. Manajemen Risiko yang efektif merupakan usaha untuk meminimalisasi risiko tersebut serta merupakan salah satu bagian dari implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai upaya memenuhi kedua tujuan tersebut, maka Divisi Corporate Risk Management & Compliance (RMC) Bakrieland mengelola risiko melalui *Transaction Based Risk Management*. Selain itu, Divisi RMC Bakrieland juga berfungsi sebagai Penyusun dan *Reviewer* Kebijakan, pengelola *Task Monitoring System* (TMS), dan sebagai *Quality Management Representative* (QMR) untuk penerapan, pelaksanaan, dan pengawasan ISO 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu, serta implementasi dan penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Transaction Based Risk Management

Transaction Based Risk Management merupakan metode lain yang digunakan Bakrieland untuk mengelola risiko. Pengelolaan risiko ini dilakukan dengan penelaahan komprehensif terhadap setiap proposal investasi, rencana

Every business initiative undertaken by a company entails risks that might affect the company's ability to reach its goals. Risk management involves pinpointing any potential risks, and the possible impact that they might have on the company. In addition, risk management encompasses formulating the most effective ways of mitigating any identified sources of potential problems. Effective risk management is regarded as an integral part of the implementation of good corporate governance.

In order to help fulfill company objectives, Bakrieland's Corporate Risk Management & Compliance (RMC) division utilizes the Transaction-Based Risk Management approach to mitigate risks. Furthermore, the RMC division also functions as a Policy Maker and Reviewer, Task Monitoring System (TMS) administrator and Quality Management Representative (QMR) responsible for the application, implementation and supervision of ISO 9001:2008 on Quality Management System, as well as the implementation of good corporate governance.

Transaction-Based Risk Management

The Transaction-Based Risk Management method, adopted by Bakrieland, involves a comprehensive review of every investment proposal, business development plan, loan, guarantee, agreement/contract, divestment, report and any

pengembangan usaha, pinjaman, penjaminan, *review* perjanjian/kontrak, divestasi, laporan kepada regulator, dan keputusan strategis lainnya baik dari induk Perusahaan maupun dari unit-unit usaha. *Transaction Based Risk Management* bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi agar tujuan transaksi dapat tercapai secara maksimal. Setiap transaksi, rencana maupun keputusan strategis lainnya terlebih dahulu mendapatkan tinjauan dan rekomendasi dari Divisi RMC, sebelum akhirnya diajukan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. Selama tahun 2013, Divisi RMC telah menyelesaikan tinjauan terhadap 209 (dua ratus sembilan) transaksi yang terdiri dari proposal proyek, transaksi perbankan, kontrak/perjanjian, investasi, divestasi, dan lain-lain.

other strategic decision of the parent company or a business unit. The goal of this approach is the timely identification of risks and the provision of mitigation recommendations to ensure the optimal achievement of transaction-related objectives. The RMC division has been tasked with reviewing every transaction, plan and strategic decision before making the appropriate recommendation to the management. Throughout 2013, RMC has completed reviews of 209 (two hundred and nine) transactions consisting of project proposals, banking transactions, contracts/agreements, investments, divestments, among others.

Transaction Based Risk Management Selama Tahun 2013 | Transaction-Based Risk Management In 2013

	Bagian Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
Directorate	Corporate Affairs	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	Corporate Human Capital	-	1	6	3	1	-	-	-	-	1	-	-	12
	Corporate Secretary & Legal	12	10	15	15	14	9	8	2	14	9	5	17	130
Division	Corporate Finance & Treasury	-	1	-	1	-	2	-	-	-	5	2	1	12
	Corporate Accounting	1	1	2	1	2	3	6	1	6	10	3	1	37
	Corporate Business Development	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Corporate IT	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	7
	Corporate Investor Relation	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	1	-	8
Sampai dengan 31 Desember														209

Perbandingan tinjauan dan rekomendasi melalui pendekatan *Transaction Based Risk Management* tahun 2012 dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

A comparison of the reviews and recommendations according to Transaction-Based Risk Management for 2012 and 2013 is provided below:

Keterangan	2012	2013	Remarks
Tinjauan dan rekomendasi melalui pendekatan <i>Transaction Based Risk Management</i>	155 transaksi / transaction	209 transaksi / transaction	Review and recommendations through Transaction Based Risk Management approach

Manajemen Risiko & Kepatuhan

Risk Management & Compliance

Setelah *Transaction Based Risk Management* dilaksanakan oleh Divisi RMC, maka Divisi Corporate Internal Audit melakukan audit berbasis risiko, yang dapat memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap efektivitas proses manajemen risiko, termasuk di dalamnya evaluasi dan strategi pengendalian risiko. Evaluasi dilakukan atas seluruh rangkaian proses manajemen risiko, sehingga menghasilkan suatu rekomendasi yang berguna bagi proses pembaruan pengendalian risiko berikutnya.

Kepatuhan

Budaya kepatuhan merujuk kepada nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku.

Kepatuhan adalah bagian dari pelaksanaan manajemen risiko dan merupakan aspek penting dalam menjalankan usaha untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional serta menjaga reputasi perusahaan sebagai warga korporasi yang baik. Setiap karyawan wajib memahami dan secara bertanggung jawab melaksanakan seluruh ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap fungsi operasional yang dijalankannya. Ketidakepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat berakibat teguran dari pihak regulator sehingga berpengaruh terhadap reputasi perusahaan.

Sebagai salah satu bentuk penerapan aspek kepatuhan, sejak tahun 2009 Bakrieland telah menerapkan *Task Monitoring System* (TMS). Penerapan TMS bertujuan untuk dapat meminimalisir risiko dan meningkatkan kelancaran kegiatan operasional.

Selama tahun 2013, masing-masing divisi semakin aktif melakukan tindak lanjut atas *task monitoring*. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya peningkatan partisipasi dan kesadaran terhadap pelaksanaan kepatuhan dan ketertiban administrasi dari setiap divisi, sebagai berikut:

Keterangan	2012	2013	Remarks
Total dokumen <i>monitoring</i>	1,754 dokumen	1,364 dokumen	Total of monitoring documents
Jumlah dokumen <i>monitoring</i> yang ditindaklanjuti	1,109 dokumen	1,276 dokumen	Number of followed-up monitoring documents

Penyusun & Reviewer Kebijakan

Fungsi lain Divisi RMC adalah sebagai penyusun dan *reviewer* kebijakan, hal ini berhubungan erat dengan pelaksanaan manajemen risiko. Dengan adanya kebijakan-kebijakan Perusahaan, maka jalannya operasional Perusahaan menjadi lebih tertib, disiplin dan terarah sehingga dapat meminimalisir risiko yang dihadapi Perusahaan.

Following RMC's implementation of the Transaction-Based Risk Management method, the Corporate Internal Audit Division performs a risk-based audit in order to provide constructive input and oversee the effectiveness of the risk management process, including the risk assessment and mitigation strategy. In a nutshell, the division is responsible for the evaluation of the whole risk management process and the formulation of practical recommendations for future improvements.

Compliance

A culture of compliance refers to the values, behaviors and actions that encourage the adherence to the prevailing laws and regulations, as well as company rules and policies.

Compliance is a part of the implementation of risk management and an essential element for the smooth running of business operations and maintaining the company's reputation as a good corporate citizen. Every employee has the obligation to fully understand, and appreciate, the importance of following the applicable policies and regulations. Failure to comply with existing laws and regulations is likely to lead to a reprimand, which might have a negative effect on the company's reputation.

In 2009, Bakrieland has adopted the Task Monitoring System (TMS) as a part of the company's effort to ensure compliance. TMS is applied to both mitigate risks and improve the general running of the company's operations.

In 2013, each of the company's divisions became increasingly more involved in task monitoring activities. This has been reflected in each division's increased awareness of the importance of administrative compliance as demonstrated below:

Policy Maker & Reviewer

Another function of the RMC division is to formulate and review policies that are closely related to the implementation of risk management. Adhering to policies will mitigate risks by ensuring that the company's operations proceed in an orderly, disciplined and focused manner.

Pencapaian 2013

Sepanjang tahun 2013, kegiatan yang dilakukan Divisi RMC adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menyesuaikan kebijakan *Financial Authorization Approval* (FAA) sejalan dengan adanya perubahan, antara lain perubahan struktur organisasi dan perubahan persyaratan lainnya.
2. Menyempurnakan Standard Operating Procedures (SOP).
3. Melakukan kajian atas transaksi-transaksi perbankan, investasi, divestasi, laporan regulator dan kontrak/perjanjian, baik dari induk Perusahaan maupun unit usaha.
4. Melanjutkan implementasi TMS yang dapat meningkatkan proses kerja operasional Perusahaan.
5. Re-sertifikasi ISO 9001:2008 dari Badan Sertifikasi SGS Indonesia untuk 2 (dua) kali masa *surveillance*, yaitu pada bulan Februari dan September 2013.
6. Mendapatkan predikat 'Cukup Terpercaya' pada indeks pemeringkatan tata kelola perusahaan tahun 2013 (Corporate Governance Perception Index – CGPI 2012) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bersama majalah SWA dengan tema "GCG Dalam Perspektif Pengetahuan."

Risiko Usaha dan Antisipasi

Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Bakrieland dan anak perusahaannya antara lain:

Risiko Finansial

1. Risiko Mata Uang
Merupakan risiko kerugian pada saat terjadinya apresiasi atau depresiasi mata uang asing yang disebabkan oleh adanya posisi transaksi yang masih terbuka. Kinerja keuangan Bakrieland dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Karena penggunaan beberapa komponen dalam konstruksi bangunan diimpor dari luar negeri, maka naiknya nilai tukar mata uang asing dapat meningkatkan biaya konstruksi dan mengurangi tingkat laba, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan Bakrieland. Untuk mengurangi risiko atas perubahan mata uang asing, Bakrieland menerapkan kebijakan *hedging*, yaitu dengan mengurangi pinjaman dalam mata uang asing serta mengutamakan penggunaan material bangunan produksi dalam negeri.

Achievements in 2013

Throughout 2013, the RMC division has conducted the following activities:

1. Reviewed and modified the Financial Authorization Approval (FAA) policies in line with any changes that have taken place, such as changes to the organizational structure and in other requirements.
2. Refined the Standard Operating Procedures (SOP).
3. Reviewed banking transactions, investments, divestments, regulator reports and contracts/agreements made by the parent company and the business units.
4. Continued the implementation of TMS to improve the company's operating processes.
5. Achieved the re-certification of ISO 9001:2008 from the SGS Indonesia Certification Board for 2 (two) surveillance timeframes, in February and September 2013.
6. Earned a position in the 'Fair Trusted' category of the Corporate Governance Perception Index (CGPI 2012) organized by the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) in cooperation with SWA magazine under the theme "GCG in a Knowledge Perspective."

Business Risks and Risk Anticipation

Business risks affecting Bakrieland and its subsidiaries include:

Financial Risks

1. Currency Risk
Currency risk is a risk of loss that occurs in the event of appreciation or depreciation in the value of foreign currency. The financial performance of Bakrieland can be affected by any changes in the value of the rupiah against foreign currencies. Due to the use of a number of imported components in construction, the rise in foreign currency exchange rates could potentially increase construction costs and reduce the rate of profit, affecting the financial performance of Bakrieland. To mitigate the risks associated with foreign exchange fluctuations, Bakrieland prioritizes the use of domestic construction materials and reducing rupiah denominated loans.

Manajemen Risiko & Kepatuhan Risk Management & Compliance

2. Risiko Suku Bunga

Merupakan risiko yang timbul akibat fluktuasi tingkat suku bunga pinjaman. Risiko ini akan sangat berdampak pada besarnya pembiayaan yang diperlukan oleh unit usaha. Fluktuasi tingkat suku bunga dan kebijakan bank kreditur dalam menangani masalah ini berada di luar kendali Bakrieland. Dengan kenaikan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh kreditur, maka biaya yang dikeluarkan akan meningkat sehingga mempengaruhi kegiatan operasional dan kinerja keuangan Bakrieland dan unit usaha. Untuk mengurangi dampak risiko perubahan tingkat suku bunga, Bakrieland melakukan metode pembayaran bertahap dengan jangka waktu yang lebih panjang ataupun pinjaman dengan bunga tetap.

3. Risiko Kredit

Pada dasarnya, sistem penjualan di Bakrieland dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu penjualan melalui kredit perbankan (KPR/ KPA), penjualan tunai langsung, dan penjualan tunai bertahap. Risiko kredit yang merupakan risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan/ atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya muncul pada sistem penjualan tunai bertahap dan sistem pembayaran dengan cara mengangsur seperti yang diterapkan pada kredit rumah/ apartemen dari perbankan. Untuk mengurangi dampak risiko ini, Bakrieland sangat selektif dalam memberikan kredit dengan sistem penjualan tunai bertahap kepada konsumennya, dimulai dari strategi penetapan uang muka, pemilihan segmen pasar hingga pemenuhan persyaratan-persyaratannya.

Risiko Pasar

Pangsa pasar yang cukup besar dan tumbuh secara signifikan menjadi daya tarik bagi pihak lain untuk ikut berkecimpung ke dalam industri yang sama dengan anak perusahaan. Situasi ini memberikan dampak pada meningkatnya persaingan usaha dan kemungkinan terjadinya kelebihan pasokan di pasar, sehingga para pemasok properti berlomba-lomba mendapatkan konsumen sebanyak mungkin dengan berbagai penawaran yang menarik.

Faktor persaingan usaha dalam industri properti yang ketat dan beragamnya konsep yang ditawarkan oleh pesaing berpotensi mengurangi permintaan atas produk-produk Bakrieland. Untuk

2. Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk arising from fluctuations in interest rates. This risk will greatly affect on the necessary financing amount needed by the business units. The variability in loan interest rates will profoundly affect the amount of funding required by a business unit. The rise or fall in interest rates, and policies imposed by creditor banks in dealing with this issue, are beyond the control of Bakrieland. Increases in interest rates set by creditors will result in greater incurred costs and consequently have a bearing on the operational activities and financial performance of both Bakrieland and its subsidiaries. To minimize the potential impact of risks related to interest rate fluctuations, Bakrieland has adopted the strategy of deferred payment method with a longer duration or entering into fixed-interest loans.

3. Credit Risk

Bakrieland's sales system can be grouped into 3 (three) categories: sales through bank credits (mortgages/ apartment loans); direct cash sales; and deferred cash sales. Credit risk is an issue when it comes to deferred cash sales schemes and installment payment plans, such as mortgage/apartment loans from banks, due to the possibility of repayment failure by consumers. To lower this risk, Bakrieland is very selective in issuing credit through the deferred cash sales scheme to its customers; starting from its strategy in determining advance payment, assessing eligibility for market segment selection to the fulfillment of requirements.

Market Risk

An industry that demonstrates significant growth might attract other parties trying to capture a share of the market, subsequently reducing the profits of the companies involved. Such circumstances usually intensify business competition, and create the possibility of excess market supply, forcing property suppliers to compete with each other for customers by offering various attractive packages.

Fierce business rivalry in the property industry, and the wide array of products offered by competitors, might lower the demand for Bakrieland's products. To minimize the risk of this

mengantisipasi hal ini, Bakrieland selalu mengeluarkan produk yang inovatif sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dan memfokuskan pengembangan pada proyek-proyek yang telah memiliki kinerja yang telah terukur selama ini.

Risiko Operasional

1. Risiko Kinerja Anak Perusahaan
Sebagai induk perusahaan non-operasional, penghasilan dan laba operasi Perusahaan merupakan kontribusi dari kinerja keuangan anak perusahaan, sehingga Perusahaan memiliki ketergantungan terhadap anak-anak perusahaan. Faktor-faktor yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan unit usaha diantaranya adalah ketidakmampuan memenuhi target yang ditetapkan, kondisi makro ekonomi yang tidak stabil, kerugian usaha dan sebagainya. Penurunan kegiatan usaha dan penghasilan anak perusahaan secara langsung akan menurunkan tingkat penghasilan Perusahaan. Menyikapi kondisi ini, Bakrieland secara aktif melakukan pemantauan dan pengelolaan terhadap unit usahanya dengan cara melakukan seleksi ketat terhadap seluruh kontraktor, menerapkan sistem usaha yang baik untuk mengurangi risiko bisnis, sekaligus secara aktif memperbaharui informasi dan memperkuat akuntabilitas untuk pengambilan keputusan bisnis di lingkungan unit usaha. Disamping itu, Bakrieland juga telah memiliki Kebijakan Sirkulasi Review Transaksi dan Dokumen yang dapat memudahkan manajemen dalam proses pengambilan keputusan terhadap proyek baru yang akan dijalankan oleh unit usaha. Salah satu acuan dalam persetujuan terhadap proyek adalah penetapan Internal Rate of Return (IRR) > 20%.
2. Risiko Usaha
Bakrieland sebagai perusahaan properti yang terintegrasi mempunyai lini bisnis yang beragam dalam bidang landed residential, kondominium, perkantoran, hiburan, rekreasi dan pusat perbelanjaan. Faktor keberagaman usaha tersebut menimbulkan dampak pada meningkatnya risiko usaha. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, dalam memulai pengembangan usahanya Bakrieland selalu menerapkan evaluasi yang seksama dan melakukan uji tuntas dengan penetapan IRR yang sangat ketat.

happening, Bakrieland constantly strives to release new and innovative products, and focuses on taking up projects with proven and measurable performance.

Operational Risks

1. Subsidiary Performance Risk
As a non-operational parent company, Bakrieland's profit is dependent on the financial performance of its subsidiaries. Consequently, a decline in business activities and the income of Bakrieland's subsidiaries will directly lower the company's profits. Factors that might negatively affect the financial performance of Bakrieland's subsidiaries include the inability to meet predetermined targets, unstable macroeconomic conditions and business losses. To mitigate this risk, Bakrieland actively monitors and manages all of its subsidiaries in areas such as contractor selection, effective risk minimization and general business decision-making. In addition, Bakrieland has established an Investment Committee, which is directly accountable to the Board of Directors, responsible for conducting feasibility studies before giving approval for new projects. One of the rules of thumb in approving projects is that IRR is set at above 20%.
2. Business Risk
As an integrated property developer, Bakrieland is involved in various lines of business including developing and selling houses, condominiums, office buildings and shopping centers. The diversity of the company's operations further expands its business risks. Anticipating these risks, Bakrieland thoroughly evaluates new projects, applying due diligence in determining the IRR. The Investment Committee takes part in the evaluation and approval of every business development undertaken by the business units.

Manajemen Risiko & Kepatuhan Risk Management & Compliance

3. Risiko Sistem & Teknologi

Risiko sistem & teknologi timbul sebagai akibat adanya proses penyimpangan atau ketidaksesuaian sistem dan teknologi dalam operasional Perusahaan. Kompleksitas sistem yang belum terintegrasi penuh antara induk perusahaan dan anak perusahaan dapat menimbulkan gangguan terhadap sinkronisasi bisnis satu sama lain. Bakrieland meminimalisir masalah ini dengan menetapkan bahwa anak perusahaan mengacu kepada kebijakan penetapan sistem dan teknologi sesuai dengan induk perusahaan.

Risiko Sumber Daya Manusia (SDM)

Risiko SDM berkaitan dengan penyimpangan hasil dari tingkat produktivitas yang diharapkan karena adanya variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja. Sebagai perusahaan besar yang mengelola jumlah tenaga kerja yang banyak dengan berbagai macam latar belakang usia dan pendidikan, Bakrieland akan mengalami tantangan dalam mencapai tujuan Perusahaan jika SDM tersebut tidak dikelola dengan baik. Indikator keberhasilan pengelolaan SDM di Bakrieland dapat dilihat antara lain dari tingkat produktivitas yang tinggi, tingkat pergantian karyawan yang rendah, serta tingkat absensi yang rendah.

Dalam mengelola risiko SDM, Bakrieland selalu menempatkan sumber daya manusia sebagai aset utama dalam mencapai tujuan Perusahaan. Usaha yang telah dilakukan, antara lain selalu mengadakan penilaian kinerja karyawan berbasis dua arah antara atasan dan bawahan, dan memberikan remunerasi yang kompetitif dengan perusahaan lain dalam industri yang sama untuk menjaga rendahnya tingkat pergantian karyawan.

Risiko Eksternal

1. Risiko Lingkungan, Sosial dan Politik

Risiko lingkungan, sosial dan politik yang timbul dalam pengembangan properti dapat terdiri dari berbagai jenis, diantaranya peraturan pemerintah tentang pembatasan kepemilikan properti oleh warga negara asing, aturan perpajakan, bencana alam, kejahatan dan terorisme yang seluruhnya berada di luar kendali Perusahaan. Bakrieland selalu berusaha memenuhi ekspektasi seluruh pemegang kepentingan sebelum memulai suatu proyek. Melalui

3. Systems & Technology Risk

Systems and technology risks can arise as a result of an inconsistency or an incompatibility within company operations. For instance, a complex system that has yet to be fully integrated can create disruptions in the streamlining of business activities of the parent company and its subsidiaries. Bakrieland endeavors to mitigate this risk by ensuring that its subsidiaries adhere to the company guidelines, which state that the subsidiaries' systems and procedures must conform to the ones used by the parent company in terms of policies and technology.

Human Resources Risk

Human resources risk is associated with any outcomes that deviate from the expected productivity level due to the interplay of human variables that affect work productivity. As a large corporation that manages a sizeable number of employees from diverse age groups and educational backgrounds, Bakrieland faces certain challenges in achieving company goals, which include high productivity, low employee turnover and low absenteeism rates.

In managing its human resource risk, Bakrieland at all times treats its employees as valuable assets essential to the fulfillment of the company goals. Some of the strategies used by Bakrieland to ensure that the company's employees feel that they are a significant part of the enterprise include: participatory employee assessments that involve both the supervisor and the employee, and competitive remuneration to ensure low employee turnover.

External Risks

1. Environmental, Social, and Political Risks

Environmental, social and political risks in the area of property development vary, but can involve government laws on restrictions to foreign ownership of property, tax regulations, natural disasters, criminal offenses and terrorism; all of which are beyond the control of the company. Bakrieland spares no effort to reassure, and meet the expectations of, all the stakeholders prior to the commencement of a project. Through the implementation

implementasi standar-standar terbaik dan terencana, risiko-risiko yang mungkin timbul dapat diminimalisasi dengan tetap memperkirakan force majeure yang mungkin terjadi. Seluruh proyek diasuransikan, serta senantiasa memperhatikan faktor lingkungan sehingga terjadi keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

2. Risiko Hukum

Dalam hubungan bisnis antara induk perusahaan dan anak perusahaan dengan pihak ketiga terdapat potensi timbulnya sengketa atau perkara hukum yang dikarenakan kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum atau tiadanya undang-undang yang mendukung. Dalam hal kondisi tersebut terjadi dan bernilai material, maka dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan pencapaian target laba Perusahaan. Selanjutnya, adanya perubahan kebijakan hukum yang ditetapkan oleh regulator yang harus dipatuhi oleh obyek hukum, juga dapat memberikan risiko hukum bagi Perusahaan. Untuk meminimalisir dampak risiko hukum, Bakrieland secara seksama mengikuti semua peraturan yang berlaku, dan memastikan bahwa setiap proyeknya telah memenuhi seluruh unsur hukum. Segala risiko tuntutan hukum masyarakat terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi telah diminimalisir melalui pemenuhan seluruh persyaratan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penanganan dampak lingkungan.

3. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan potensi hilang atau hancurnya nama baik Perusahaan akibat adanya publikasi negatif atau penerimaan lingkungan eksternal yang rendah, yang disebabkan ketidakmampuan perusahaan dalam mengambil tindakan terhadap isu eksternal yang terkait dengan Perusahaan dan ketidakmampuan dalam mengelola komunikasi dengan pihak eksternal yang berkepentingan, sehingga dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Perusahaan. Bakrieland selalu melakukan pencitraan terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh unit usaha dengan citra merek 'Bakrieland'. Disamping itu, Bakrieland juga selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat luas maupun masyarakat sekitar dimana suatu proyek dibangun, baik melalui program CSR maupun partisipasi dalam berbagai proyek atau kegiatan masyarakat sekitar. Hubungan dengan publik dan media juga selalu dibina melalui Corporate Affairs.

of the company's set standards, potential risks can be anticipated and mitigated. All of the Bakrieland's projects are insured, and take into account environmental factors, striking a balance between development and environmental conservation.

2. Legal Risk

Business relations between the company and the business units, and third parties have the potential of resulting in conflict or even a legal case. In the event that this should happen, the company's business activities, and achievement of profit targets, might be negatively affected. In addition, changes in legal policies that all involved parties have to comply with might present a potential legal risk for the company. To mitigate any possible legal risk, Bakrieland conscientiously abides by all prevailing government laws and regulations, and ensures that every project meets all legal requirements. The company's compliance with all government requirements, including those pertaining to the environment, mitigates the risk of any possible legal action being initiated against the company.

3. Reputation Risk

Reputation risk is the potential of any loss or damage to the company's image and reputation as a result of a negative publication, or low evaluation, of the company by external parties. This evaluation might be due to the inability of the company to undertake measures in response to external issues involving the company or due to the company's failure to appropriately manage communication with relevant external parties, hence inciting an unfavorable perception of the company. Bakrieland consistently projects the positive 'Bakrieland' image in the branding of products offered by its business units. In addition, Bakrieland also strives to maintain a harmonious relationship with the public, and the communities in a close proximity to its development project, either through its Corporate Social Responsibility programs or participation in various community projects and activities. Bakrieland's relations with the public, as well as its media relations, are managed by its Corporate Affairs division.

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS PENGENDALIAN
INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO**

**STATEMENT LETTER OF THE BOARD OF
DIRECTORS' RESPONSIBILITY ON INTERNAL
CONTROL AND RISK MANAGEMENT**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

The undersigned :

Ambono Janurianto, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan"), suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, Wisma Bakrie 1 Lantai 6 & 7, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut "Yang Membuat Pernyataan".

Ambono Janurianto, acting as President Director and duly authorized on behalf of the Board of Directors of PT Bakrieland Development Tbk ("**Company**"), a Limited Liability Company, located in Jakarta, Wisma Bakrie I, 6th & 7th Floor, Jalan HR Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta Selatan, here onwards referred to as "**Person In Charge of Asserting The Statement**".

Dengan ini menyatakan bahwa :

Hereby states that :

1. PT Bakrieland Development Tbk selama tahun 2013 telah menerapkan suatu sistem manajemen risiko yang sehat dan memenuhi aturan dalam pengendalian internal Perseroan serta melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi
2. Selain itu, pengelolaan manajemen risiko Perseroan dan pemenuhan aturan serta sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam seluruh aspek yang material.

1. PT Bakrieland Development Tbk during the year 2013, has implemented a risk management system in satisfactory and in compliance to the regulations over the Company's internal control and has applied policies setforth by the Board of Directors.
2. Additionally, the management of the Company's risk management and regulatory compliance as well as the internal control system have been implemented effectively and efficiently in all material aspects.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya guna memenuhi prinsip tanggung jawab dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik di Perseroan.

This Statement Letter is made in sincerity to comply with the principle of responsibility within the Company's Good Corporate Governance.

Jakarta, 1 Februari 2014

PT Bakrieland Development Tbk



Ambon Janurianto

President Director & CEO

Audit Internal Internal Audit

Kegiatan audit internal akan mendorong terciptanya efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan yang baik.

Bakrieland's effective internal audit process will lead to the establishment of the company's risk management, control and good corporate governance.

Audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008, perusahaan publik wajib membentuk unit Audit Internal dan piagam Audit Internal yang antara lain menjelaskan tentang struktur dan kedudukan unit Audit Internal, tugas dan tanggung jawab unit Audit Internal, wewenang unit Audit Internal, kode etik Audit Internal, persyaratan auditor yang duduk dalam unit Audit Internal, pertanggungjawaban unit Audit Internal, dan larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor dan pelaksana yang duduk dalam unit Audit Internal dari pelaksana kegiatan operasional perusahaan maupun unit usaha.

Dalam menjalankan kegiatannya, Audit Internal memiliki wewenang dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi dan rapat dengan Komite Audit dan Direksi.
3. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

Internal audit is an independent and objective assurance and consulting activity to improve business operations and boost company value through a systematic evaluation and improvement of the effectiveness of risk management systems, controls and governance processes.

Pursuant to Bapepam-LK Head Directive No: Kep-496/BL/2008 of 28 November 2008, a public company must have an Internal Audit unit and a charter that defines the following: the structure, position, authority, accountability, requirements, duties and responsibilities of the Internal Audit unit; the Internal Auditor's code of conduct; the requirements for holding concurrent positions; and the prohibition on assignments and positions geminating auditors and executor who sit on the Internal Audit Unit of the executive operations of the Company and business units.

In undertaking his or her activities, an Internal Auditor has the authority and responsibility to:

1. Access all relevant information about the company in accordance with his or her duties.
2. Communicate with the Audit Committee and the Board of Directors.
3. Coordinate with activities conducted by External Auditors.

Audit Internal

Internal Audit

4. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, serta menerapkan teknik audit.

Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK tersebut, Kepala Corporate Internal Audit Bakrieland bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, dan pengangkatan serta pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.

Piagam Audit Internal

Peran Audit Internal secara umum dalam mendorong praktik Good Corporate Governance (GCG) turut membawa Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menerbitkan Pedoman Umum GCG Indonesia yang dapat digunakan sebagai arahan dan landasan pelaksanaan pengawasan internal dalam praktik GCG. Sedangkan Bapepam-LK mengatur tentang pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit Audit Internal dengan petunjuk pelaksanaan yang dimuat pada peraturan nomor IX.I.7 dan menjadi dasar dalam penyusunan Piagam Audit Internal Bakrieland.

Piagam Audit Internal Bakrieland yang telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan Audit Internal. Piagam Audit Internal kemudian dikomunikasikan kepada karyawan, diharapkan hal ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap visi dan misi Audit Internal dalam mengedepankan manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Audit

Tugas utama Corporate Internal Audit Bakrieland adalah memberikan keyakinan bahwa manajemen risiko, pengendalian, tata kelola perusahaan telah berjalan secara memadai. Agar hal tersebut dapat dicapai, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan manajemen risiko telah sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

4. Determine the scope, focus and schedule of the audit, allocate resources and apply appropriate audit measures.

In compliance with Bapepam-LK regulations, Bakrieland's Head of Corporate Internal Audit reports directly to the President Director. The President Director has the power to appoint and dismiss the Head of Corporate Internal Audit, provided he or she has the approval of the Board of Commissioners.

Internal Audit Charter

Internal Audits in general play a sound role in promoting Good Corporate Governance (GCG), which in turn has also prompted the National Committee on Governance (KNKG) to issue the Indonesian Code for GCG to guide and lay the foundations for effective internal oversight of GCG practices. BAPEPAM-LK regulates the establishment and formulation of an Internal Audit Charter, along with its implementing guidelines, as set out in Regulation No. IX.I.7. Bakrieland's Internal Audit Charter has been drawn up in accordance with the above regulations.

Bakrieland's Internal Audit Charter, which has been approved by the Board of Directors and Commissioners, provides the guidelines for conducting internal audit-related activities. To ensure the effectiveness of corporate internal audits, all employees are familiarized with the Internal Audit Charter which is hoped to broaden their understanding of the vision and mission of the Internal Audit Unit in implementing a reliable risk management system, internal controls and corporate governance mechanisms.

Audit Implementation

Bakrieland's Corporate Internal Audit Unit, first and foremost, seeks to deliver assurance on the effectiveness and adequacy of the company's risk management system, internal controls and corporate governance processes. To this end, the unit takes the following measures:

1. Prepares an annual audit plan, including risk-based audit assignments.
2. Tests and evaluates the internal control and risk management systems, ensuring that they remain compliant with company policies.

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
9. Mengevaluasi ketaatan Perusahaan terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta kebijakan dan prosedur Perusahaan.
10. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan audit.

Audit internal dapat mendorong terciptanya pengendalian sehingga seluruh sumber daya yang ada dalam Perusahaan dapat digunakan secara efisien, ekonomis, efektif, taat azas dan beretika. Pengendalian dalam Perusahaan dapat mendukung terciptanya keyakinan yang memadai bahwa informasi yang dihasilkan atas penggunaan sumber daya tersebut dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan terhadap proses pengelolaan Perseroan.

Pada tahun 2013, kegiatan Corporate Internal Audit Bakrieland adalah memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi terhadap efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Ruang lingkup kegiatan audit tahun 2013 meliputi unit bisnis Bakrieland, yaitu City Property, Landed Residential, dan Hotels & Resorts.

3. Examines and assesses the efficiency and effectiveness of the company's accounting practices, marketing, human resources strategies, information technology processes and other activities.
4. Advises about potential improvements to audit processes at all management levels.
5. Prepares an audit report for the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
6. Monitors, analyzes and reports on the implementation of improvement recommendations.
7. Works with the Audit Committee.
8. Develops programs for evaluating the quality of the internal audit process.
9. Evaluates the company's compliance with existing laws, regulations, policies and procedures.
10. Carries out special assignments associated with the audit process.

An effective internal audit process will lead to the establishment of internal control mechanisms that promote the efficient, effective, economic and ethical use of all company resources in accordance with company values and principles. Internal control mechanisms enhance the reliability of information about the use of company resources, boosting stakeholders' confidence in company management processes.

Bakrieland's Corporate Internal Audit for 2013 focused on providing assurance about the effectiveness of the company's risk management process, internal controls and good governance. The scope of the audit for 2013 covered Bakrieland's business units, namely City Property, Landed Residential and Hotels & Resorts.

Audit Internal

Internal Audit

Bentuk kegiatan tersebut antara lain adalah melakukan audit operasional hotel, proses transaksi *intercompany*, proses serah terima produk serta wahana waterpark.

Rencana kegiatan Corporate Internal Audit di tahun 2014, tetap fokus pada peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Profil Kepala Divisi

Kepala Corporate Internal Audit Bakrieland dijabat oleh Jordan Lubis. Beliau memulai karirnya sejak tahun 1990 pada berbagai institusi keuangan dan property di Indonesia. Selama bergabung di Bakrieland, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Investor dan Pemerintah, Chief Financial Officer di Unit Usaha dan sebagai Corporate Secretary Perusahaan. Lahir di Padang, 7 Oktober 1962, Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Sumatera Utara dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Medan Area. Beliau juga memiliki sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA).

The audit encompassed hotel operations, inter-company transactions, handing over of products and the maintenance of waterpark facilities.

In 2014, Bakrieland's Corporate Internal Audit will continue to focus on improving the effectiveness of company risk management, and maintaining high quality internal controls and good governance processes.

Profile of the Division Head

Bakrieland's Corporate Internal Audit Division is headed by Jordan Lubis. Jordan started building his career in various financial institutions and property companies in 1990. Since joining Bakrieland, he has served as the Division Head for Investor and Government Relations, the Chief Financial Officer of Business Units and the Corporate Secretary. Born in Padang on 7 October 1962, Jordan holds a bachelor's degree in Mechanical Engineering from the University of North Sumatra and in Economics from the Medan Area University. He has also completed the Qualified Internal Audit (QIA) certification.

Corporate Affairs Corporate Affairs

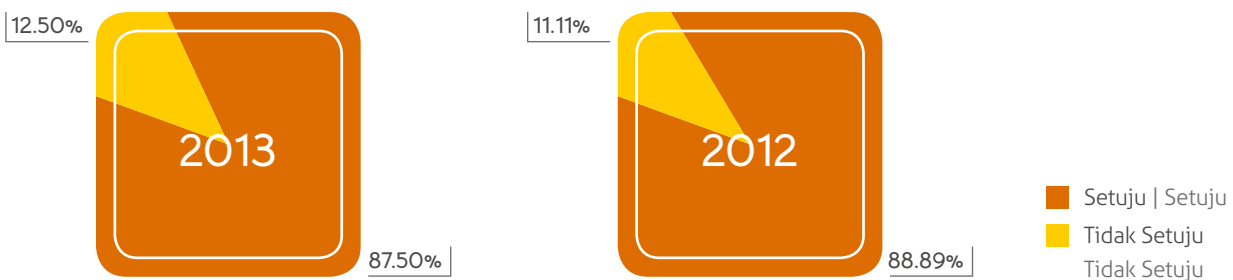
Corporate Affairs menyusun program kerja selaras dengan transformasi Bakrieland kembali ke bisnis inti sebagai pengembang properti terpadu.

Corporate Affairs has prepared a work program in line with transformation of Bakrieland to refocus on its core business as an integrated property developer.

Sebagai perusahaan properti yang mempunyai 3 (tiga) unit usaha dengan beragam pengembangan proyeknya tersebar diberbagai kota besar serta ribuan karyawan, Bakrieland memerlukan suatu sistem pengelolaan informasi dan komunikasi yang terpadu, terencana dan dapat diandalkan. Sistem yang terpadu ini berfungsi untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi antara unit usaha, induk Perusahaan dan Kelompok Usaha Bakrie (KUB). Selain untuk koordinasi di tingkat internal, sistem komunikasi dan informasi yang terpadu dan terencana dibutuhkan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Perusahaan serta meningkatkan *brand awareness* terhadap produk-produk Bakrieland sebagai satu kesatuan utuh, sehingga dapat menunjang peningkatan pemasarannya.

As a property developer that oversees 3 (three) business units -- which run a wide range of development projects dispersed across major cities -- and hires thousands of employees, Bakrieland requires an integrated, strategic and reliable information and communication management system. The function of this integrated system is to optimize coordination and communication between the parent company, the business units and the Bakrie Business Group. Apart from optimizing internal coordination, an integrated and strategic communication and information system is integral to the company's ability to attain its stated vision and mission. A solid communication system can be utilized to enhance brand awareness of Bakrieland's products, ultimately strengthening the company's marketing activities.

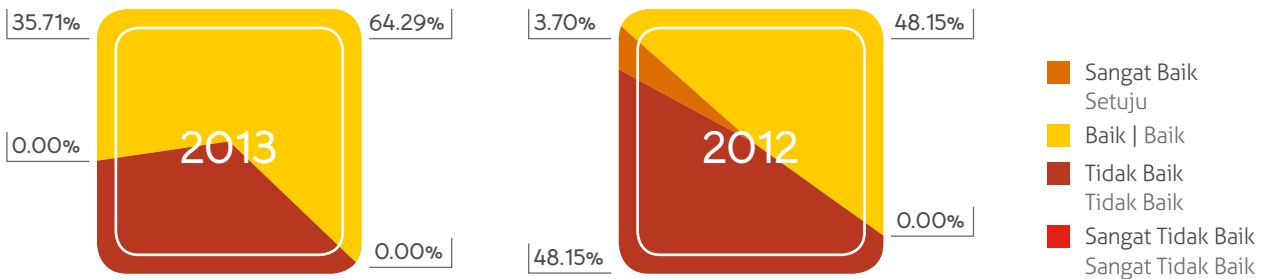
Hasil Media Audit atas Pengembalian Nilai Investasi Produk Bakrieland Result of Media Audit on Bakrieland's Product Return on Investment



Corporate Affairs

Corporate Affairs

Hasil Media Audit atas Ketepatan Waktu Penyelesaian Proyek Bakrieland
Result of Media Audit on Bakrieland's Project Completion Time Schedule



Program komunikasi internal maupun eksternal di Bakrieland dilaksanakan oleh Direktorat Corporate Affairs (CA). CA mengatur alur komunikasi antara Bakrieland, unit usaha dan pihak eksternal agar dapat terjalin lebih lancar dan konsisten sehingga membawa dampak positif bagi citra Perusahaan. Citra positif Perusahaan dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

Pada tahun 2013, CA menyusun program kerja yang selaras dengan transformasi Bakrieland untuk kembali fokus kepada bisnis inti sebagai pengembang properti terpadu. Tema dari kegiatan *corporate communication* yang dijalankan selama tahun 2013 adalah Konsolidasi dan Integrasi agar tercipta Relasi Tanpa Batas antar Produk-Produk Bakrieland. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan agar persepsi publik terhadap Bakrieland sebagai suatu pengembang properti terintegrasi yang solid dan berkelanjutan secara finansial dan ramah lingkungan dapat tetap dipertahankan. Untuk mencapai tujuan *corporate communication* tersebut, CA telah menyusun strategi yang akan dijalankan, yaitu :

- Membuat dan menjaga 'benang merah' dalam *branding* Bakrieland untuk meningkatkan kesadaran terhadap *brand* perusahaan dan produk- produk propertinya agar tercipta citra positif yang berkesinambungan.
- Memperkuat posisi perusahaan dengan melakukan koordinasi antara induk Perusahaan dan unit usaha.
- Melakukan kampanye One Bakrieland.

Both Bakrieland's internal and external communication programs are implemented by the Directorate of Corporate Affairs (CA). The CA manages the communication flow between Bakrieland, the business units and external parties to ensure that business activities proceed in a smooth and consistent fashion, and the company's image remains positive. A solid reputation is important because it allows the company to maintain a relationship with stakeholders that is based on mutual trust.

In 2013, the CA prepared a work program in line with Bakrieland's plan to refocus on its core business as an integrated property developer. The overarching theme for corporate communication activities in 2013 was Consolidation and Integration to Build Borderless Relations Between Bakrieland Products. A good communication strategy is essential to shaping and maintaining public perception of Bakrieland as an environmentally-conscious integrated property developer with a sound and sustainable financial structure. To attain this corporate communication goal, the CA devised the following strategy:

- Create and maintain a 'common thread' in Bakrieland's branding to further build awareness of the company's corporate brands and line of property developments, and to build a positive and lasting company image.
- Strengthen the company's positioning to ensure coordination between the parent company and the business units.
- Launch the One Bakrieland campaign.

Tugas dan Tanggung Jawab Corporate Affairs

Corporate Affairs Bakrieland, yang dibentuk sejak tahun 2010, membawahi Internal Communication (IC), External Communication (EC) dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab tersendiri.

Komunikasi Internal

Sesuai dengan namanya, maka Internal Communication (IC) berfungsi mengelola jalur dan meningkatkan alur komunikasi dalam lingkup internal induk Perusahaan dengan unit usaha dan Kelompok Usaha Bakrie (KUB) melalui media komunikasi, seperti *i-News*, *email & flyer blast*, *e-Newsletter (e-News)*, majalah dinding, situs, materi komunikasi korporasi seperti kartu ucapan dan kalender dalam format cetak maupun elektronik serta cinderamata. Jalur komunikasi juga dilakukan dengan memanfaatkan *website* Perusahaan, baik yang berbasis *web* maupun berbasis *mobile*. IC, dibantu divisi IT, mengelola *website* Perusahaan agar semua informasi terkini mengenai Perusahaan secara terpadu tersedia melalui media tersebut.

Kegiatan 2013

Pejabat *Internal Public Relation* yang mengelola IC, merancang dan melaksanakan kegiatan tahun 2013 yang saling terkait serta memiliki 'benang merah' dengan *branding* Perusahaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar citra positif Bakrieland dan Unit-Unit Usahanya dapat terjaga dengan baik.

Jaringan komunikasi internal Perusahaan telah terbina dengan baik, yang terlihat dari lancarnya arus informasi serta semakin banyaknya pihak yang memanfaatkan media internal untuk berbagai kepentingan. Namun, kegiatan Perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2013 sehingga menyebabkan berkurangnya materi informasi yang didistribusikan.

Untuk menjaga agar komunikasi melalui media internal tetap berjalan, IC mengangkat tema-tema khusus yang dikaitkan dengan eksposur karyawan induk Perusahaan maupun dari Unit Usaha sebagai materinya. Sebaliknya, *direct email blast* serta *website upload* mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pemberitaan tentang Perusahaan tentang terkait isu penjualan aset dan pergantian manajemen.

The Duties and Responsibilities of Corporate Affairs

Established in 2010, the CA oversees the Internal Communication (IC), External Communication (EC) and Corporate Social Responsibility (CSR) divisions of the company, each with its own set of duties and responsibilities.

Internal Communication

As its name suggests, Internal Communication (IC) is responsible for the management, and improvement, of internal communication within the parent company, the business units and the Bakrie Business Group through media such as *i-News*, email, flyer blasts, *e-Newsletters (e-News)*, bulletin boards, websites, souvenirs, as well as corporate communication materials including greeting cards and calendars (both print and electronic). Other communication channels include the company website, either web-based or mobile-based. The IC receives assistance from the IT division in the management of the company website and the publication of up-to-date information about the company.

Activities in 2013

In 2013, the Internal Public Relations Manager who manages the IC division, designed and implemented mutually complementary activities that are in line with the company's branding strategy. These activities have been designed to promote and maintain a positive public image of Bakrieland and its business units.

The company's internal communication system is already well established, as demonstrated by the effective exchange of information and increasing number of users sourcing the available internal communication media. Company activities, however, declined in 2013 leading to the decrease in the dissemination of information.

To maintain effective communication through internal media, the IC raised specific trending topics and issues of high interests that relate to employees of the parent company and business units. On the other hand, the number of email blasts and website uploads increased in line with more news coverage about the company concerning the sale of assets and changes in management.

Corporate Affairs

Corporate Affairs

Laporan Tahunan 2013

244

PT Bakrieland Development Tbk

Sejalan dengan semakin populernya penggunaan teknologi digital dan mengusung semangat 'Bakrieland Goes Green' serta usaha peningkatan efisiensi operasional Perusahaan, maka tahun 2013 Perusahaan memproduksi kartu ucapan dan kalender elektronik (*e-card* dan *e-calendar*) yang digunakan oleh karyawan Bakrieland dan unit usaha. Rancangan grafisnya konsisten dengan 'benang merah' yang terdapat pada rancangan seluruh media internal lainnya yang dihasilkan oleh Bakrieland selalu memiliki benang merah guna menjaga konsistensi identitas perusahaan dan mengacu kepada disain Laporan Tahunan Bakrieland 2012 yang dipublikasikan pada Juni 2013. Materi yang dihasilkan antara lain mencakup *e-newsletter*, kartu cetakan maupun *e-card* serta kalender korporasi, iklan, *backdrop*, *banner* dan *signage* untuk kegiatan RUPS dan *Public Expose* maupun Apresiasi Karya Media (Aryadia).

Rencana 2014

Internal Communication telah menyusun rencana kegiatan komunikasi internal tahun 2014, sebagai berikut :

- Mengeluarkan *i-News*, *MaDing*, *Direct Email Blast*, *e-Newsletter* setiap bulan
- Membuat *Corporate Gifts*

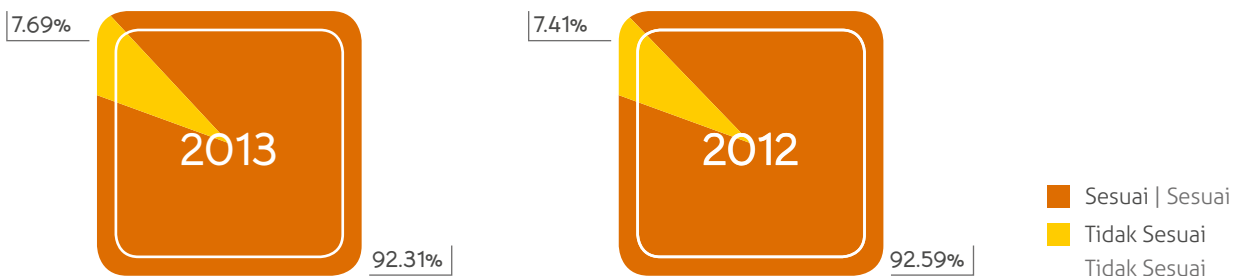
Embracing the increased use of digital technology, and the spirit of 'Bakrieland Goes Green,' while improving operational efficiency, the company produced e-cards and e-calendars for internal use by Bakrieland and business unit employees. The design of those has been kept consistent with the 'common thread' that runs through the rest of the company's internal communication. Bakrieland uses this 'common thread' in order to maintain the consistency of its corporate identity, in keeping with the design of the Bakrieland's 2012 Annual Report published in June 2013. Some of the company's communication materials include e-newsletters, printed cards and e-cards, corporate calendars, advertisements, backdrops, banners, and promotional material for the General Meeting of Shareholders (GMS), the Public Expose and the Aryadia media work recognition events.

Plans for 2014

The IC has drawn up an internal communication plan for 2014 that includes the following:

- Release monthly *i-News*, bulletin board news, email blasts and e-Newsletters.
- Produce corporate gifts.

Hasil Media Audit atas Kualitas Produk Bakrieland sesuai Standar yang Dijanjikan Result of Media Audit on Bakrieland's Product Quality in line with Committed Standards



- Secara berkala melakukan *monitoring* dan memperbarui konten *website* Perusahaan
- Melakukan proses re-design *website* Perusahaan dengan bantuan divisi CIT.
- Memproduksi *e-Card* dan *e-Calendar* 2014.
- Melakukan sosialisasi / kampanye One Bakrieland
- Berpartisipasi dalam ajang Annual Report Award 2013

Komunikasi Eksternal

Seluruh properti Bakrieland memerlukan program komunikasi eksternal terpadu untuk mencapai tujuan komunikasi korporat sesuai misi dan visi perusahaan. Komunikasi eksternal juga harus bisa meningkatkan *brand awareness* setiap produk Bakrieland agar dikenal sebagai satu kesatuan utuh sehingga dapat meningkatkan pemasaran produk-produk Bakrieland.

Tim External Communication (EC) Bakrieland mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- Mengelola komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan melalui media.
- Memberikan bimbingan/saran di bidang komunikasi kepada semua pemangku kepentingan.
- Merumuskan dan menerapkan prosedur yang efektif untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dalam komunikasi baik di tingkat induk Perusahaan maupun unit usaha.
- Mendukung tujuan komunikasi perusahaan secara internal dan eksternal

Kegiatan 2013

Tim EC Bakrieland bertindak sebagai *advisor*, kordinator dan regulator dengan tim Marketing dan *Public Relations* Unit Usaha Bakrieland dalam menjalankan tiap program komunikasi eksternal.

Kegiatan Media (Media Relations)

EC berkoordinasi dengan berbagai divisi baik di Bakrieland maupun di Unit Usaha terkait penyelenggaraan beragam kegiatan yang berhubungan dengan media. Kegiatan komunikasi yang terintegrasi terdiri dari pendekatan *online* dan *offline* serta peningkatan media *relations*. Pendekatan *online* meliputi *strategic news*, *straight news*, *feature article* dan *one-on-one interview* sedangkan pendekatan *offline* meliputi *countering issue*, *strategic stakeholders approach* dan *feeding strategic info*.

- Monitor and regularly update the content of the company's website.
- Redesign the company's website with the help of the Corporate Information Technology division.
- Produce e-Cards and an e-Calendar for 2014.
- Launch the One Bakrieland campaign/awareness building strategy.
- Participate in the Annual Report Award 2013.

External Communication

The management of all Bakrieland properties requires an integrated external communication program. This program helps to achieve corporate communication goals consistent with the company's mission and vision. In addition, external communication helps to build brand awareness of Bakrieland developments, strengthening the marketing of the company's products.

Bakrieland's EC division is responsible for the following:

- Managing media communication between the company and its stakeholders.
- Advising stakeholders about communication strategies.
- Formulating and implementing procedures that facilitate decision-making about communication strategies at the parent company and business unit level.
- Supporting internal and external corporate communication goals.

Activities in 2013

Bakrieland's EC team advises, coordinates and regulates the company's Business Unit Marketing and Public Relations teams concerning all external communication programs.

Media Activities (Media Relations)

The EC works with Bakrieland's divisions and business units to implement a wide range of media-related activities. The integrated communication projects apply both online and offline approaches that seek to enhance media relations. The online approach encompasses strategic news, regular news, feature articles and one-on-one interviews, while the offline approach includes blocking and countering issues, feeding strategic information, as well as strategic stakeholders method.

Corporate Affairs

Corporate Affairs

Selama 2013, rangkaian publikasi oleh media telah membentuk persepsi positif Bakrieland sebagai perusahaan yang kembali ke bisnis inti di bidang properti dan terus mencari inovasi baru di bidang bisnis serta melakukan berbagai aksi korporasi guna memperbaiki kinerja perseroan dalam. Program komunikasi terkait *project delivery* maupun proyek baru mengalami penurunan intensitas. EC lebih banyak melakukan program komunikasi yang terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Perusahaan. Berbagai isu sensitif yang berkaitan dengan kinerja Perusahaan di tahun 2013 menyebabkan tim EC harus berkonsentrasi untuk melakukan upaya persuasif terhadap media agar tidak berkembang menjadi isu besar. Hasil dari konsistensi tim EC dalam menjaga hubungan baik dengan media adalah di tengah sorotan publik terkait kinerja Perusahaan, pemberitaan mengenai Bakrieland masih didominasi berita dengan *tone* positif.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program komunikasi yang telah dijalankan, EC melakukan pengukuran terhadap pemahaman dan persepsi para pemangku kepentingan mengenai Bakrieland melalui media audit. Media audit dilakukan terhadap 40 (empat puluh) koresponden yang berasal dari media cetak (Koran dan majalah) serta media *online* yang berasal dari dalam dan luar negeri. Cakupan pembahasan media audit ini berhubungan dengan: Produk dan Jasa, Isu Strategis, GCG, Aksi Korporasi, dan Efektivitas Program Komunikasi.

Pelaksanaan media audit secara berkala diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai positioning Bakrieland dan unit usaha. Kualitas pemberitaan tentang Bakrieland selama bulan Januari-Desember 2013 dapat dipertahankan pada posisi rata-rata 4.850 yang berada pada level Medium. Nilai PIL ini merupakan peningkatan dari tahun 2012 yang berada pada posisi 4.733. Hal ini mencerminkan bahwa Perusahaan masih dipersepsikan positif oleh media. Secara ringkas, hasil dari media audit 2013 adalah sebagai berikut:

- Aksi Korporasi
Media memiliki persepsi bahwa aksi korporasi dalam bentuk realignment aset dan kembali ke bisnis inti untuk memperbaiki kinerja serta tetap melakukan ekspansi bisnis untuk mendorong performa Perusahaan merupakan langkah yang tepat. Salah satu yang menjadi sorotan positif adalah komitmen Bakrieland terhadap

Throughout 2013, a series of media exposure strategies were employed to build a positive perception of Bakrieland as a company that is refocusing on its core business in the property sector, and that industriously seeks new business innovations while continually improving company performance. The company decreased its focus on communication programs relating to new projects and project delivery. Instead, the EC concentrated on communication-related activities associated with issues affecting the company. Various delicate issues relating to the company's performance in 2013 made it necessary for the EC team to position the media in a specific manner so as to minimize any potential negative press. As a result of the EC team's consistent effort to foster good relations with the media, news coverage of Bakrieland was largely positive in 2013 amid public scrutiny of the company's performance.

To gauge the effectiveness of its communication program, the EC measures the stakeholders' perception of Bakrieland, and the level of understanding of the company's activities, through media audits. In 2013, the media audit process involved 40 (forty) respondents from the print media (newspapers and magazines) as well as domestic and foreign online media. The scope of the media audit covered a range of aspects, including products and services, strategic issues, good corporate governance (GCG), and the effectiveness of the corporate action and communication program.

The media audit, performed annually, is expected to provide insight into the positioning of Bakrieland and its business units. The quality of the news coverage of Bakrieland from January to December 2013 was sustained at the average level of 4,850 on the Perception Index Level (PIL), which lies within the medium range. This PIL represents an improvement from 2012, when the PIL was at 4,733. This reflects the media's continual positive portrayal of Bakrieland. Below is a brief summary of the 2013 media audit results:

- Corporate Action
The media perception of Bakrieland's activities has been positive. In particular, the company's strategy of asset realignment, and refocusing on its core business, has been viewed favorably. In addition, the company's focus on improving its performance while continuing to expand business to bolster company operations has also been applauded. One

para *stakeholder*, terutama konsumennya serta jajaran manajemen baru Bakrieland yang dinilai profesional.

- **Isu Strategis**
Divestasi aset yang dilakukan pada 2013 serta masalah hukum yang melibatkan Perusahaan dan anak usahanya merupakan isu sensitive yang mempengaruhi reputasi Bakrieland. Selain itu, berita negatif mengenai Kelompok Usaha Bakrie lainnya juga memberikan dampak negatif terhadap Perusahaan. Kemenangan Bakrieland atas gugatan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Pengadilan Negeri Niaga merupakan hal yang positif di mata media. Media menganggap kemenangan tersebut bisa menjadi titik balik bagi Bakrieland untuk mengembalikan citra Perusahaan.
- **Good Corporate Governance**
Penilaian media terhadap Bakrieland pada tahun 2013 dipengaruhi oleh berbagai insiden yang dihadapi Perusahaan. Sebagai perusahaan publik, Bakrieland dianggap kurang terbuka dan transparan dalam memberikan informasi. Persepsi ini menyebabkan media beranggapan bahwa Bakrieland belum menjalankan GCG dengan baik. Media mengharapkan Manajemen lebih aktif menyampaikan aksi korporasi yang dilakukan Perusahaan serta progress proyek yang dikembangkan. Meskipun begitu, kepatuhan Perusahaan terhadap aturan pasar modal dan berbagai penghargaan GCG yang diterima oleh Bakrieland memberikan citra positif bagi Perusahaan.
- **Produk dan Jasa**
Mayoritas media memandang Bakrieland merupakan perusahaan properti yang memiliki citra positif dibandingkan dengan perusahaan Kelompok Usaha Bakrie lainnya. Citra tersebut didapat dari kualitas produk yang sesuai dengan standar yang dijanjikan, nilai pengembalian investasi yang tinggi, kelengkapan fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan, komitmen Bakrieland untuk selalu menyediakan ruang terbuka hijau di setiap produknya serta ketepatan waktu penyelesaian proyek.
- **Program Komunikasi**
Seluruh responden menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh Corporate Affairs selalu mudah untuk dipahami dan Bakrieland juga memiliki hubungan yang

of the aspects perceived particularly favorably by the media has been Bakrieland's commitment to the stakeholders, primarily its consumers and the new management board.

- **Strategic Issues**
News about the assets divested by Bakrieland in 2013, and legal issues involving the company and the business units, might have had a negative impact on the company's reputation. Furthermore, unfavorable news about other Bakrie Business Group has also adversely affected the company. On the other hand, Bakrieland's victory over the suit filed on Debt Posponement Petition (PKPU) at the Commercial District Court has been a positive development in the eyes of the media. The media has seen this court victory as a turning point for Bakrieland in regaining its positive corporate image.
- **Good Corporate Governance**
The media perception of Bakrieland in 2013 was influenced by a number of aspects. As a public corporation, Bakrieland is considered to be less transparent when it comes to information disclosure. The media has seen this as an indication that Bakrieland has not entirely implemented the good corporate governance (GCG) principles. The media expects Bakrieland's corporate Management to be more forthcoming with information about corporate actions and the progress of the company's projects. On the other hand, Bakrieland's compliance with capital market regulations and the company's ability to earn a number of GCG awards of appreciation has improved the company's image.
- **Products and Services**
In general, the media has had a more positive view of Bakrieland than other Bakrie Business Group companies. This favorable image has been shaped by product quality that meets expected standards, high return on investment, comprehensive range of facilities and supporting infrastructure in project locations, the company's commitment to providing developments with green spaces and the timely completion of projects.
- **Communications Program**
All respondents, who participated in the communication media audit for 2013, agreed that information disclosed by the CA has been consistently clear and that Bakrieland

Corporate Affairs

Corporate Affairs

baik dengan pihak media. Tetapi, mayoritas media menyatakan mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi terbaru terkait bisnis Bakrieland. Diharapkan komunikasi media dengan Bakrieland terus ditingkatkan untuk menghindari kesalahpahaman dan langkah-langkah Perusahaan untuk mengembalikan kepercayaan publik dapat segera direalisasikan

Sementara itu apresiasi Karya Jurnalistik yang diberikan oleh Bakrieland mendapat respon cukup positif dari media karena merupakan satu-satunya ajang apresiasi media yang dilakukan oleh kalangan industri properti di Indonesia.

CSR Terpadu

Sebagai perusahaan pengembang properti yang terintegrasi, Bakrieland berkomitmen untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility-CSR) secara berkelanjutan. Di bawah koordinasi CA sejak tahun 2010, Bakrieland dan Unit Usaha memfokuskan CSR pada pilar pendidikan, lingkungan dan sosial di bawah payung besar program Bakrieland Goes Green dalam pilar Green Attitude. Laporan terinci mengenai kegiatan CSR dimuat secara khusus pada bab Laporan CSR pada Laporan Tahunan ini.

Rencana 2014

Program kerja tahun 2014 disusun dengan mengacu kepada tujuan Perusahaan untuk membuat strategi pengembangan Bakrieland yang baru berdasarkan situasi internal dan eksternal saat ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, EC telah merencanakan beberapa kegiatan yang akan dilakukan, yaitu:

- Mendukung Public Relation mengkomunikasikan aksi korporasi Perusahaan.
- Mendukung kegiatan Public Relation untuk Unit Usaha.
- Mendukung program CSR Bakrieland, seperti Pohon Untuk Negeri, Taman Cerdas dan lainnya
- Mengadakan acara buka puasa bersama dengan pihak media.
- Mengadakan berbagai kegiatan Media Relations
- Mengadakan ARYADIA dan Kaleidoskop Bakrieland 2014
- Menyelenggarakan Public Expose Bakrieland pada Desember 2014
- Persiapan Media Audit 2014 yang akan dilakukan pada Januari 2015

has established good relations with the media. The majority of media operators, however, pointed out difficulties associated with obtaining the latest information about Bakrieland's business operations. Bakrieland is expected to improve its communication program to avoid misunderstandings and to initiate the appropriate measures aimed at regaining public trust.

The fact that Bakrieland presents journalism appreciation awards has garnered a positive response from the media, as Aryadia is the only media appreciation award event organized by the property industry in Indonesia.

Integrated CSR

As an integrated property developer, Bakrieland is committed to implementing corporate social responsibility (CSR) programs in a sustainable manner. Since 2010, under the coordination of the CA, Bakrieland and its business units have focused their CSR initiatives on the fields of education, environment and social development as set out in the Green Attitude pillar under Bakrieland Goes Green umbrella program. Details of the company's CSR activities are outlined in the Annual Report in the chapter on CSR.

Plans for 2014

The work program for 2014 has been formulated in accordance with Bakrieland's goal to develop a new company development strategy that is in line with the current internal and external situation. To achieve this, the EC will:

- Support Public Relations in communicating corporate actions.
- Support Public Relations activities of business units.
- Support Bakrieland's CSR programs, such as Trees for the Nation, Taman Cerdas, among others.
- Invite the media to a Breaking of Fast event.
- Organize various Media Relations activities.
- Hold ARYADIA and Bakrieland Kaleidoscope 2014.
- Organize Bakrieland Public Expose in December 2014.
- Make preparations for the 2014 Media Audit, scheduled for January 2015.
- Organize the publication of Bakrieland's 2013 Annual Report.

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Bakrieland membuka akses bagi publik untuk memperoleh informasi terkini Perusahaan dari berbagai sumber berbasis elektronik.

Bakrieland opens access to the public to have updated information about the Company from diversified electronic-based sources of information.

Bakrieland mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IX.I.4. tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan dan Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00001/BEI/01-2014 Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat butir III.1.8 dan V.6..

Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi emiten atau perusahaan publik.
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perusahaan untuk mematuhi ketentuan UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara emiten atau perusahaan publik dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat.
5. Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan keluarganya, baik dalam Perusahaan Tercatat maupun afliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Tercatat.

Bakrieland has appointed a Corporate Secretary in accordance with the Financial Services Authority (OJK) regulation No. IX.I.4. and attachment I IDX Director's Decree No. Kep-00001/BEI/01-2014 Regulation No. I-A concerning Stock Listing and Equity Securities other than Stock Issued by Listed Companies point III.1.8 and V.6.

Pursuant to the aforementioned regulations, the Corporate Secretary is responsible for the following duties:

1. Keeping track of developments in the capital market, primarily in relation to relevant capital market regulations.
2. Providing information about issuers and public corporations to investors.
3. Keeping the company's Board of Directors updated about issues relating to compliance with Law No.8/1995, on the capital market, and its implementing regulations.
4. Acting as a liaison between issuers and public companies, and the Financial Services Authority (OJK) and the public.
5. Preparing a list of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and their families, both in listed companies and their affiliates, that covers stock ownership, business relations and any other concerns that might result in a conflict of interest with listed companies.

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

6. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih.
7. Menghadiri rapat Direksi dan membuat risalah hasil rapat.
8. Membantu Direksi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selama 2013 Sekretaris Perusahaan melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Memandu Perusahaan untuk senantiasa patuh terhadap peraturan pasar modal, dan mengikuti perkembangan peraturan baru untuk selanjutnya memastikan bahwa Perusahaan mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut. Perusahaan menerbitkan 3 (tiga) Laporan Keuangan Triwulan dan 1 (satu) Laporan Keuangan Tahunan Teraudit 2012 serta 1 (satu) Laporan Tahunan 2012.
2. Melakukan korespondensi dengan regulator pasar modal (OJK dan BEI) maupun lembaga-lembaga penunjang lainnya seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Biro Administrasi Efek (BAE) dan Wali Amanat. Korespondensi yang dilakukan selama 2013 sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kali.
3. Memberikan keterbukaan informasi terkait Perusahaan yang disampaikan melalui pelaporan, baik yang diatur maupun tidak, antara lain dalam bentuk siaran pers, website, dan melayani setiap kebutuhan informasi terkait kondisi Perusahaan. Siaran pers yang diterbitkan selama 2013 sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 28 Juni 2013
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 28 Juni 2013.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan Paparan Publik (Public Expose) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Public Expose Insidentil dan Tahunan yang keduanya dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2013.
6. Menjadi anggota Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA).

6. Preparing a list of shareholders who hold 5% (five percent) or more.
7. Attending meetings of the Board of Directors and taking the minutes of such meetings.
8. Assist Board of Directors on the implementation of the General Meetings of Shareholders.

In 2013, the Corporate Secretary carried out the following activities:

1. Ensured Bakrieland's compliance with capital market regulations, and kept abreast of any new policies to ensure company compliance. The company published 3 (three) Quarterly Financial Statements, 1 (one) Audited Annual Financial Report for 2012 and 1 (one) Annual Report for 2012.
2. Maintained correspondence with capital market regulators (OJK and BEI) and other supporting institutions, such as the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) and the Securities Administration (BAE), as well as the Trustees. There were 99 (ninety-nine) instances of correspondence between the parties in 2013.
3. Facilitated the disclosure of company-related information through various channels, either in compliance with regulations or not, such as press releases, websites and mailing lists, and by responding to information requests about the company. In addition, a press release was issued on 28 June 2013.
4. Coordinated the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), which took place on 28 June 2013.
5. Coordinated both the Incidental and Annual Public Exposures on 25 October 2013.
6. Registered as a member of the Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA).

Akses Informasi Publik

Bakrieland senantiasa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dan investor untuk memperoleh informasi mengenai Perusahaan, melalui beragam sumber informasi berbasis elektronik. Kegiatan publikasi Perusahaan dapat diakses melalui situs www.bakrieland.com yang memuat informasi terkini seperti kemajuan proyek, pergerakan harga saham, aksi korporasi, dan informasi penting lainnya. Bakrieland juga memberikan informasi terkini kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui surat elektronik (email)

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perusahaan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Bakrieland, Tel. (62-21) 5257835, Fax. (62-21) 5225063, Email: info@bakrieland.com.

Rencana 2014

Pada tahun 2014 mendatang, Sekretaris Perusahaan akan lebih aktif mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi, *workshop*, dan pelatihan terkait peraturan-peraturan baru terkait pasar modal yang diselenggarakan oleh regulator, Asosiasi Emiten Indonesia, dan ICSEA.

Profil Sekretaris Perusahaan

Kurniawati Budiman lahir di Jakarta, 21 Agustus 1971, mulai menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Bakrieland sejak 30 Januari 2013. Beliau bergabung pada Kelompok Usaha Bakrie sejak tahun 2005 dan sebelumnya menjabat sebagai Chief Administration Officer Bakrieland Hotels & Resorts. Beliau meraih gelar Bachelor Administrative Studies dari York University, Toronto.

Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2013, Sekretaris Perusahaan melakukan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi, yaitu sebagai berikut:

Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer	Materi / Subject
20 February 2013	Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD)	Enhancing GCG Policy & Practice based on ASEAN CG scorecard
27-28 November 2013	OJK, IDX, KSEI	Investor Summit & Capital Market Expo 2013

*Tabel Korespondensi | *Table Correspondence

Access to Public Information

The investors, and the public at large, should have the opportunity to access information about a company. The rapid advancements in information technology, which have further diversified electronic-based sources of information, have made the dissemination of data easier than ever. Bakrieland's publications are accessible on the company's website at www.bakrieland.com, which features up-to-date information about project progress, share prices and corporate activities, among others. Bakrieland also runs a mailing list to keep relevant parties abreast of the latest information.

For further information about the company, investors and the public can contact Bakrieland's Corporate Secretary at (62-21) 5257835, by fax (62-21) 5225063 or email info@bakrieland.com.

Plans for 2014

In 2014, the Corporate Secretary will participate in a wide range of awareness programs, workshops and training courses related to new regulations issued by the capital market authority, organized by the regulators, the Indonesia Listed Companies Association and the ICSEA.

Profile of the Corporate Secretary

Born in Jakarta on 21 August 1971, Kurniawati Budiman has held the position of Bakrieland's Corporate Secretary since 30 January 2013. She first joined the Bakrie Group in 2005, and previously served as the Chief Administration Officer for Bakrieland Hotels & Resorts. She earned her bachelor's degree in Administrative Studies from York University in Toronto, Canada.

Competence Development

In 2013, the Corporate Secretary participated in several training for its competence development, as follow:

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Perihal Surat	Kepada	Peraturan
Laporan Perubahan Kepemilikan Saham 5% atau Lebih	OJK, IDX	Peraturan OJK No. X.M.1
Laporan Perubahan Kepemilikan Saham 5% atau Lebih	OJK, IDX	Peraturan OJK No. X.M.1
Tanggapan Atas Penelaahan Laporan Keuangan Tengah Tahunan Per 30 Juni 2012 PT Bakrieland Development Tbk	OJK	Surat OJK No.: S-14634/BL/2012
Keterbukaan Informasi	OJK, IDX	Peraturan OJK No. X.K.1
Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Bentuk Valuta Asing	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Desember 2012	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir III.3.4.2
Kesiapan Menjelang Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk	IDX, OJK	Surat Bursa No. S-00023/BEI.PPS/01-2013
Konfirmasi Pemenuhan Kriteria Satu Grup Perusahaan Dengan Perusahaan Tercatat Lainnya	IDX, OJK	Surat Keputusan Direksi Bursa No. Kep-00403/BEI/12-2012
Pergantian Corporate Secretary PT Bakrieland Development Tbk	OJK, IDX, BAE, KSEI, AEI	Peraturan OJK No. X.K.1 dan Peraturan Bursa No. I-A Lampiran II butir C.16
Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Bentuk Valuta Asing	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Januari 2013	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir III.3.4.2
Permintaan Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan di Media Massa	IDX	Surat Bursa No. S-0404/BEI.PPJ/02-2013
Penjelasan Atas Volatilitas Transaksi Efek	IDX	Surat Bursa No. S-0416/BEI.PPJ/02-2013
Permintaan Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan di Surat Kabar	OJK	Surat OJK No. S-85/PM.23/2013
Penginian Data Profile Perusahaan Tercatat di Website IDX & Aplikasi New IDXnet	IDX	IDXnet
Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan di Media Massa	IDX	Surat Bursa No. S-0481/BEI.PPJ/02-2013
Bukti Iklan Hasil Pemantauan Khusus Pemingkatan	OJK, IDX, Wali Amanat	Peraturan OJK No. IX.C.11
Kesiapan Dana Pembayaran Pelunasan Pokok dan Kupon Obligasi I Bakrieland Tahun 2008 Seri B dengan Tingkat Bunga Tetap	IDX	Surat Bursa No. S-00023/BEI.PPS/01-2013
Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan di Media Massa	IDX	Surat Bursa No. S-0502/BEI.PPJ/03-2013
Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Bentuk Valuta Asing	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
Keterbukaan Informasi PT Bakrieland Development Tbk	OJK, IDX, Wali Amanat	Peraturan OJK No. X.K.1
Permintaan Penjelasan	OJK	Surat OJK No. 144/PM.23/2013
Informasi Pergantian Corporate Secretary	IDX	Peraturan OJK No. X.K.1 dan Peraturan Bursa No. I-E
Informasi Kantor Akuntan Publik PT Bakrieland Development Tbk	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir IV.9.4
Informasi Komite Audit PT Bakrieland Development Tbk	IDX	IDXnet
Keterbukaan Informasi PT Bakrieland Development Tbk	OJK, IDX, KSEI, Wali Amanat	Peraturan OJK No. X.K.1
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 28 Februari 2013	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir III.3.4.2
Bukti Iklan Pemberitahuan Pelunasan Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Seri B Dengan Tingkat Bunga Tetap	OJK, IDX, Wali Amanat	Peraturan OJK No. X.K.1

Perihal Surat	Kepada	Peraturan
Pemintaan Penjelasan terkait PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan")	IDX, OJK	Surat Bursa No. S-0661/BEI. PPJ/03-2013
Keterbukaan Informasi PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan")	OJK, IDX	Peraturan OJK No. X.K.1 butir k.
Keterbukaan Informasi PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan")	OJK, IDX	Peraturan OJK No. X.K.1
Penjelasan Tentang Pemberitaan di Media Massa	IDX	Surat Bursa No. S-0778/BEI. PPJ/04-2013
Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Bentuk Valuta Asing	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Maret 2013	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir III.3.4.2
Laporan Perubahan Kepemilikan Saham 5% atau Lebih	OJK, IDX	Peraturan OJK No. X.M.1
Pemintaan Penjelasan terkait PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan")	IDX, OJK	Surat Bursa No. S-0869/BEI. PPJ/04-2013
Laporan Perubahan Kepemilikan Saham 5% atau Lebih	OJK, IDX	Peraturan OJK No. X.M.1
Laporan Perubahan Kepemilikan Saham 5% atau Lebih	OJK, IDX	Peraturan OJK No. X.M.1
Laporan Keuangan PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan")	IDX, OJK	Peraturan Bursa No. I-E butir III
Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Bentuk Valuta Asing	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 April 2013	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir III.3.4.2
Informasi Rencana RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Bakrieland Development Tbk	OJK, IDX, BAE, KSEI	Peraturan OJK No. IX.1.1
Konfirmasi Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	OJK	Surat OJK No. 392/PM.23/2013
Pemintaan Penjelasan Penjualan Lido Resort	IDX, OJK	Surat Bursa No. S-1229/BEI. PPJ/05-2013
Pemintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa	IDX	Surat Bursa No. S-1250/BEI. PPJ/05-2013
Bukti Iklan Pengumuman Pemberitahuan RUPS Tahunan Dan RUPS Luar Biasa PT Bakrieland Development Tbk	OJK, IDX, BAE, KSEI	Peraturan Bursa No. I-E butir IV.5
Keterbukaan Informasi PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan")	OJK, IDX	Peraturan OJK No. X.K.1 : Peraturan Bursa No. I-E butir IV.2.14
Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Bentuk Valuta Asing	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
Perubahan Agenda RUPS Tahunan PT Bakrieland Development Tbk	OJK, IDX, BAE, KSEI	Peraturan OJK No. IX.1.1
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Mei 2013	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir III.3.4.2
Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2013 PT Bakrieland Development Tbk dan Bukti Iklan	OJK	Peraturan OJK No. X.K.2
Laporan Tahunan 2012 PT Bakrieland Development Tbk	OJK, IDX	Peraturan OJK No. X.K.6
Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2013 PT Bakrieland Development Tbk dan Bukti Iklan	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir III.1.6.2
Bukti Iklan Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2012 PT Bakrieland Development Tbk	IDX	IDXnet
Bukti Iklan Pengumuman Panggilan RUPS Tahunan PT Bakrieland Development Tbk	OJK, IDX, BAE, KSEI	Peraturan Bursa No. I-E butir IV.5
Bukti Iklan	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir VI.2

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Perihal Surat	Kepada	Peraturan
Dokumen Elektronik (Softcopy) Tahunan 2012 PT Bakrieland Development Tbk	OJK, IDX	Peraturan OJK No. X.K.6 : Peraturan Bursa No. I-E
Bukti Iklan Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2012 PT Bakrieland Development Tbk	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir VI.2
Laporan Keuangan Auditan 2012 PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan")	IDX, OJK	Peraturan Bursa No. I-E butir III.1.9
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrieland Development Tbk	OJK, IDX, BAE, KSEI	Peraturan OJK No. IX.1.1
Bukti Iklan Keputusan RUPS Tahunan PT Bakrieland Development Tbk	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir IV.6
Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Bentuk Valuta Asing	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
Permintaan Penjelasan	OJK	Surat OJK No. 598/ PM.23/2013
Konfirmasi Atas Pemilikan Laman (Website)	IDX	Surat Bursa No. S-03413/BEI. PPU/07-2013
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 Juni 2013	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir III.3.4.2
Laporan Keuangan Triwulan II per 30 Juni 2013 (Tidak Diaudit) PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan")	IDX, OJK	Peraturan Bursa No. I-E butir III
Laporan Keuangan Triwulan I per 31 Maret 2013 (Tidak Diaudit) PT Bakrieland Development Tbk	IDX, OJK	Peraturan Bursa No. I-E butir III.1.1.2
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Juli 2013	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir III.3.4.2
Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Bentuk Valuta Asing per 31 Juli 2013	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
Partisipasi Dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2012	IDX	
Pengisian Kuesioner Self-asseement CGPI 2012	IDX	Surat Bursa No. S-1865/BEI. PPJ/08-2013
Permintaan Penjelasan	OJK	Surat OJK No. S-598/ PM.23/2013
Keterbukaan Informasi PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan")	OJK, IDX	Peraturan OJK No. X.K.1 : Peraturan Bursa No. I-E butir IV.2.14
Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Bentuk Valuta Asing per 31 Agustus 2013	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Agustus 2013	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir III.3.4.2
Permintaan Penjelasan	IDX, OJK	Surat Bursa No. S-02028/BEI. PPJ/09-2013
Permintaan Penjelasan	OJK	Surat OJK No. 822/ PM.23/2013
Keterbukaan Informasi	IDX, OJK	Peraturan OJK No. X.K.1 : Peraturan Bursa No. I-E butir IV.2.14
Keterbukaan Informasi PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan")	OJK	Peraturan OJK No. X.K.1 : Peraturan Bursa No. I-E butir IV.2.14
Laporan Keuangan Tengah Tahunan per 30 Juni 2013 PT Bakrieland Development Tbk	OJK, IDX	Peraturan OJK No. X.K.2 butir 3
Penjelasan Laporan Keuangan Tengah Tahunan per 30 Juni 2013 PT Bakrieland Development Tbk	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir III.1.4

Perihal Surat	Kepada	Peraturan
Bukti iklan Laporan Keuangan Tengah Tahunan per 30 Juni 2013 PT Bakrieland Development Tbk	IDX	Peraturan Bursa No. IV.2
Permintaan Penjelasan Tambahan PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan")	IDX, OJK	Surat Bursa No. S-02114/BEI-PPJ/09-2013
Informasi Pengangkatan Komite Audit PT Bakrieland Development Tbk	OJK, IDX	Peraturan OJK No. IX.1.5 butir 8.c
Keterbukaan Informasi PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan")	OJK	Peraturan OJK No. X.K.1 : Peraturan Bursa No. I-E butir IV.2.14
Permohonan Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek ("Suspensi") PT Bakrieland Development Tbk	IDX, OJK	Surat Bursa No. 5-01989/BEI-PPJ/09-2013
Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Bentuk Valuta Asing per 30 September 2013	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
Informasi Rencana Public Expose Insidentil dan Tahunan PT Bakrieland Development Tbk	IDX, OJK	Peraturan Bursa No. I-E butir V.4.1
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 September 2013	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir III.3.4.2
Courtesy Visit PT Bakrieland Development Tbk	IDX	
Penjelasan Lanjutan atas Perkara Permohonan PKPU Terhadap PT Bakrieland Development Tbk dan Pemohonan Pencabutan dan Penghentian Suspensi Perdagangan Efek ELTY	IDX, OJK	Surat Bursa No. 5-01989/BEI-PPJ/09-2013
Materi Public Expose Insidentil dan Public Expose Tahunan PT Bakrieland Development Tbk	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir V.4.2
Laporan pelaksanaan Public Expose Insidentil dan Public Expose Tahunan PT Bakrieland Development Tbk	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir V.4.4
Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Bentuk Valuta Asing per 31 Oktober 2013	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Oktober 2013	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir III.3.4.2
Laporan Keuangan Triwulan III per 30 September 2013 PT Bakrieland Development Tbk	IDX, OJK	Peraturan Bursa No. I-E butir III.1.1.2
Penjelasan Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan")	IDX, OJK	Surat Bursa No. S-02412/BEI-PPJ/11-2013
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 Nopember 2013	IDX	Peraturan Bursa No. I-E butir III.3.4.2
Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Bentuk Valuta Asing per 30 Nopember 2013	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009

Hubungan Investor Investor Relations

Bakrieland terus membangun citra yang baik dengan investor dan analis melalui penyampaian informasi kinerja secara berkala.

Bakrieland constantly works toward building a positive image by nurturing good relations with investors and analysts through regularly releasing information of the Company's performance.

Hubungan Investor merupakan suatu tanggung jawab manajemen strategis yang mengintegrasikan aspek-aspek penting dalam Perusahaan. Aspek tersebut mencakup keuangan, komunikasi, pemasaran, dan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal, yang memungkinkan terciptanya komunikasi dua arah yang efektif antara perusahaan, masyarakat keuangan, dan pihak-pihak lain. Komunikasi yang efektif tersebut akan memberikan pengaruh pada terbentuknya penilaian yang wajar atas saham perusahaan. Selain itu, Hubungan Investor juga berfungsi untuk memberikan gambaran yang tepat mengenai kinerja dan prospek perusahaan kepada investor maupun calon investor.

Secara umum cakupan tugas Hubungan Investor yaitu:

1. Menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat keuangan (investor, analis, dan media).
2. Mengikuti perkembangan bursa saham dan memberikan saran kepada manajemen terkait dengan saham perusahaan.
3. Menyediakan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada masyarakat keuangan.
4. Memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan khususnya bidang keuangan.

Investor relations refer to a strategic management undertaking that integrates key elements within the company. These elements include finances, communication, marketing and compliance with capital market regulations that allows for effective two-way communication between the company, the financial community and other relevant parties. Effective communication will help build a reasonable assessment of company shares. Investor relations also contributes in providing an accurate picture of company performance and prospects to investors and prospective investors.

The scope of the investor relations function to cover the following:

1. Fosters effective communication and good relations with the financial community (investors, analysts and the media).
2. Keeps track of stock market developments and offers advice on company shares to management.
3. Provides information on the condition of the company to the financial community.
4. Responds to enquiries related specifically to financial matters.

Sebagai perusahaan publik yang menjunjung tinggi aspek keterbukaan informasi, Bakrieland senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan akses informasi kepada para analis dan investor. Bakrieland berusaha membangun citra yang baik melalui pengembangan hubungan dengan investor dan analis baik secara interaktif, maupun penyampaian informasi berkala, terutama yang berkaitan dengan kinerja dan prospek Perusahaan. Penyampaian informasi kepada investor/analis dilakukan melalui kegiatan *road show*, *analyst meeting*, *investor conference*, dan media komunikasi lainnya. Kehadiran CEO dan/atau CFO Perusahaan dalam setiap *road show* dengan para analis/*fund manager* merupakan bentuk kepedulian yang tinggi terhadap kegiatan Hubungan Investor.

Selama tahun 2013, kegiatan pokok yang dilakukan Hubungan Investor adalah:

1. Mengadakan pertemuan dengan investor / analis sebanyak 13 (tiga belas) kali.
2. Menghadiri *Asian Real Estate Conference* di Hong Kong pada 9 Januari 2013.
3. Memberikan masukan kepada manajemen terkait perkembangan bursa saham dan saham Perusahaan.
4. Melakukan korespondensi dan menjawab pertanyaan yang berasal dari masyarakat keuangan.

Pada tahun 2013, jumlah pertemuan dengan analis/investor menurun dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini merupakan dampak dari sentimen negatif bisnis sektor properti di Indonesia dan juga oleh kinerja perusahaan. Namun, dengan kondisi tersebut Perusahaan terus berupaya memberikan keterbukaan informasi kepada analis maupun investor terkait kinerja Perusahaan melalui *website* perusahaan, maupun melalui *mailing list* investor dan analis.

As a public company that upholds the principle of information transparency, Bakrieland consistently strives to improve the quality of information and its access to analysts and investors. Bakrieland constantly works toward building a positive image by nurturing good relations with investors and analysts in an interactive fashion, while regularly releasing information, mainly related to company performance and prospects. Information is delivered to investors/analysts among others through road shows, analyst meetings, investor conferences and other media communications. The presence of the company CEO and or CFO alongside analysts/fund managers in every road show reflects the company's firm commitment in cultivating good investor relations.

Core activities undertaken in 2013 are as follows:

1. Convened 13 (thirteen) meetings with investors/analysts.
2. Attended the Asian Real Estate Conference held in Hong Kong on 9th January, 2013.
3. Provided input to management on developments in the stock exchange and company shares.
4. Maintained correspondence and responded to enquiries from the financial community.

The number of meetings with analysts/investors in 2013 was less than those convened in 2012. This is a consequence of negative sentiments towards Indonesia's property sector, in addition to company performance. Nevertheless, despite the circumstances, the company determinedly ensures the transparency of information for analysts and investors regarding company performance through its official website as well as mailing lists among investors and analysts.

Hubungan Investor Investor Relations

Rencana 2014

Untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat atas properti yang dimiliki dan dikelola oleh Bakrieland, pada tahun 2014 Hubungan Investor berencana untuk:

- Meningkatkan pertemuan dengan para investor, analis dan media
- Meningkatkan kualitas laporan kepada investor, analis, media dan manajemen Perusahaan.
- Meningkatkan keterbukaan informasi terkait kinerja Perusahaan.

Melalui berbagai kegiatan di atas diharapkan mampu memberikan efek positif terhadap penilaian harga saham Perusahaan.

Plans for 2014

In 2014, Investor Relations shall encompass the following planned activities:

- Intensify meetings with investors, analysts and the media
- Improve the quality of reports to investors, analysts, the media and company management.
- Heighten information disclosure on company performance.

This is intended to enhance the public's understanding of properties owned and managed by Bakrieland, which ultimately is expected to have a positive impact on the valuation of the company's share prices.

Rapat dengan Analis dan Manajer Investasi 2013 | Meetings with Analysts and Investment Managers in 2013

Tanggal/Date	Institusi/Institution	Negara/Country
19 June 2013	IMC & Awing Japan	Jepang
18 June 2013	Spinnaker Capital Group	Singapore
11 March 2013	Noonday Asset Management	Singapore
24 February 2013	Greenday Capital	Singapore
18 January 2013	Religare Capital Markets	Singapore
09 January 2013	Samena Capital	Hong Kong
09 January 2013	APG	Hong Kong
09 January 2013	Cowell & Lee	Hong Kong
09 January 2013	EFG Asset Management	Hong Kong
09 January 2013	BOCI-Prudential	Hong Kong
09 January 2013	FIL Investment Management	Hong Kong
09 January 2013	Cohen & Steers	Hong Kong
02 January 2013	Philip Securities Indonesia	Indonesia

Laporan Riset 2013 | Research Report 2013

Tanggal/Date	Institusi/Institution	Rekomendasi/Recommendation
05 March 2013	Religare Capital Markets	Buy

Forum Investor, NDR dan Konferensi | Investor Forum, NDR and Conference

Tanggal/Date	Tema/Theme	Lokasi/Location
09 January 2013	Asian Real Estate Conference	Hong Kong

Laporan Komite Audit

Audit Committee Report

Kepada Yth:
Dewan Komisaris
PT Bakrieland Development Tbk
Wisma Bakrie 1, Lantai 7
Jalan HR Rasuna Said Kav B-1
Jakarta 12920

Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Dengan hormat.

Komite Audit adalah sebuah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012 dengan lampiran peraturan No. IX.I.5, peraturan Bapepam-LK No. KEP-29/PM/2004 dengan lampiran peraturan No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. KEP.305/BEJ/07-2004 tentang Perusahaan Terdaftar wajib memiliki Komite Audit.

Tugas Komite Audit di PT Bakrieland Development Tbk (Perusahaan) antara lain adalah :

- Melakukan *oversight* atas laporan keuangan Perusahaan yang diterbitkan untuk kepentingan *publik*.
- Memperoleh informasi mengenai pelaksanaan aktifitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Manajemen.
- Melalui hasil kerja *Auditor Internal* dan *Eksternal* melakukan *oversight* atas efektivitas pengendalian *internal* yang telah diterapkan oleh Manajemen dalam pengelolaan usaha maupun penyajian laporan keuangan Perusahaan.
- Melakukan *review* atas rencana dan hasil aktivitas yang dilakukan oleh *Auditor Internal* dalam meyakinkan bahwa aktifitas operasional telah sesuai dengan peraturan Perusahaan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas;
- Melakukan *review* atas rencana dan hasil aktivitas *Auditor Eksternal* dalam meyakinkan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.
- Melakukan *review* atas obyektivitas dan independensi *Auditor Internal* maupun *Eksternal*.
- Melakukan pengawasan atas obyektivitas dan independensi Auditor Eksternal dan merekomendasikan penunjukannya.
- Bersama –sama dengan Komite GCG, melakukan *oversight* atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pemantauan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, benturan kepentingan, dan etika usaha.

To:
Board of Commissioners
PT Bakrieland Development Tbk
Wisma Bakrie 1, Lantai 7
Jalan HR Rasuna Said Kav B-1
Jakarta 12920

Audit Committee's Annual Activity Report for the Year Ended 31st December, 2013

Dear Commissioners,

The Audit Committee was formed by the Board of Commissioners pursuant to Bapepam-LK Regulation No. KEP-643/BL/2012 with enclosed Regulation No. IX.I.5, Bapepam-LK Regulation No. KEP-29/PM/2004 concerning the Establishment of an Audit Committee and its Working Guidelines, and Indonesian Stock Exchange Regulation No. KEP.305/BEJ/07-2004 on Obligation of Listed Companies to Establish an Audit Committee.

The Audit Committee in PT Bakrieland Development Tbk has the following duties to fulfill:

- Oversee company financial statements published for public interests.
- Obtain information on the risk management process implemented by company management.
- Based on work done by the internal and external auditor, oversee the effectiveness of internal controls applied by management in running the business and presenting company financial statements.
- Review activity plans and outcomes of the internal auditor to make sure that operational activities remain consistent with company policies and regulations issued by regulators.
- Review activity plans and outcomes of the external auditor to make sure financial statements are free of material misstatement.
- Review the objectivity and independence of the internal and external auditor.
- Oversee the objectivity and independence of the external auditor and recommend his or her appointment.
- Together with the GCG Committee, oversee the implementation of good corporate governance and keep track of the company's compliance with existing laws and regulations, conflict of interest and business ethics.

Komite Audit Perusahaan untuk periode tahun 2013 terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) orang anggota sebagai berikut :

1. Kanaka Puradiredja (Ketua/Komisaris Independen)
2. Mohamad Hassan (Anggota/Profesional Independen)
3. Soenarso Soemodiwirjo (Anggota/Profesional Independen) (*)
4. Indra Safitri (Anggota/Profesional Independen) (**)

(*) Keanggotaan berakhir pada tanggal 01 Oktober 2013

(**) Keanggotaan aktif mulai tanggal 01 Oktober 2013

Pada tahun 2013, Komite Audit menyelenggarakan 14 (empat belas) kali rapat formal, dengan tingkat kehadiran Kanaka Puradiredja 100%, Mohammad Hassan 93%, Soenarso Soemodiwirjo 67 % dan Indra Safitri 100%. Hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pembahasan Agenda Komite Audit tahun 2013.
- b. Pembahasan rencana implementasi sistem manajemen.
- c. Penyusunan laporan Komite Audit tahun 2012 untuk Dewan Komisaris dan Laporan tahunan 2102.
- d. Membahas pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2012 dengan Auditor Eksternal serta isu-isu yang terkait dengan Laporan Keuangan.
- e. Membahas perencanaan audit dengan Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2013.
- f. Membahas Laporan Keuangan Triwulanan Perusahaan tahun 2013 sebelum dipublikasikan.
- g. Membahas pelaksanaan dan hasil oleh Auditor Internal tahun 2013.
- h. Membahas isu perpajakan dan isu legal Perusahaan dan mengkaji kepatuhan anggaran dasar Perusahaan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 4 Maret 2014



Kanaka Puradiredja
Ketua
Chairman



Mohamad Hassan
Anggota
Member



Indra Safitri
Anggota
Member

In 2013, the company's Audit Committee consists of a chairperson and 2 (two) members as provided below:

1. Kanaka Puradiredja (Chairperson/Independent Commissioner)
2. Mohamad Hassan (Member/Independent Professional)
3. Soenarso Soemodiwirjo (Member/Independent Professional) (*)
4. Indra Safitri (Member/Independent Professional) (**)

(*) Membership expires 1st October, 2013

(**) Active membership starts 1st October, 2013

In 2013, the Audit Committee convened 14 (fourteen) formal meetings with 100% attendance from Kanaka Puradiredja, 93% attendance from Mohammad Hassan, 67% attendance from Soenarso Soemodiwirjo and 100% attendance from Indra Safitri. Matters discussed at these meetings are as follows:

- a. Discussion on Audit Committee agenda for 2013.
- b. Discussion on management system implementation plan.
- c. Preparation of the Audit Committee report for 2012 for submission to the Board of Commissioners, and Annual Report 2012.
- d. Implementation of the auditing of financial statements in 2012 with the external auditor and issues related to the financial statements.
- e. Audit plan with the external auditor for 2013 financial statements.
- f. Company's quarterly financial statements for 2013 before they are published.
- g. Implementation and results of internal audit for 2013.
- h. Company tax and legal issues, and compliance assessment of company Memorandum of Understanding with existing laws and regulations.

Thank you for your kind attention.

Laporan Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Report

Kepada Yth :
Dewan Komisaris
PT Bakrieland Development Tbk
Wisma Bakrie 1, Lantai 7
Jalan HR. Rasuna Said Kav B-1, Jakarta 12920

Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Hingga Tanggal Laporan Tahunan

Komite Pemantau Risiko dalam melakukan tugasnya berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR) yang disahkan pada tanggal 15 November 2008. Tugas KPR adalah sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang masalah-masalah pengelolaan risiko.
2. Mengevaluasi sistem pengelolaan risiko dan pengawasan intern.
3. Menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris masalah-masalah terkait sebagai langkah melakukan antisipasi risiko.

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KPR bertindak secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Susunan Komite Pemantau Risiko untuk periode 2013 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 158/SK/KOM-BLD/HIS/X/07 sebagai berikut :

1. Lukman Purnomosidi (Ketua/Komisaris Independen)
2. Supartono (Anggota/Komisaris)

Kegiatan yang dilakukan KPR dalam membantu Dewan Komisaris adalah melakukan pemantauan atas pembahasan berbagai potensi risiko usaha, yang meliputi antara lain risiko operasional, keuangan, hukum, dan risiko pasar, berikut rekomendasi langkah-langkah mitigasi. Secara operasional, kegiatan pengelolaan risiko Perusahaan dilakukan oleh Divisi Corporate Risk Management & Compliance (CRMC).

Selama tahun 2013, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran Bapak Lukman Purnomosidi 100% dan Bapak Supartono 100%. Rapat yang diadakan Komite Pemantau

To :
Board of Commissioners
PT Bakrieland Development Tbk
Wisma Bakrie 1, Lantai 7
Jalan HR. Rasuna Said Kav B-1, Jakarta 12920

Risk Monitoring Committee's Annual Activity Report for Period Ended 31st December, 2013 Until the Date of Annual Report

The Risk Monitoring Committee performs its duties in keeping with the Risk Monitoring Committee Charter adopted on 15th November, 2008. The committee is responsible for the following duties:

1. Offer inputs to the Board of Commissioners concerning risk management.
2. Evaluate the risk management systems and internal controls.
3. Provide information to the Board of Commissioners on pertinent issues to anticipate risks.

The Risk Monitoring Committee is led by an Independent Commissioner. In performing its duties and obligations, the committee has acted in a professional and independent manner, without intervention from other parties.

The composition of the Risk Monitoring Committee for 2013 as set forth in Board of Commissioners Directive No. 158/SK/KOM-BLD/HIS/X/07 is as follows:

1. Lukman Purnomosidi (Chairman/Independent Commissioner)
2. Supartono (Member/Commissioner)

Among the activities that the Committee undertakes to assist the Board of Commissioners includes keeping track of discussions on various potential business risks that cover operational, financial, legal and market risks, in addition to offering recommendations for mitigation measures. In terms of operations, the company's risk management activities are conducted by the Corporate Risk Management & Compliance (CRMC) Division.

Throughout 2013, the Risk Monitoring Committee held 4 (four) meetings with 100% attendance from Lukman Purnomosidi and Supartono. These committee meetings included joint meetings with Bakrieland's Audit Committee.

Risiko termasuk rapat gabungan dengan Komite Audit Bakrieland. Adapun pokok-pokok pembahasan antara lain membahas mengenai *update risk management activities*, *risk assessment* proses penyusunan laporan keuangan, penguatan fungsi *Task Monitoring System (TMS)* di Unit Usaha, dan laporan Divisi Corporate Risk Management & Compliance.

Komite Pemantau Risiko melakukan penelaahan secara menyeluruh atas pelaksanaan manajemen risiko dan diperoleh hasil antara lain sebagai berikut:

- Komite Pemantau Risiko bersama-sama dengan Komite Audit menilai bahwa hasil *risk assessment* atas proses penyusunan laporan keuangan harus ditindaklanjuti bersama oleh Bakrieland Holding dan Unit Usaha. Hal ini diperlukan untuk semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan Perusahaan.
- Komite Pemantau Risiko menilai bahwa penguatan *Task Monitoring System (TMS)* dan *Transaction Based Risk Management* di Unit Usaha telah efektif dilaksanakan di Bakrieland Holding dan Unit Usaha.
- Perusahaan melalui divisi CRMC secara rutin melakukan *Task Monitoring System* dan *Transactional-Based Risk Management* melalui review dan penelaahan atas transaksi yang akan dilakukan Perusahaan. Review yang dilakukan antara lain terhadap transaksi-transaksi non-proyek yang akan dimintakan persetujuan kepada Direksi, seperti:
 - Perjanjian/kontrak
 - Dokumen perbankan
 - Materi presentasi, Info Bakrieland di website, materi Public Expose
 - Materi RUPS
 - Data pelaporan kepada instansi eksternal dan regulator

Komite Pemantu Risiko sangat mendukung peningkatan jumlah transaksi yang direview selama tahun 2013.

Jakarta, 1 Februari 2014



Lukman Purnomosidi
Ketua
Chairman



Suparsono
Anggota
Member

Discussions mainly focused on updates on risk management activities, risk assessment process, preparation of financial statements, strengthening the function of the Task Monitoring System (TMS) of business units, and reports from the Corporate Risk Management & Compliance Division.

The Risk Monitoring Committee has performed a comprehensive assessment of the risk management process with the following results:

- The Risk Monitoring Committee together with the Audit Committee are of the opinion that risk assessment results related to the preparation of financial statements must be followed up in cooperation with Bakrieland Holding and Business Units. This is necessary to improve the quality of the company's financial statements.
- The Risk Monitoring Committee assessed that efforts to strengthen the Task Monitoring System (TMS) and Transaction-Based Risk Management in Business Units have been effectively implemented in Bakrieland Holding and Business Units.
- Through the CRMC Division, the company has regularly applied the Task Monitoring System and Transactional-Based Risk Management through reviews and assessments of transactions made by the company. Reviews are carried out on non-project transactions that require the approval of the Board of Directors, such as:
 - Agreements/contracts
 - Banking documents
 - Presentation material, Bakrieland Information on the website, public expose material
 - Material for GMS
 - Reporting data to external agencies and regulators

The Risk Monitoring Committee has provided full support for the review of an increasing number of transactions throughout 2013.

Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Report

Kepada Yth:
Dewan Komisaris
PT Bakrieland Development Tbk
Wisma Bakrie 1, lantai 7,
Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-1,
Jakarta 12920

Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 hingga Tanggal Laporan Tahunan.

Sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan bahwa nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Dewan Komisaris. Oleh karena itu, guna membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris khususnya dalam hal perumusan sistem nominasi dan remunerasi Perusahaan, maka Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 2 Oktober 2007.

Selain itu, menimbang ketentuan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia agar Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau profesi dari luar Perusahaan, maka sejalan dengan hal tersebut adapun susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2013 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02A/SK-KOM/BLD/VII/2009, adalah sebagai berikut:

1. Lukman Purnomosidi
Ketua/Komisaris Independen
2. Bambang Irawan Hendradi
Anggota/Komisaris Utama
3. Supartono
Anggota/Komisaris

Tugas dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi diantaranya adalah:

- Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Eksekutif lainnya, dan anggota Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi tentang jumlah Direksi dan Dewan Komisaris.

Dear the Board of Commissioners
PT Bakrieland Development Tbk
Wisma Bakrie 1, 7th floor
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1
Jakarta 12920

The Annual Report of the Nomination and Remuneration Committee's Implementation of Activities for a Period that ended on December 31st 2013 until the date of the Annual Report.

As mentioned in the Articles of Association that the nomination and remuneration of the Board of Commissioners and Directors was set by the General Meeting of Shareholders (GMS) and the implementation was delegated to the Board of Commissioners. Therefore, to help the Board of Commissioners' implementation especially in the system formulation of nomination and remuneration, the Company's Board of Commissioners have formed the Nomination and Remuneration Committee on October 2, 2007.

Besides that, considering the National Committee Terms and Governance Policies (NCTG) on the General Guidelines of the Good Corporate Governance (GCG) of Indonesia so that the Nomination and Remuneration Committee chaired by the Independent Commissioner and the members were the Finance Commissioner or other professions from outside the company. Therefore, along with that the arrangement of the Nomination and Remuneration's member during year 2013 was set based on the Board of Commissioners Decision Letter Number 02A/SK-KOM/BLD/VII/2009 as follows:

1. Lukman Purnomosidi
Chairman/Independent Commissioner
2. Bambang Irawan Hendradi
Member/Chief Commissioner
3. Supartono
Member/Commissioner

The duties and authority of the Nomination and Remuneration Committee are:

- Arrange the selection criteria and nomination procedure for the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, other Executives and the Committee's member under the Board of Commissioners.
- Give recommendation for the number of the Board of Commissioners and Directors.

- Memberikan rekomendasi kebijakan tentang remunerasi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Komite-Komite Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi tentang besaran gaji, tunjangan, dan fasilitas yang kompetitif dan mengacu pada perkembangan pasar untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- Memberikan rekomendasi atas penilaian kinerja, pemberian saham, sistem pensiun dan kompensasi.

Sepanjang tahun 2013, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan kehadiran hampir 100% seluruh anggotanya. Pokok bahasan dalam rapat-rapat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Proses seleksi dan nominasi serta profil kandidat Eksekutif Perusahaan.
- Pembahasan kandidat anggota Direksi Perusahaan.
- Rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2013 khususnya agenda yang terkait dengan struktur organisasi Perusahaan dan suksesi Manajemen serta proses transisinya yang harus terkawal dengan baik.
- Pembahasan ajuan struktur remunerasi bagi Eksekutif Perusahaan.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan seleksi dan nominasi kandidat Direksi serta penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, yang dikukuhkan penetapannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2013 pada tanggal 28 Juni 2013.

Selain itu, pada tahun 2013, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Perusahaan telah menerima kompensasi remunerasi sebesar Rp. 13,417,512,792,- (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

Jakarta, 30 Januari 2014



Lukman Purnomosidi
Ketua
Chairman



Bambang Irawan Hendradi
Anggota
Member



Suparsono
Anggota
Member

- Give recommendation for the policies on the remuneration of the Board of Commissioner's member, the member of the Board of Directors and the member of the Board of Commissioners' committees.
- Give recommendation on salary scale, competitive allowances and facilities and refer to the development of the market for the Board of Commissioners and Board of Directors' members.
- Give recommendation of work assessment, granting stock, pension and compensation systems.

Throughout year 2013, the Nomination and Remuneration Committee has held the meeting for 4 (four) times with the presence of 100% of all members. The subjects of the meetings are as follow:

- The Selection and Nomination process and also the profile of the Company's Executive Candidate.
- The discussion of the candidates of the Company's Board of Directors.
- The plan of the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) 2013 especially the agenda of the organization's structure and management succession and also the transition process that must be guarded well.
- The discussion of structure submissions remuneration for the Company's Executives.

The Nomination and Remuneration Committee has done the selection and nomination of the Director's Candidate and also appointed the new Board of Commissioners and Directors, which was confirmed by the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) year 2013 on June 28th 2013.

Besides that, in year 2013 the Board of Commissioners and Directors received the remuneration compensation of Rp 13,417,512,792 (Thirteen billion four hundred seventeen million five hundred and twelve thousand, seven hundred ninety two).

Jakarta, 30 January 2014

Laporan Komite Kebijakan Corporate Governance

Corporate Governance Policy Committee Report

Kepada Yth :
Dewan Komisaris
PT Bakrieland Development Tbk
Wisma Bakrie 1, Lantai 7
Jalan HR. Rasuna Said Kav B-1, Jakarta 12920

Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Kebijakan Corporate Governance Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Hingga Tanggal Laporan Tahunan

Komite Kebijakan Corporate Governance mulai dibentuk oleh Perusahaan pada tanggal 13 Oktober 2009 melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 07A/SK-KOM/BLD/IX/2009. Komite ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya terutama terkait implementasi tata kelola perusahaan.

Tugas dan kewajiban Komite Kebijakan Corporate Governance adalah memberikan pendapat dan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk memantau aktivitas:

1. Penelaahan dan pengkajian ulang Anggaran Dasar.
2. Penerapan prinsip-prinsip GCG.
3. Penerapan prinsip-prinsip etika (Code of Conduct).
4. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, bersama-sama Komite Audit
5. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Komite Kebijakan Corporate Governance diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Kebijakan Corporate Governance bertindak secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

1. Kanaka Puradiredja (Ketua/Komisaris Independen)
2. Bambang Irawan Hendradi (Anggota/Presiden Komisaris)
3. Supartono (Anggota/Komisaris)

Selama tahun 2013, Komite Kebijakan Corporate Governance telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima)

To:
Board of Commissioners
PT Bakrieland Development Tbk
Wisma Bakrie 1, Lantai 7
Jalan HR. Rasuna Said Kav B-1, Jakarta 12920

Corporate Governance Policy Committee's Annual Activity Report for Period Ended 31st December, 2013 Until Date of Annual Report

The Corporate Governance Policy Committee was established by the company on 13th October, 2009 through the Board of Commissioners Directive No. 07A/SK-KOM/BLD/IX/2009. The Committee was formed for the purpose of assisting the Board of Commissioners in carrying out its oversight function, primarily pertaining to the implementation of corporate governance

The main duty and obligation of the Corporate Governance Policy Committee is to offer opinions and provide support to the Board of Commissioners in fulfilling its obligation to monitor the following activities:

1. Examine and review the Memorandum of Association.
2. Ensure the implementation of GCG principles.
3. Ensure the implementation of the principles of ethics (Code of Conduct).
4. Ensure compliance with prevailing laws and regulations, together with the Audit Committee.
5. Ensure the implementation of corporate social responsibility.

The Corporate Governance Policy Committee is chaired by an Independent Commissioner. In the discharging of duties and responsibilities, the committee has demonstrated professional conduct and maintained independence without intervention from other parties.

Members of the Corporate Governance Policy Committee as of 31st December, 2013 are as follows:

1. Kanaka Puradiredja (Chairperson/Independent Commissioner)
2. Bambang Irawan Hendradi (Member/President Commissioner)
3. Supartono (Member/Commissioner)

Throughout 2013, the Corporate Governance Policy Committee has called 5 (five) meetings with 100%

kali dengan tingkat kehadiran Kanaka Puradiredja 100%, Bambang Irawan Hendradi 100%, dan Supartono 100%. Rapat yang diadakan Komite KCG termasuk rapat gabungan dengan Komite Audit serta mengundang Direksi Bakrieland. Adapun pokok-pokok pembahasan antara lain membahas mengenai program CSR, implementasi Good Corporate Governance di Perusahaan dan Unit Usaha, hasil laporan penilaian GCG oleh penilai independen, penyesuaian kebijakan dan SOP terkait dengan perubahan struktur organisasi.

Komite Kebijakan Corporate Governance melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap implementasi GCG dan diperoleh hasil antara lain sebagai berikut:

- Komite KCG mendukung program-program CSR yang telah dijalankan, seperti Program Sejuta Buku dan Pohon Untuk Negeri. Komite senantiasa memberikan masukan-masukan agar seluruh program dapat berjalan optimal dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- Perusahaan telah berinisiatif untuk melakukan perbaikan atas implementasi GCG dengan melakukan 2 (dua) kali *assessment* GCG yaitu oleh pihak independen yang ditunjuk Perusahaan, serta keikutsertaan dalam indeks pemeringkatan GCG (CGPI 2012) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG). Komite terus mengingatkan agar Manajemen melakukan tindak lanjut yang tepat atas hasil *assessment* untuk menyempurnakan praktek GCG di Perusahaan.
- Dengan adanya perubahan struktur organisasi Perusahaan, Komite KCG mendukung adanya penyesuaian Kebijakan dan SOP.
- Komite KCG menyoroti mengenai penguatan implementasi GCG di Unit Usaha melalui sosialisasi atas kebijakan-kebijakan umum mengenai implementasi GCG di Unit Usaha.
- Komite KCG menilai agar Manajemen harus senantiasa mengedukasi karyawan untuk selalu ikut aktif dalam implementasi GCG.

attendance from Kanaka Puradiredja, Bambang Irawan Hendradi and Supartono. The committee meetings included joint meetings with the Audit Committee and with Bakrieland's Board of Directors in attendance. Discussion topics among others cover CSR programs, implementation of good corporate governance by the company and Business Units, GCG assessment report by independent evaluators, adjustments made to policies and SOP related to changes in the organizational structure.

The Corporate Governance Policy Committee has performed a comprehensive assessment of GCG implementation which led to the following outcomes:

- The committee fully supported CSR initiatives being carried out, such as the One Million Book and Trees for Indonesia campaigns. The committee has regularly offered input to ensure the optimal implementation of all programs for the benefit of the people.
- The company has taken the initiative to improve GCG implementation by conducting GCG assessments twice by independent parties appointed by the company, and participating in the GCG perception index (CGPI 2012) organized by The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG). The committee has consistently advised management to pursue the most viable and appropriate follow-up actions for the assessment of results in order to further improve company-wide GCG practices.
- Following changes to the company's organizational structure, the committee has been wholly supportive of the corresponding adjustments to policies and SOP.
- The committee placed emphasis on efforts to strengthen GCG implementation across Business Units by sensitizing on general GCG policies.
- The committee sees the importance of management to continually educate employees on the need to be actively involved in the implementation of GCG principles.

Jakarta, 1 Februari 2014



Kanaka Puradiredja
Ketua
Chairman



Bambang Irawan Hendradi
Anggota
Member



Supartono
Anggota
Member